

# B A B I

## PENDAHULUAN



### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh.

Karena Pembangunan adalah proses yang direncanakan, maka diperlukan sistem Perencanaan Pembangunan. Itulah mengapa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik Wilayah Perkotaan tentu sangat berbeda dengan Wilayah Perdesaan. Kawasan Perkotaan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu proses globalisasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan karakteristik dan spesifikasi permasalahan yang berbeda-beda. Pasal 355 ayat (3) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kawasan perkotaan dapat berupa kawasan yang merupakan bagian daerah kabupaten ataupun bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan secara langsung. Secara umum Kota berawal dari suatu kawasan permukiman kecil yang mempunyai lokasi yang strategis secara spasial bagi kegiatan perdagangan (Sandy 1978 dalam Janthy 2014). Kota dengan segala kegiatannya akan senantiasa mengalami perkembangan secara fisik sebagai dampak perkembangan sosial dan ekonomi. Kota akan terus mengalami perubahan lebih cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan fisik yang terjadi merupakan konsekuensi spasial dari penambahan jumlah penduduk baik yang disebabkan oleh faktor alamiah (kelahiran), maupun yang disebabkan oleh urbanisasi.

Pembangunan kota memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri. Kota merupakan pusat pemukiman penduduk yang melibatkan berbagai kegiatan

budidaya dengan berbagai implikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan kawasan perkotaan tersebut itu sendiri, sehingga dibutuhkan pola Pembangunan kota yang terencana, harmonis, efektif dan berkelanjutan melalui kerangka jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjalankan amanat tersebut maka pemerintah daerah merumuskan rencana pembangunan yang bersifat sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, keunggulan komparatif, kesesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah dan terkoneksi dengan dokumen perencanaan lainnya. Untuk mewujudkan rencana pembangunan yang bersifat sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui rangkaian proses yang transparan, akuntabel, serta partisipatif.

Kota Jambi merupakan pusat regional pertumbuhan wilayah di Provinsi Jambi. Sebagaimana kota-kota lain, Kota Jambi mengalami perkembangan sosial dan ekonomi yang cepat. Hal tersebut tentunya, mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota untuk kegiatan ekonomidan sosial. Tekanan pemanfaatan ruang fisik tersebut berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan perkotaan sebagai implikasi dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan ruang fisik perkotaan. Kompleksitas masalah dan dinamika perkotaan yang terjadi itulah yang harus dipecahkan dengan konsep perencanaan pembangunan, baik rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan kembali Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), seiring dengan berakhirnya masa RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJPD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan pembangunan 20 (dua puluh) tahunan bagi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi acuan bagi perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting, sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan *review* berkala atas implementasinya. Karena dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD, maka kualitas penyusunan RPJPD dari segi analisis kecenderungan dan perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan akan turut menentukan kualitas dokumen perencanaan pada satuan atau unit organisasi dalam lingkup Pemerintah Kota Jambi.

Dalam konteks ini, RPJPD dapat dilihat sebagai dokumen rencana yang dipergunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan perkembangan, kecenderungan dan perubahan dari berbagai faktor eksternal dan internal di masa depan; memperkirakan pengaruhnya terhadap pengembangan daerah masa depan; mencoba memproyeksikan arah perjalanan pembangunan daerah hingga 20 tahun ke depan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan; merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk memanfaatkan peluang seoptimal mungkin dan mengatasi kendala dan ketidakpastian seefektif mungkin.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa, penyusunan rencana yang dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan dan legislatif

dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Peran penting RPJPD tidak hanya terbatas kepada penciptaan kerangka makro arah pembangunan daerah, melainkan juga sebagai alat mewujudkan arahan pembangunan pada entitas yang lebih tinggi, yaitu: arah pembangunan Provinsi Jambi dan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, perumusan muatan RPJPD tidak dapat lepas dari arahan-arahan yang tertuang di dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW yang dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola kota, termasuk kawasan di sekitar Kota Jambi.

Selain itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dengan sasaran antara lain masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045, pendapatan per kapita US\$23.000-30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritimin sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen serta sasaran prioritas nasional lainnya diperlukan kontribusi di tingkat lokal atau daerah. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 sejalan dengan tujuan pembangunan Kota Jambi yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Jambi maka perlu untuk melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045. Tujuan penyesuaian dan sinkronisasi dimaksud guna menciptakan harmonisasi dan kontribusi pembangunan secara berjenjang yang hasil agregatnya dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dalam jangka panjang. Penyesuaian RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial untuk mewujudkan sasaran Pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, RPJPD Kota Jambi 2025-2045 mengacu pada RPJPD Provinsi ..... yang telah ditetapkan sebagai sebagai PERDA .....

RPJPD Kota Jambi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan yang diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Pemerintah Daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Daerah Kota Jambi 2025-2045 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi para pemangku kepentingan.

Keberhasilan RPJPD terletak pada kemampuannya untuk mengorganisasikan segenap pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati peta jalan (*road map*) pembangunan daerah masa depan yang akan ditempuh. Untuk itu dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun

2025-2045 disusun dan kemudian dapat diimplementasikan melalui terciptanya komitmen dan konsistensi dari segenap pemangku kepentingan untuk mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok yang termuat dalam dokumen dimaksud.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045, dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 );
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846\);](#)
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038\);](#)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 32).

### **1.3 HUBUNGAN DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA**

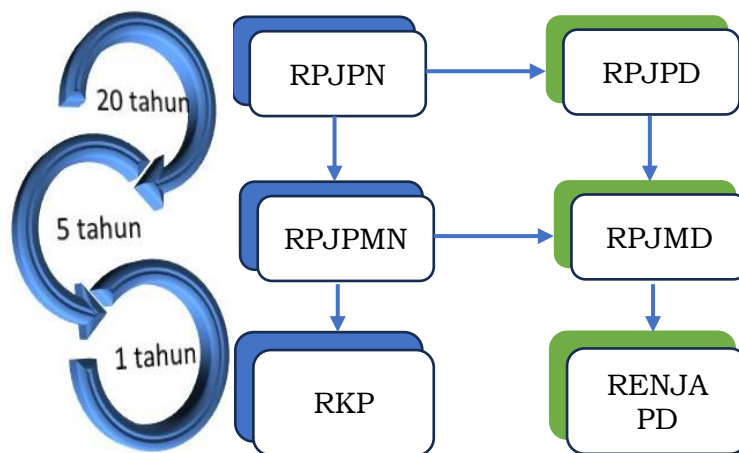
Penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi Tahun 2023-2043. Sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, RPJPD disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 guna memastikan adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan serta mengakomodir isu-isu nasional dan regional, terutama dalam wilayah Provinsi Jambi.

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan data dan fakta spasial yang bertujuan menghasilkan arah kebijakan dan sasaran yang realistis dan tidak mengganggu peruntukan tata ruang dan zonasi wilayah.

Seiring tekanan ekologis akibat bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas yang melibatkan lingkungan serta daya dukung sumber daya alam maka diperlukan perencanaan yang matang dan senantiasa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keberlanjutannya.

Untuk mengintegrasikan rencana pembangunan ini, maka Dokumen Perencanaan pembangunan yang terkait dengan penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah:

- a. RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
- b. RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045; dan
- c. RTRW Kota Jambi yang tentunya juga sudah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Jambi.



**Gambar 1.1**  
**Kedudukan RPJPD Kota Dalam Sistem Perencanaan Nasional**

### 1.3.1 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dirumuskan dengan memenuhi prinsip sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan

bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dan dapat mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan tata ruang.

Untuk mewujudkan prinsip ini, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam suatu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045. Tujuan mempedomani RPJPN yaitu menyelaraskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Jambi dengan nasional. Keterkaitan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 dengan RPJPN 2025-2045 merupakan bentuk integrasi perencanaan guna mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 sesuai dengan

### **1.3.2 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045**

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan dan mencermati dokumen RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Tujuannya untuk menjaga keselarasan pembangunan dan sinergi. *Timeline* penyusunan RPJPD provinsi dan kota berlangsung bersama dan mempedomani regulasi yang sama terkait penyelarasan dan harmonisasi dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Pencapaian sasaran dari setiap satuan pemerintahan pada dasarnya adalah agregasi dari satuan pemerintahan di bawahnya.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jambi yang bertujuan untuk melihat keselarasan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jambi

tahun 2025-2045. RPJPD Kota Jambi pada hakikatnya telah mengakomodasi kebijakan

### **1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RTRW Kota Jambi**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rumusan visi dan misi yang diejawantahkan kedalam bentuk program Pembangunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan 5 (lima) tahun, sementara rencana tata ruang merupakan hasil rencana yang lebih cenderung bersifat spasial dengan jangka waktu rencana yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu 20 (dua puluh) tahun.

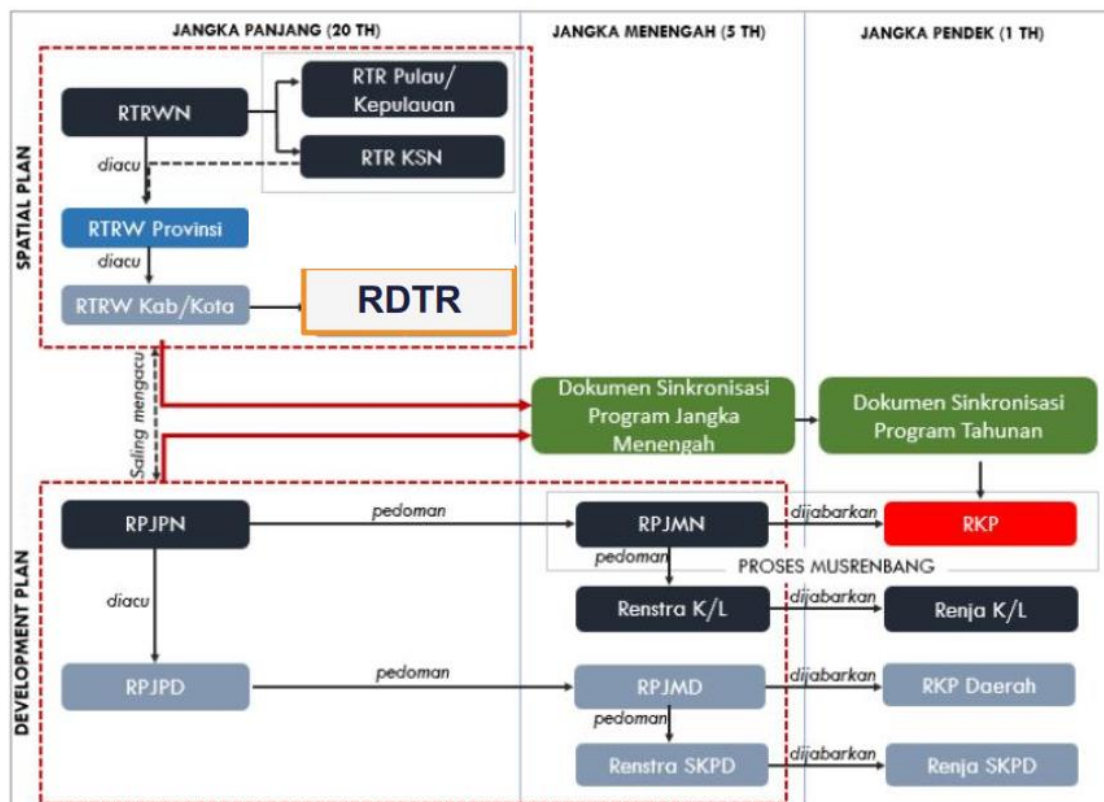
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah memposisikan ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, terutama yang bermuatan spasial sebagai pertimbangan penting dalam menentukan pokok-pokok kebijakan dan sasaran yang akan dipilih untuk periode tertentu. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun telah memenuhi aspek kelayakan dari sisi keruangan dan kewilayahan.

Mengingat RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen jangka panjang, maka diperlukan adanya kesatuan perlakuan terhadap pola ruang yang telah ada sesuai peruntukannya seraya membangun proyeksi-proyeksi sesuai empat tahapan periode RPJMD yang termuat di dalamnya. Harapannya, keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjaga karena perencanaan jangka panjang disusun dengan pertimbangan yang holistik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dimana keduanya sama-sama sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan sinkronisasi atau penyelarasan antara RPJPD dan RPJMD terutama terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Begitupun juga dengan Pasal 160 Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penelaahan dokumen dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD mengandung makna mempedomani

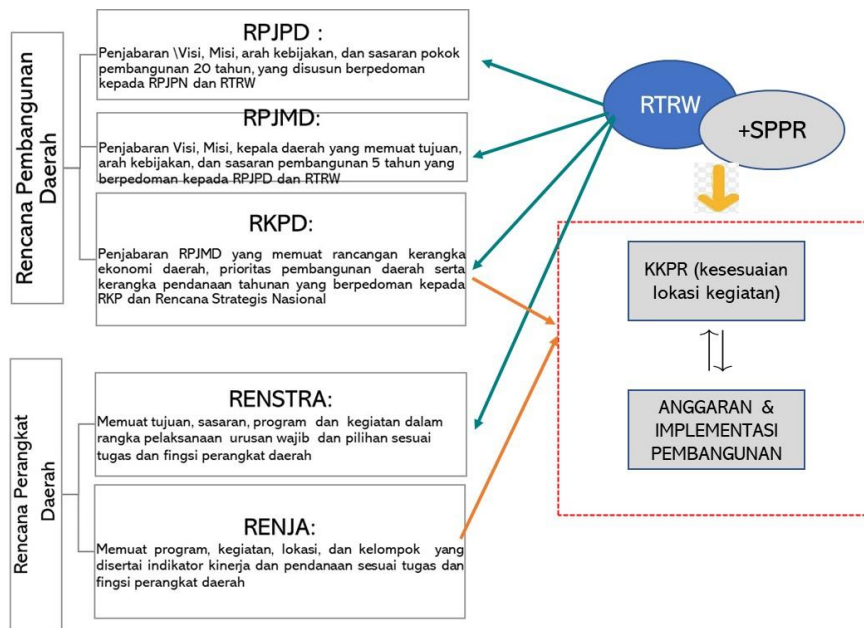
RTRW melalui proses penyalarsan. Perumusan RPJPD saat ini mengandung momentum yang sangat tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- pada periode sebelum ini, penyusunan dan penepatan RPJPD tidak berada pada tahun yang selaras dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- momentum Pilkada serentak pada Tahun 2024 yang juga diikuti dengan penyusunan RPJPD dan RPJMD baru. Pada sisi lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut dilakukannya revisi RTRW. Pada saat ini revisi RTRW Kota Jambi juga sudah berada pada proses penetapan; dan
- sudah semakin optimalnya SDM perangkat daerah dalam memahami substansi tata ruang, sehingga lebih memahami dalam memahami tujuan, kebijakan, strategi, serta rencana perwujudan yang tertuang dalam rencana tata ruang.

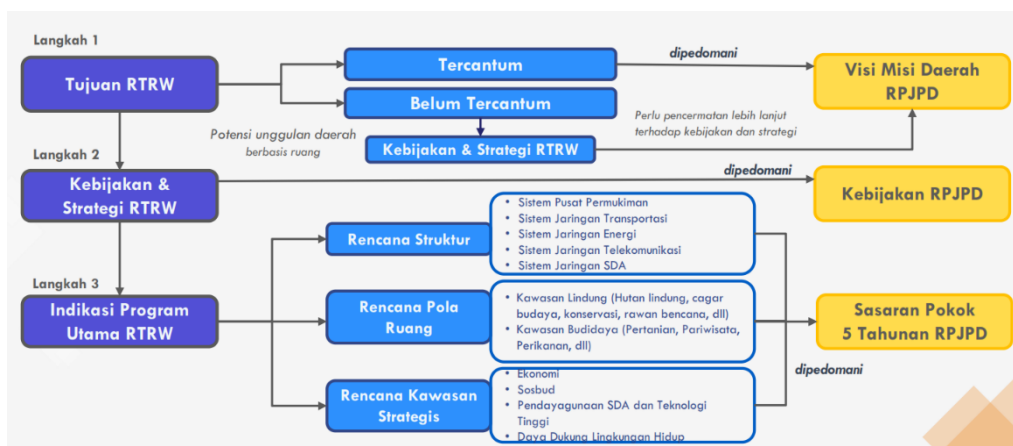


**Gambar 1.2**  
**Kedudukan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang**

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan sinkronisasi program pembangunan dengan muatan rencana tata ruang yang bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang telah memuat sinkronisasi yang merupakan hasil penyelarasan program yang akan direalisasikan. Amanat ini lahir karena latar belakang perjalanan pembangunan selama ini, dimana kesesuaian pembangunan dengan indikasi program pembangunan yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah masih berada pada kadar yang relatif rendah.

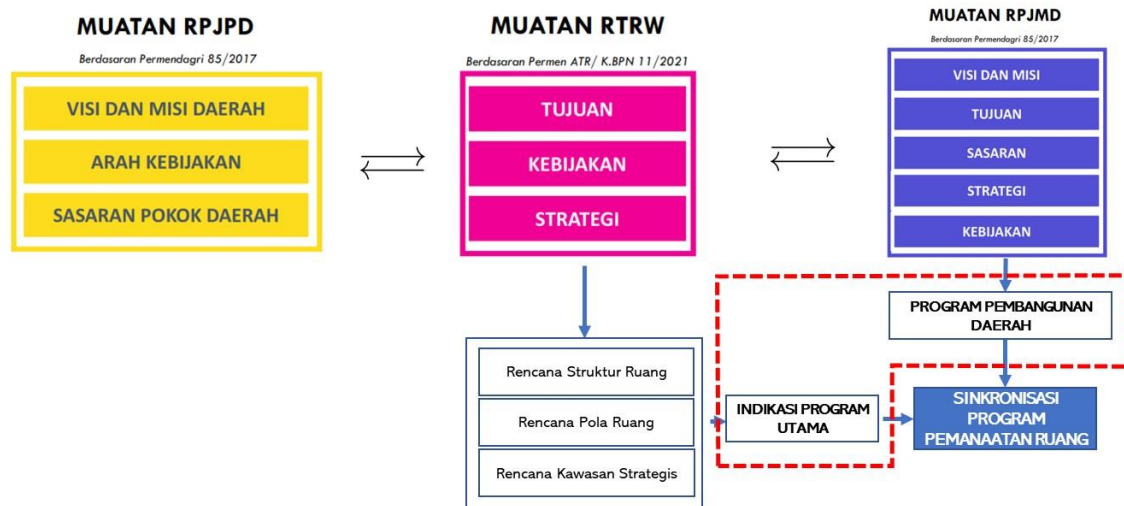


**Gambar 1.3**  
**Skema Umum Penyelarasan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang**



**Gambar 1.4**  
**Penyelarasan Muatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan**

Kebijakan, Strategi, dan Sinkronisasi Program dalam pencapaian Tujuan Penataan Ruang, selaras dalam menjawab tujuan jangka panjang daerah yang diwujudkan dengan penyelarasan muatan yang terkandung dalam masing-masing dokumen rencana.



**Gambar 1.5**

### Hubungan Muatan Rencana Tata Ruang dengan Muatan Rencana Pembangunan

#### 1.3.4 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode RPJMD yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) tahun. Visi, Misi dan Program Prioritas kepala daerah terpilih pada setiap periode harus mempedomani RPJPD guna memastikan terjaganya kesinambungan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun meskipun kepala daerah silih berganti. RPJMD akan menjadi wujud kongkrit dari pelaksanaan arah kebijakan yang telah termaktub dalam RPJPD, sehingga pada akhir periode dokumen perencanaan jangka panjang dapat mewujudkan misi dan visi RPJPD.

RPJMD mempedomani RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang sesuai dengan periodeisasi tahapan RPJMD.

RPJPD perlu disusun dengan penekanan proyeksi dan *forecasting* yang menggambarkan dengan baik dinamika perkembangan Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan sehingga saat diterjemahkan ke dalam RPJMD dapat diturunkan ke dalam satuan rencana yang lebih detail, terarah dan terukur.

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah untuk menciptakan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan melalui rumusan tujuan pembangunan daerah yang berlandaskan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama dan dilaksanakan secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindakan yang sama.

Berdasarkan maksud penyusunan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, meliputi:

- a. Teridentifikasinya capaian pembangunan pada periode lalu sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045;
- b. Ditetapkannya Visi dan Misi Kota Jambi untuk pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045;
- c. Tersedianya arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Jambi;
- d. Tersedianya tolok ukur kinerja pembangunan jangka panjang daerah yang akan dievaluasi secara berkala;
- e. Tersedianya pedoman bagi penyusunan RPJMD Kota Jambi selama 4 (empat) periode mendatang;
- f. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan pembangunan antar daerah, antar ruang, maupun antar fungsi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- g. menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah;
- h. menciptakan efisiensi pemanfaatan sumberdaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan



## 1.5 PRINSIP DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN

Sejalan dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RPJPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

**1) Transparan:**

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

**2) Responsif:**

yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

**3) Efisien:**

yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

**4) Efektif:**

yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

**5) Akuntabel:**

yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

**6) Partisipatif:**

merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

**7) Terukur:**

yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

**8) Berkeadilan:**

merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

**9) Berwawasan Lingkungan:**

yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

**10) Berkelanjutan:**

yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Selain berlandaskan prinsip, penyusunan RPJPD dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

**1) Teknokratik:**

Penyusunan dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen RPJPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses merumuskan tantangan dan peluang pembangunan Kota Jambi pada masa depan; menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam masa dua puluh tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Alur pemikiran strategis (*strategic thinking process*) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

- a) rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini yang jelas
- b) kejelasan status kinerja pembangunan daerah masa kini
- c) rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah
- d) rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria sederhana, terukur, mudah dicapai, realistis, dan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

- e) rumusan arah kebijakan untuk masing-masing misi beserta agenda pembangunannya.
- f) instrumen, metodologi dan pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan.

## **2) Partisipatif:**

Kemampuan untuk memahami peluang dan ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

- a) pelibatan stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan, yakni pada tahapan perumusan dan penetapan visi, misi Pembangunan melalui kegiatan forum diskusi terbatas dan forum seminar seperti telah diuraikan di atas.
- b) kesetaraan antara pemerintah, masyarakat maupun Lembaga non pemerintah dalam pengambilan keputusan
- c) transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, yang ditunjukkan pada proses partisipasi stakeholders di forum-forum diskusi terbatas
- d) keterwakilan yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal serta lembaga penelitian/perguruan tinggi
- e) Pelibatan stakeholders dalam penyusunan RPJPD akan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap RPJPD
- f) konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan alternatif skenario perjalanan pembangunan daerah, perumusan visi, misi, dan arah/kebijakan pembangunan jangka panjang.
- g) dalam forum diskusi terbatas/FGD telah ditetapkan kesepakatan mengenai pernyataan visi Kota Jambi.

### 3) Pendekatan Politis:

Dimaksudkan bahwa penyusunan RPJPD Kota Jambi melibatkan proses konsultasi dengan elemen politis, dalam hal ini dengan DPRD Kota Jambi.

Keterlibatan DPRD dalam penyusunan RPJPD melalui:

- a) Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJPD, dalam proses penyusunan Rancangan Awal ini mulai dilibatkan pada tahapan forum diskusi terbatas/FGD, Seminar Sosialisasi Dan Pemantapan Visi, Misi Dan Arah Pembangunan Dalam Penyusunan RPJPD Kota Jambi dan Musrenbang RPJPD Kota Jambi;
- b) Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJPD Kota Jambi;
- c) *Review* dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJPD Kota Jambi ;
- d) *Review*, saran, dan masukan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap rancangan RPJPD Kota Jambi.
- e) Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Jambi 2025-2045.
- f) Pengesahan RPJPD Kota Jambi sebagai Peraturan Daerah.

### 4) Perencanaan bawah ke atas (*Bottom Up*):

Dimaksudkan bahwa proses penyusunan RPJPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui:

- a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui harapan masyarakat atas masa depan pembangunan daerahnya ;dan
- b) Hasil proses musrenbang RPJPD dan kesepakatan dengan masyarakat tentang arah pembangunan daerah.

### 5) Perencanaan atas ke bawah (*Top Down*):

Proses penyusunan RPJPD perlu bersinergi dengan rencana strategis lainnya, antara lain:

- a) RPJP Nasional;
- b) RPJPD dan RTRW Provinsi Jambi; dan
- c) RTRW Kota Jambi

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika rancangan awal RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab Pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan RPJPD Kota Jambi yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Pada Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi Kota Jambi yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing Daerah.

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis**

Menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan jangka panjang.

### **Bab IV Visi dan Misi Daerah**

Pembahasan Bab ini diuraikan dalam 3 (tiga) sub bahasan yakni; (1) Uraian tentang visi beserta jabaran atas visi, yang memberikan penjelasan atas kata-kata kunci dalam pernyataan visi; (2) Uraian tentang misi pembangunan jangka panjang Kota Jambi. Pada sub bagian diawali dengan uraian mengenai misi beserta penjelasan sasaran atau indikasi-indikasi capaian yang teruang dalam misi dan langkah-langkah pencapaian, yang menunjukkan langkah bagaimana mencapai misi yang dijalankan; (3) Uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan.

### **Bab V Visi dan Misi Daerah**

Bab ini menguraikan tentang sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi serta tahapan dan prioritas pembangunan Kota Jambi 2025-2045.

## **Bab VI Kaidah Pelaksanaan**

Pada bab ini membahas kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2025-2045.

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



OTA JAMBI

### 2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI WILAYAH

#### 2.1.1 Administrasi Wilayah

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Propinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat  $01^{\circ}030'2,98''$  sampai dengan  $01^{\circ}040'1,07''$  Lintang Selatan dan  $103^{\circ}40'1,67''$  sampai dengan  $103^{\circ}40'022''$  Bujur Timur. Secara administrasi wilayah kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Luas keseluruhan wilayah Kota Jambi ± 169,85 Km<sup>2</sup> terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi wilayah Kota Jambi dan batas administrasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi**

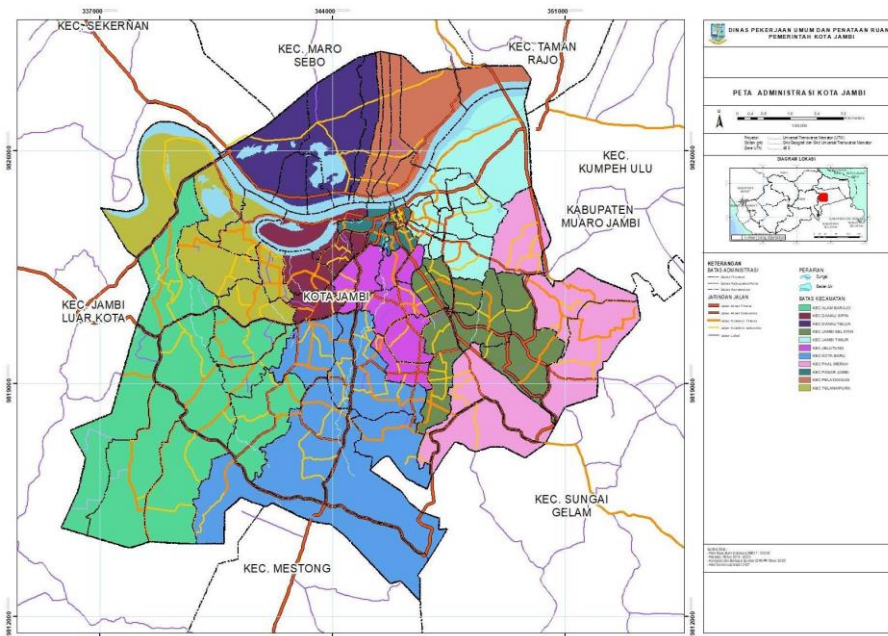
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	%
1.	Kota Baru	7	27,25	16,04
2.	Alam Barajo	7	36,06	21,23
3.	Jambi Selatan	5	7,60	4,47
4.	Paal Merah	6	24,25	14,28
5.	Jelutung	7	7,61	4,48
6.	Pasar Jambi	4	1,67	0,98
7.	Telanaipura	7	20,32	11,96
8.	Danau Sipin	5	7,28	4,29
9.	Danau Teluk	5	13,44	7,91
10.	Pelayangan	6	10,69	6,29
11.	Jambi Timur	9	13,68	8,05
<b>Kota Jambi</b>		<b>68</b>	<b>169,85</b>	<b>100</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka, Tahun 2023, Revisi RTRW Kota Jambi 2023-2043 dan Permendagri No. 88 Tahun 2017 dan PPBW BIG, 2021.



**Gambar 2.1**  
**Grafik Komposisi Luas Kecamatan**





**Gambar 2.2**  
**Peta Administrasi Kota Jambi**

## 2.1.2 Karakteristik Fisik Wilayah

### 2.1.2.1 Iklim dan Curah Hujan

Pada umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ber iklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat Musim Barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan April – bulan Oktober, sementara pada Musim Timur angin bertiup ke arah Timur dan Selatan yang berlangsung pada bulan Oktober – bulan April. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

Selama tahun 2023 rata-rata suhu di Kota Jambi adalah 27,57°C yang berkisar antara 26,50°C sampai 28,50°C. Dengan suhu maksimum 35,30°C yang terjadi pada bulan Oktober dan suhu minimum 21,80°C terjadi pada bulan Januari. Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2023 beragam antara 42,80 mm sampai 320,40 mm, dengan jumlah hari hujan antara 6 hari sampai 26 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 12 knots

hingga 17 knots. Sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 75,00% - 85,70%. Selengkapnya curah hujan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Suhu Udara Dan Kelembaban Udara Di Kota Jambi, Tahun 2023**

No.	Bulan	Suhu Udara			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	21,80	26,50	34,40	52,00	84,90	98,00
2	Februari	22,70	27,10	33,90	48,00	82,80	98,00
3	Maret	21,90	26,70	34,00	56,00	85,20	98,00
4	April	22,00	27,60	34,60	54,00	85,50	99,00
5	Mei	22,60	28,00	34,90	48,00	85,40	99,00
6	Juni	23,00	27,70	34,20	53,00	83,80	99,00
7	Juli	22,20	27,60	34,00	51,00	82,70	98,00
8	Agustus	23,00	27,90	34,00	43,00	79,10	98,00
9	September	22,20	28,30	34,80	41,00	75,00	98,00
10	Oktober	22,60	28,50	35,30	42,00	77,50	98,00
11	November	22,40	27,60	34,80	51,00	84,30	99,00
12	Desember	23,40	27,40	33,80	56,00	85,70	98,00

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

**Tabel 2.3**  
**Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh)**  
**Di Kota Jambi, Tahun 2023**

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (MM)	Jumlah Hari Ujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	191,00	26	2,7
2	Februari	158,10	18	3,7
3	Maret	281,80	25	3,7
4	April	171,10	23	5,3
5	Mei	320,40	20	4,8
6	Juni	198,60	13	4,8
7	Juli	150,00	13	5,1
8	Agustus	63,40	13	6,6
9	September	77,40	6	6,7
10	Oktober	42,80	10	5,7
11	November	26,70	16	3,4
12	Desember	209,90	21	3,0

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

### 2.1.2.2 Kelerengan

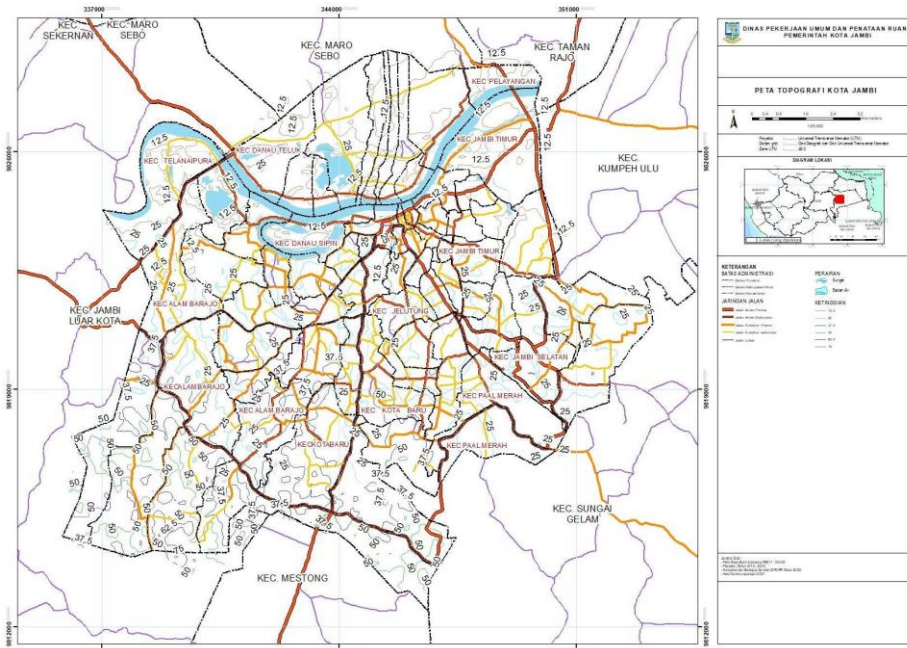
Berdasarkan hasil Interpretasi Peta Citra (2021) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042 diketahui sebagian besar wilayah Kota Jambi mempunyai kelerengan antara 0 – 2% yaitu seluas 9.213,13 hektar dari luas keseluruhan Kota Jambi. Wilayah dengan kelerengan 2 – 8% seluas 4.312,54 hektar, dan kemiringan 8 – 15% seluas 2.538,07 hektar. Jika dilihat penyebarannya pada masing-masing kecamatan, kemiringan lereng 0 – 2%

tersebar di seluruh kecamatan, luas terbesar terdapat di Kecamatan Paal Merah yaitu masing-masing seluas 1.914,18 hektar. Kelerengan 2 – 8% terbesar di Kecamatan Kota Baru seluas 1.671,58 hektar, dan kelerengan 8 – 15% terbesar di Kecamatan Alam Barajo seluas 1.501,39. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Kelerengan Lahan di Kota Jambi**

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (Ha)			Danau/ Sungai (Ha)	Jumlah (Ha)
		0 - 2 %	2 - 8 %	8 - 15 %		
1	Telanai Pura	1.518,60	203,34	32,38	282,53	2.036,84
2	Jambi Selatan	557,06	165,36	37,10	-	759,53
3	Jambi Timur	1.259,19			127,85	1.387,04
4	Pasar Jambi	124,10	19,81		21,31	165,23
5	Pelayangan	879,49			90,24	969,73
6	Danau Teluk	1.189,43			248,15	1.437,58
7	Kota Baru	255,25	1.671,58	753,88	0,64	2.681,36
8	Jelutung	275,89	434,86	49,69	2,98	763,42
9	Alam Barajo	779,41	1.340,19	1.501,39	-	3.620,99
10	Danau Sipin	460,53	1,61	111,85	140,90	714,88
11	Paal Merah	1.914,18	475,78	51,78	7,02	2.448,75
<b>Jumlah</b>		<b>9.213,13</b>	<b>4.312,54</b>	<b>2.538,07</b>	<b>921,61</b>	<b>16.985,35</b>

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042



**Gambar 2.3**  
**Peta Topografi Kota Jambi**

### 2.1.2.3 Geologi dan Struktur Batuan

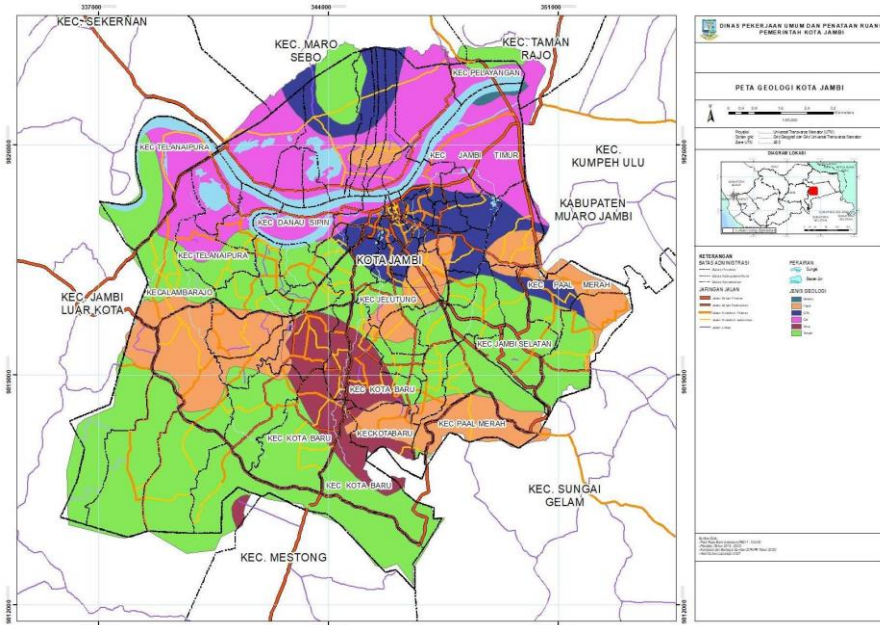
Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru.

Dilihat luas terbesar berada di jenis Tmpn sebesar 7.664,22 ha, dan yang terkecil berada di jenis Danau sekitar 57,99 ha (0,34%) dari luas total wilayah Kota Jambi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Formasi Geologi Kota Jambi**

No.	Formasi Geologi	Luas (Ha)	%
1	Danau	57,99	0,34%
2	Pasir	2.784,08	16,39%
3	Qa	3.813,09	22,45%
4	QTK	1.561,44	9,19%
5	Tma	1.104,50	6,50%
6	Tmpn	7.664,22	45,12%
<b>Jumlah</b>		<b>16.985,32</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042



**Gambar 2.4**  
**Peta Geologi Kota Jambi**

#### 2.1.2.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Jambi menurut Klasifikasi Tanah Nasional terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu Entisol, Gleisol, Oksisol, Histosol dan Ultisol. Luas terbesar dengan jenis tanah Kompleks Latosol dan Litosol sekitar 10.453,32 Ha dan jenis tanah Podsolik sekitar 6.531,96 ha, yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Jambi. Untuk lebih jelasnya jenis tanah dan tekstur tanah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Jenis Tanah Di Kota Jambi**

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)		
		Kompleks Latosol dan Litosol	Podsolik	Jumlah
1	Telanaipura	2.024,93	7,55	2.032,48
2	Jambi Selatan	737,19	22,85	760,04
3	Jambi Timur	1.367,59	-	1.367,59
4	Pasar Jambi	166,99	-	166,99
5	Pelayangan	1.068,95	-	1.068,95
6	Danau Teluk	1.344,14	-	1.344,14
7	Kota Baru	735,12	1.990,35	2.725,47
8	Jelutung	761,42	-	761,42
9	Alam Barajo	816,61	2.789,07	3.605,68
10	Danau Sipin	727,61	-	727,61
11	Paal Merah	702,77	1.722,14	2.424,91
<b>Jumlah</b>		<b>10.453,32</b>	<b>6.531,96</b>	<b>16.985,28</b>

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042

#### 2.1.2.5 Kedalaman Efektif Tanah

Sebagian besar wilayah Kota Jambi mempunyai kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm yaitu seluas 19.260 hektar atau sekitar 93,78% dari luas wilayah keseluruhan Kota Jambi. Sedangkan kedalaman efektif tanah lainnya berkisar antara 60 – 90 cm seluas 188 hektar atau sekitar 0,91% dari luas wilayah keseluruhan. Kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm sebagian besar terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Kota Baru seluas 7.708 hektar dan Kecamatan Jambi Selatan seluas 3.378 hektar. Untuk lebih jelasnya kedalaman efektif tanah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Kedalaman Efektif Tanah Di Kota Jambi**

No.	Kecamatan	Kedalaman Efektif Tanah				Danau / Sungai	Jumlah (Ha)
		<30 cm	30-60 cm	60-90 cm	>90 cm		
1	Kota Baru	-	-	-	7,708	70	7,778
2	Alam Barajo	*)	*)	*)	*)	*)	*)
3	Jambi Selatan	-	-	-	3,378	29	3,407
4	Paal Merah	*)	*)	*)	*)	*)	*)
5	Jelutung	-	-	-	771	21	792
6	Pasar Jambi	-	-	-	356	46	402
7	Telanaipura	-	-	-	2,731	308	3,039
8	Danau Sipin	*)	*)	*)	*)	*)	*)
9	Danau Teluk	-	-	-	1,377	193	1,570
10	Pelayangan	-	-	188	1,295	234	1,717
11	Jambi Timur	-	-	-	1,643	190	1,833
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>19,259</b>	<b>1,091</b>	<b>20,538</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>93,77</b>	<b>5,31</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Matak Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042

\*) Data masih tergabung dengan kecamatan induk

#### 2.1.2.6 Hidrologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu bagian selatan dan bagian utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah kota Jambi dimana di wilayah bagian selatan ini sedikitnya terdapat 8 (delapan) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

**1. Sungai Kenali Kecil**

Sungai ini melewati Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali.

**2. Sungai Kenali Besar**

Sungai ini melewati Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Beliung, Rawasari, dan Kenali Besar.

**3. Sungai Kambang**

Daerah pengaliran Sungai Kambang meliputi Simpang III Sipin, Simpang IV Sipin, Pematang Sulur, dan Telanai.

**4. Sungai Danau Teluk**

Sungai ini melewati Sungai Putri, Solok Sipin dan Legok.

**5. Sungai Putri**

Sungai ini melewati Selamat dan Sungai Putri.

**6. Sungai Asam**

Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam.

**7. Sungai Tembuku**

Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang.

**8. Sungai Sijenjang**

Daerah pengaliran Sungai Sijenjang meliputi Pura, Talang Banjar, Payo Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya.

Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologi juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota

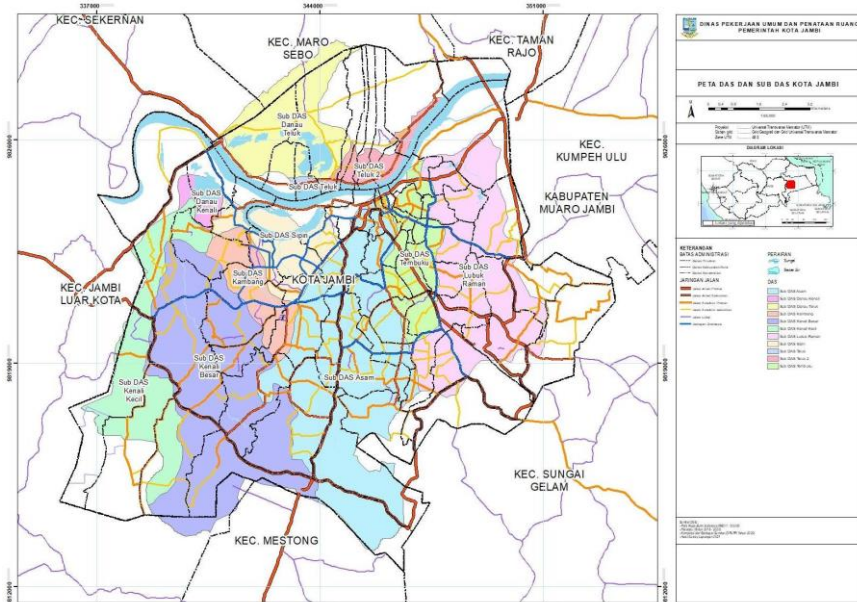
Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

**Tabel 2.8**  
**Daerah Aliran Sungai yang Melintasi Wilayah Kota Jambi**

No	Daerah Aliran Sungai	Panjang (Km)	Bagian Hulu	Bagian Hilir	Kelurahan Yang Dilintasi	Bwk Yang Dilintasi
1	Sungai Kenali Kecil	10,68	Perumahan Citraraya	Jembatan Buluran Pematang Sulur	Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali	BWK VI
2	Sungai Kenali Besar	13,79	Balai Benih Ikan	Danau Teluk Kenali	Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Bellung, Rawasari, dan Kenali Besar	BWK V
3	Sungai Kambang	4,3	SMA 4	Danau Sipin	Simpang III Sipin, Simpang IV Sipin, Pematang Sulur, dan Telanai	BWK V dan BWK VI
4	Sungai Danau Teluk	8,79	SMA 1	Danau Sipin	Sungai Putri, Solok Sipin dan Legok	BWK I dan VI
5	Sungai Putri	2,97	Lorong Diamon	Danau Sipin	Selamat dan Sungai Putri	BWK VI
6	Sungai Asam	10,68	Pertamina Kenali Asam	Pintu Air Angso Duo Sungai Batanghari	Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam	BWK IV, BWK V, dan BWK I
7	Sungai Tembuku	5,35	Thehok	Jl. Raden Pamuk	Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang	BWK I dan IV
8	Sungai Sijenjang/Lubukraman	8,37	Perumahan Parma	S. Lubuk Raman	Pasir Putih, Wijaya Pura, Talang Banjar, Payo Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya	BWK III

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042





**Gambar 2.5**  
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi

### 2.1.3 Pola Perkembangan Kota dan Penggunaan Lahan

#### 2.1.3.1 Pola Perkembangan Kota

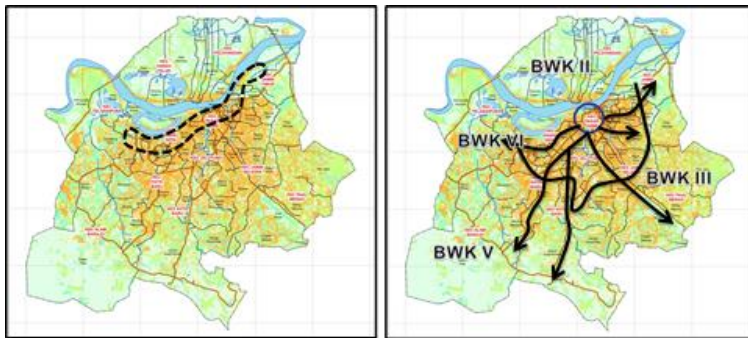
##### A. Pola Perkembangan Internal

Kota adalah Leburan dari bangunan dan penduduk. Sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu (Spiro Kostof:1991).

Kota Jambi tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan demografis, ekonomi dan fisik-spasial. Secara fisik, penjalaran Kota Jambi diawali dengan bentuk linear, dimana pada awalnya perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh Sungai Batanghari. Perkembangan fisik yang linear terhadap Sungai Batanghari terutama pada Kawasan Kota Seberang (BWP II) dan kawasan sempadan sungai pada bagian selatan (sebagian BWP III dan sebagian BWP VI). Perkembangan dengan pola linear terhadap Sungai Batanghari ini cenderung telah jenuh karena keterbatasan daya tampung pada

kawasan tersebut. Pola perkembangan kota cenderung memusat kepada pusat utama dan selanjutnya linear terhadap jalur transportasi utama dan semakin menjalar keluar, sehingga cenderung berpola konsentris terhadap pusat utama.

Pola penjalaran yang berorientasi linear terhadap jalur transportasi utama, pada saat ini juga cenderung semakin jenuh, karena semakin menurunnya daya tampung pada kawasan koridor jalur utama tersebut, sehingga penjalaran fisik kota menjadi linear terhadap jalur transportasi yang hirarkinya berada di bawah jalur utama dan telah menyatukan antara kawasan terbangun yang satu dengan kawasan terbangun yang lainnya, sehingga terlihat bahwa perkembangan Kota Jambi cenderung berpola radial menerus.



**Gambar 2.6**  
**Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi**

## **B. Pola Perkembangan Wilayah Eksternal**

Secara umum, kawasan non terbangun di Kota Jambi yang ada belakangan ini adalah kawasan *hinterland* kota atau kawasan bagian luar. Pada saat ini, dinamika penggunaan lahan pada kawasan ini mengalami perubahan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan perkembangan permukiman kota. Selain karena faktor internal tersebut, perkembangan wilayah terluar juga dipicu oleh terjadinya perkembangan pada wilayah eksternal. Wilayah eksternal Kota Jambi memiliki kecenderungan harga lahan yang lebih murah. Selain daripada itu, adanya rencana investasi pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut akan semakin menarik perkembangan kota ke arah luar dan memicu percepatan perubahan guna lahan pada wilayah kota bagian luar.

Secara administrasi, wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pesatnya perkembangan Kota Jambi dan atas beberapa faktor pertumbuhan lainnya telah memicu perkembangan fisik wilayah yang berbatasan yang berada di dalam administrasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga semakin mengaburkan batas administrasi wilayah dan membentuk satu kesatuan kawasan permukiman secara fungsi dan memberi pengaruh terhadap kawasan terluar dari administrasi Kota Jambi dan beberapa sistem prasarana dan sarana kota.

#### 1) Perkembangan Kawasan Bagian Barat Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kawasan yang merupakan arah utama pengembangan kota inti. Secara administrasi berada pada wilayah administrasi Kecamatan Jambi Luar Kota yang secara fungsi, perkembangannya dipengaruhi oleh pusat skala regional berupa pusat pendidikan tinggi Provinsi Jambi sebagai pemicu perkembangan dan didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri primer lintas Kota Jambi-Muara Bungo. Perkembangan kawasan semakin terlihat dengan tumbuhnya pusat permukiman skala besar yang berciri kota mandiri. Sehingga tipologi kawasan lebih dekat dengan ciri *predominantly urban*. Perkembangan kegiatan komersil dan permukiman sudah semakin mirip dengan kota inti, sehingga secara fungsi tidak ada pembeda antara kawasan ini dengan kota inti.



Gambar 2.7  
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat, 2023

## 2) Perkembangan Kawasan Bagian Selatan Kota

Kawasan peri urban pada bagian ini merupakan kawasan yang berkembang dengan orientasi keberadaan jalan arteri primer ruas Jambi-Palembang. Perkembangan kawasan cenderung linear dengan gejala perubahan guna pada koridor jalan utama menjadi lahan komersil. Namun secara umum, pada kawasan belakangnya masih menunjukkan ciri kedesaan.



Gambar 2.8  
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan, 2023

Zona ini diprediksi akan mengalami akselerasi perkembangan yang cukup pada masa yang akan datang sebagai dampak realisasi sistem prasarana nasional (simpul TOL Sumatera) dan rencana konektivitas pusat-pusat pertumbuhan Provinsi Jambi melalui Jambi *Outer Ring Road* II yang menghubungkan simpul TOL dengan kawasan industri di Kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan jaringan prasarana ini nantinya dapat memberi pengaruh terhadap pola ruang Kota Jambi, yang menyebabkan kegiatan permukiman akan semakin cepat tertarik ke arah luar, serta kemungkinan tereduksinya kegiatan industri dan pergudangan pada jalan lingkar selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:



**Gambar 2.8**  
**Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Eksternal Kota Bagian Selatan**

### 3) Perkembangan Kawasan Bagian Timur Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa kota inti. Secara administrasi, kawasan yang telah berkembang ke arah perkotaan meliputi: Desa Mekar Jaya, Desa Kebun IX, Desa Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Kasang Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu. Sebagian kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi dapat dikatakan berkarakter *predominantly urban* dan pada bagian terluar menunjukkan karakter semi urban.

Perkembangan kegiatan-kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa pada kawasan ini menunjukkan karakter yang sudah hampir mirip dengan perkembangan pada kota inti. Perdagangan dan jasa berkembang melalui bangunan deret pada koridor jalan utama dan perumahan berkembang dengan luas kavling (kepadatan) yang tidak terlalu berbeda dengan yang berkembang pada kota inti. Aksesibilitas terhadap kota inti sudah sangat baik yang dihubungkan oleh ruas jalan primer dan sistem transportasi umum kota yang melintasi kawasan tersebut.



Gambar 2.9

Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur, 2023

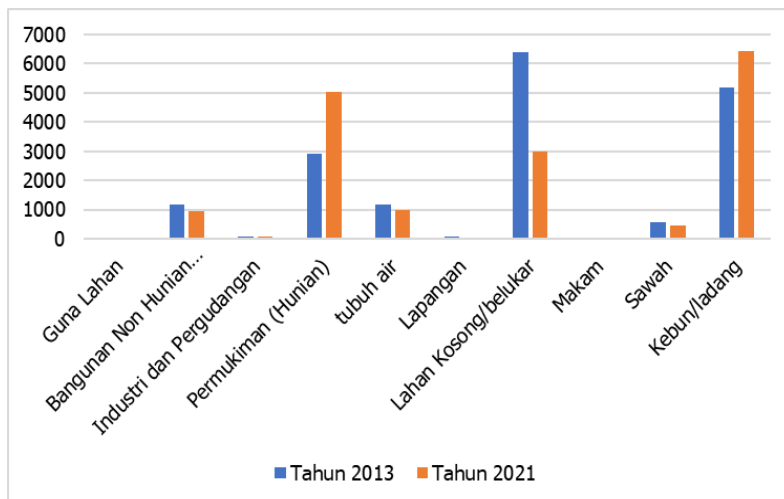
### 2.1.3.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi

Dinamika perubahan guna lahan akan lebih akurat dilihat dengan menginterpretasikan citra satelit pada periode tertentu yang menjadi tahun pengamatan. Akan tetapi, ketersediaan data spasial secara *time series* tersebut cenderung sulit didapatkan, apalagi untuk ukuran per tahun. Oleh karena itu, data perubahan guna lahan disumberkan kepada ketersediaan data yang ada, seperti data dari Badan Pusat Statistik berikut ini:

**Tabel 2.9**  
**Luas Perubahan Penggunaan Lahan**

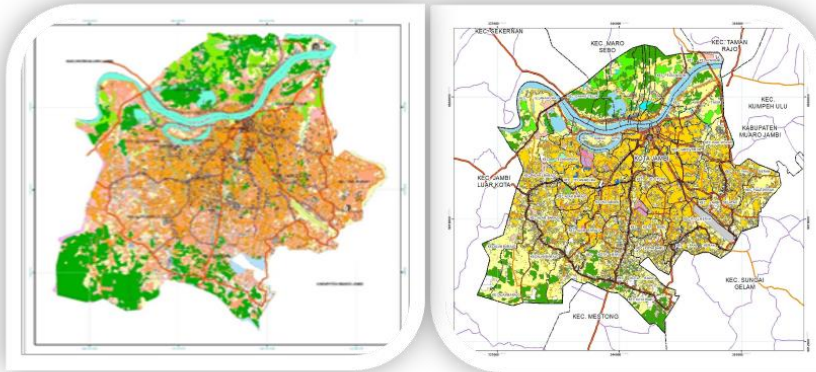
No	Guna Lahan	Tahun 2013	Tahun 2021
1	Bangunan Non Hunian (perdagangan, perkantoran, fasilitas)	1.168,57	968,57
2	Industri dan Pergudangan	101,31	67,79
3	Permukiman (Hunian)	2.927,91	5.040,01
4	tubuh air	1.195,88	998,13
5	Lapangan	92,55	15,71
6	Lahan Kosong/belukar	6.407,49	2.985,15
7	Makam	33,91	40,57
8	Sawah	590,93	446,87
9	Kebun/ladang	5.165,37	6.419,75
<b>Jumlah</b>		<b>17.683,92</b>	<b>16.982,56</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042



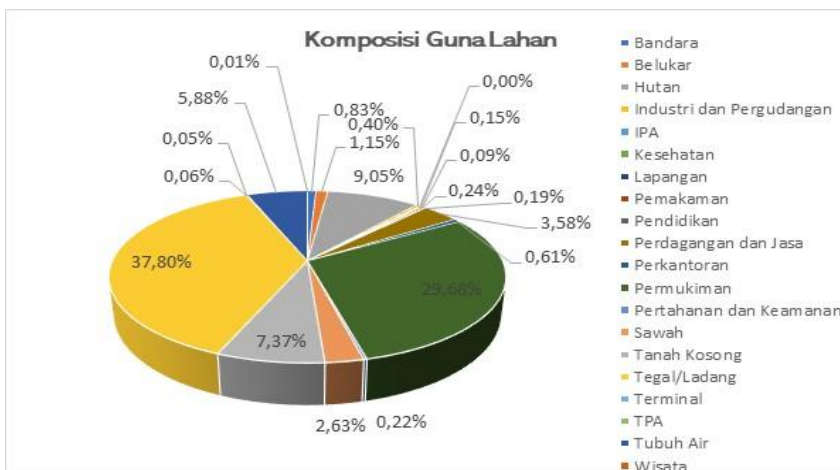
**Gambar 2.10**  
**Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan**

Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi perubahan signifikan pada penggunaan permukiman. Luasan permukiman meningkat jauh, dan berbanding terbalik dengan luas tanah kosong yang mengalami penurunan signifikan.



Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2023-2043

**Gambar 2.11**  
**Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi**



**Gambar 2.12**  
**Komposisi Guna Lahan Kota Jambi**

### 2.1.3.3 Intensitas Pemanfaatan Lahan

#### A. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP I

Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I merupakan *Central Business District* (CBD) Kota Jambi yang sekaligus merupakan Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan ekonomi. Kondisi ini terbentuk secara eksisting dan



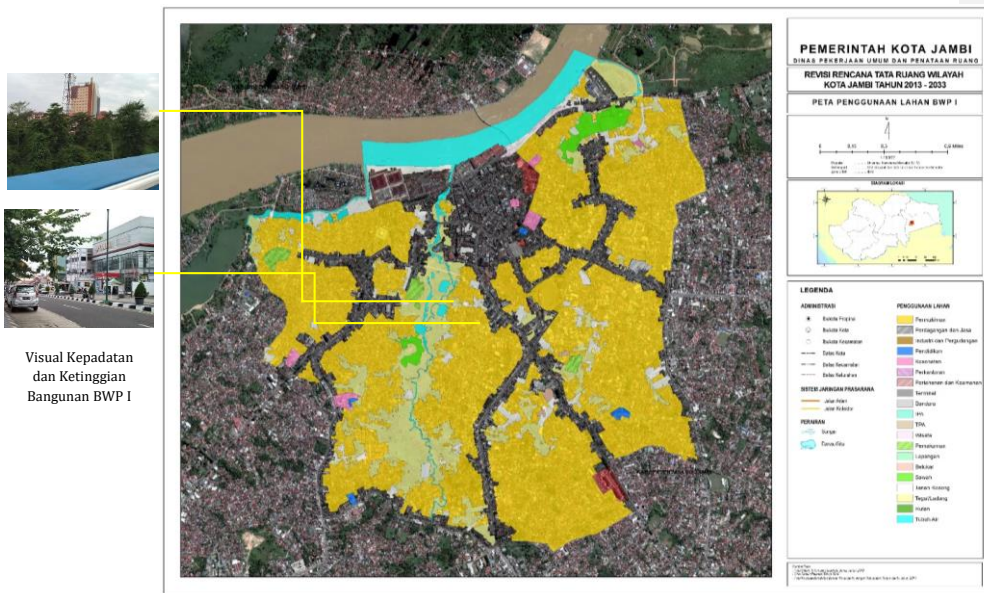
ditegaskan melalui penekanan peran dan fungsi kawasan. Dari karakter dan fungsi ini tergambar bahwa dominasi kegiatan yang berlangsung adalah kegiatan perdagangan dan jasa skala kota bahkan skala regional.

**1) Kepadatan Bangunan**

Pola perkembangan yang terjadi pada BWP ini mewakili pola perkembangan wilayah Kota Jambi secara keseluruhan yang cenderung radial konsentris. Kepadatan bangunan yang ada di BWP ini cenderung tinggi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) > 80% terutama untuk bangunan deret yang berada di koridor jalan utama kawasan. Kondisi kepadatan yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada bangunan permukiman yang memang cenderung kurang tertata dan sebagian berada pada zona yang tidak sesuai dengan daya dukung karena merupakan zona yang rentan terhadap luapan yang berasal dari Sungai Batanghari dan SubDASnya.

**2) Ketinggian Bangunan**

Ketinggian bangunan pada BWP I walaupun memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi umum, namun cenderung memiliki ketinggian yang berbeda. Bagian kawasan dengan ketinggian bangunan kurang dari 8 (delapan) meter adalah bagian kawasan dengan fungsi kegiatan permukiman, sementara ketinggian bangunan 8-12 meter terutama berada pada koridor jalan utama untuk fungsi komersil. Ketinggian bangunan pada kelompok ini terutama adalah bangunan jenis rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter terutama adalah bangunan komersil seperti hotel.



Visual Kepadatan dan Ketinggian Bangunan BWP I

**Gambar 2.13**  
**Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP I**

**B. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP II**

Kawasan BWP II diarahkan sebagai kawasan cagar budaya Kota Jambi. Fungsi utama yang mendominasi adalah fungsi untuk kegiatan permukiman. Fungsi pendukung lainnya yang berlangsung di BWP II meliputi fungsi perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, dan sosial budaya.

BWP II merupakan bagian wilayah Kota Jambi yang memiliki batasan fisik untuk perkembangan kegiatan terbangun, karena bagian wilayah ini cenderung rentan banjir. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh bagian kawasan berfungsi sebagai pendukung kegiatan terbangun. Pola perkembangan kawasan BWP II cenderung linear mengikuti pola jaringan jalan utama, dimana pola jaringan jalan utama ini linear terhadap aliran Batanghari.

### 1) **Kepadatan bangunan di BWP II**

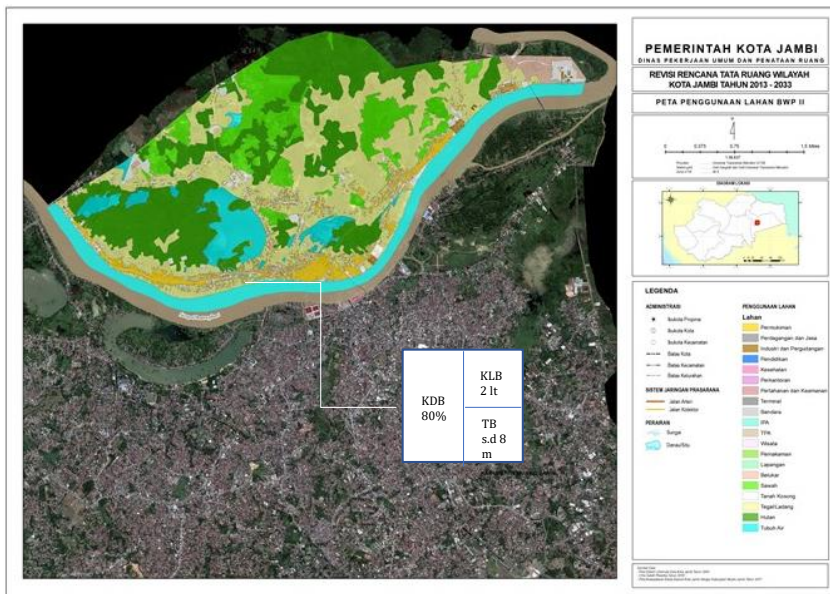
Pemanfaatan lahan pada Kawasan BWP II didominasi oleh kegiatan permukiman. Kegiatan permukiman yang berorientasi awal terhadap Batanghari telah menciptakan pola perkembangan yang linear. Pola perkembangan ini selaras dengan pola jaringan jalan utama yang juga linear menghubungkan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer di Kota Jambi. Dominasi fungsi sebagai kawasan permukiman, jika dikaitkan dengan kepadatan penduduk secara bruto dapat terlihat bahwa pada dasarnya kepadatan penduduk di BWP II cenderung rendah, namun karena karakter orientasi bermukim tersebut, menjadikan kondisi kepadatan bangunan pada kawasan terbangun di BWP II tergolong kepada kepadatan tinggi, dengan KDB bahkan >80%.

### 2) **Ketinggian Bangunan BWP II**

Ketinggian bangunan dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 8 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan 1-2 lantai.
2. Bangunan dengan ketinggian 8 hingga 12 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan 2-3 lantai.
3. Bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan lebih dari 3 lantai.

Berdasarkan pengamatan, kondisi ketinggian bangunan di BWP II secara umum merupakan bangunan dengan ketinggian kurang dari 8 meter atau tidak lebih dari 2 lantai.



**Gambar 2.14**  
**Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP II**

### C. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP III

Kawasan BWP III diarahkan untuk fungsi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, kegiatan industri, serta bandar udara. Sistem jaringan jalan utama yang mempengaruhi bagian wilayah ini adalah Jalan arteri primer yang berorientasi ke CBD Kota Jambi dan Jalan lingkar. Perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan ini menunjukkan pola semakin melebar keluar dan pada beberapa bagian kawasan justru penunjukan kegiatan permukiman yang telah menyatu dengan kegiatan permukiman kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Muaro Jambi). Kegiatan perdagangan dan jasa terdistribusi pada koridor jalan utama. Kegiatan industri yang berkembang pada bagian wilayah ini telah menyatu dengan kegiatan permukiman, sehingga mulai menimbulkan konflik antar fungsi ruang, sementara kegiatan kebandarudaraan berada pada bagian terluar kawasan.

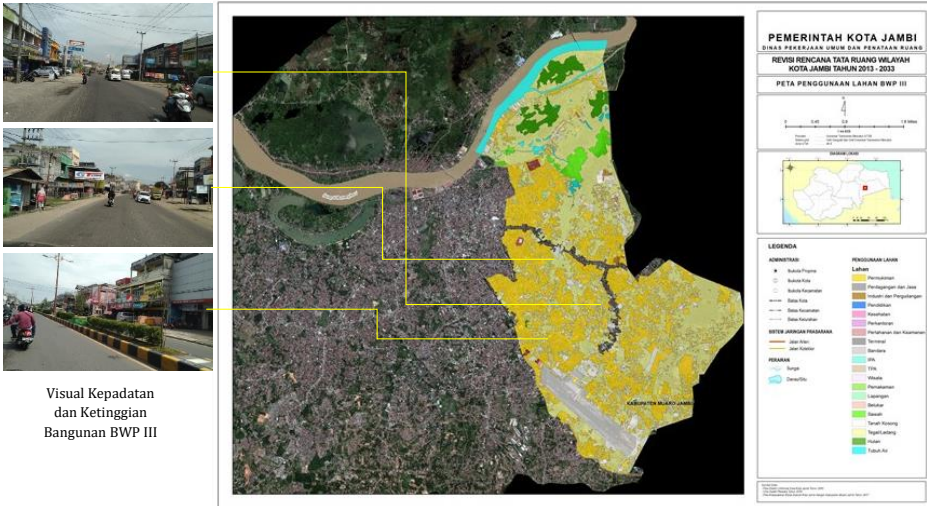
**1) Kepadatan bangunan di BWP III**

Kepadatan bangunan di BWP III tergolong kepada kepadatan sedang hingga tinggi. Bagian kawasan dengan KDB >60% terdistribusi pada kawasan permukiman yang berbatasan dengan BWP I. Kawasan permukiman pada bagian kawasan ini termasuk ke dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh. Kondisi ini disebabkan oleh karena kegiatan permukiman yang berorientasi kepada kegiatan komersil yang berada di BWP I (CBD Kota). Sementara KDB antara 40% hingga 60% terdistribusi pada kawasan-kawasan seperti koridor jalan utama dan kawasan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh, termasuk kawasan pengembangan permukiman yang berada dibagian terluar kawasan ini.

**2) Ketinggian Bangunan di BWP III**

Ketinggian bangunan pada BWP III beragam, mulai dari ketinggian bangunan rendah, sedang, hingga tinggi. Bagian kawasan dengan ketinggian bangunan kurang dari 8 (delapan) meter adalah bagian kawasan dengan fungsi kegiatan permukiman, sementara ketinggian bangunan 8-12 meter terutama berada pada koridor jalan utama untuk fungsi komersil. Ketinggian bangunan pada kelompok ini terutama adalah bangunan jenis rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter terutama adalah bangunan komersil seperti hotel.

Kondisi ketinggian bangunan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dalam penataan bangunan pada bagian wilayah ini, mengingat pada BWP ini terdapat kegiatan kebandarudaraan yang menuntut pembatasan ketinggian bangunan pada KKOP.



Visual Kepadatan dan Ketinggian Bangunan BWP III

**Gambar 2.115**  
**Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP III**

#### D. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP IV

BWP IV merupakan bagian wilayah dengan fungsi dominan sebagai kawasan permukiman. BWP IV merupakan salah satu pusat kota untuk pelayanan administrasi perkantoran pemerintah Kota Jambi, sehingga pada bagian pusat ini didominasi oleh bangunan perkantoran pemerintah. Pada bagian terluar yang dipengaruhi oleh *outer ring road* kegiatan lebih didominasi oleh kegiatan perdagangan, industri, dan pergudangan.

##### 1) Kepadatan Bangunan

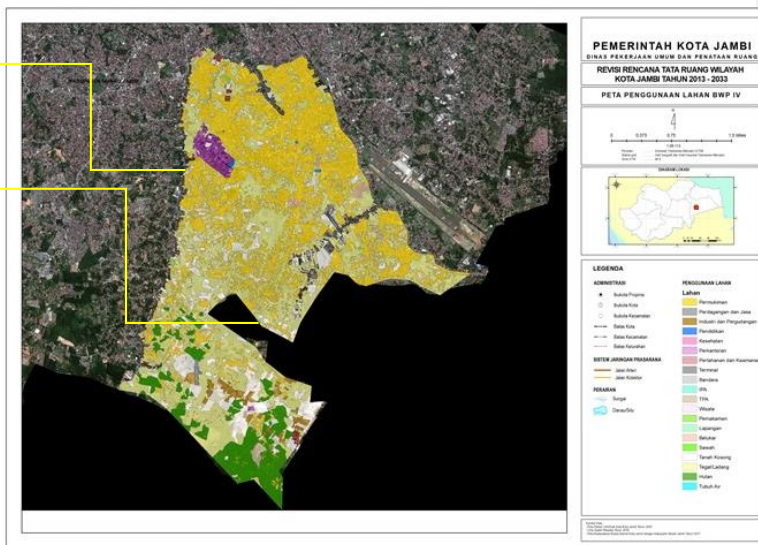
Pemanfaatan ruang pada BWP ini cenderung lebih tertata dibandingkan dengan bagian wilayah yang berada di pusat kota, karena memiliki kavling bangunan yang cenderung lebih luas dibandingkan kawasan pusat kota. Kawasan ini didominasi oleh kepadatan bangunan dengan KDB 40-65%. Sementara Kepadatan bangunan dengan KDB <40% terdistribusi pada bagian kawasan terluar untuk fungsi industri dan pergudangan. Bangunan dengan KDB rendah ini terutama terjadi pada bangunan fungsi hunian berupa rumah tunggal (nonperumahan).

## 2) Ketinggian Bangunan

ketinggian bangunan di BWP IV didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini terutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel. Pada dasarnya belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP IV ini.



Visual Kepadatan dan Ketinggian Bangunan BWP IV



Gambar 2.16 Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP IV

## E. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP V

Kawasan BWP V merupakan kawasan pengembangan permukiman di Kota Jambi. Kondisi ini ditandai dengan kegiatan pengembangan lingkungan perumahan yang semakin menjalar keluar ke arah pinggiran kota.

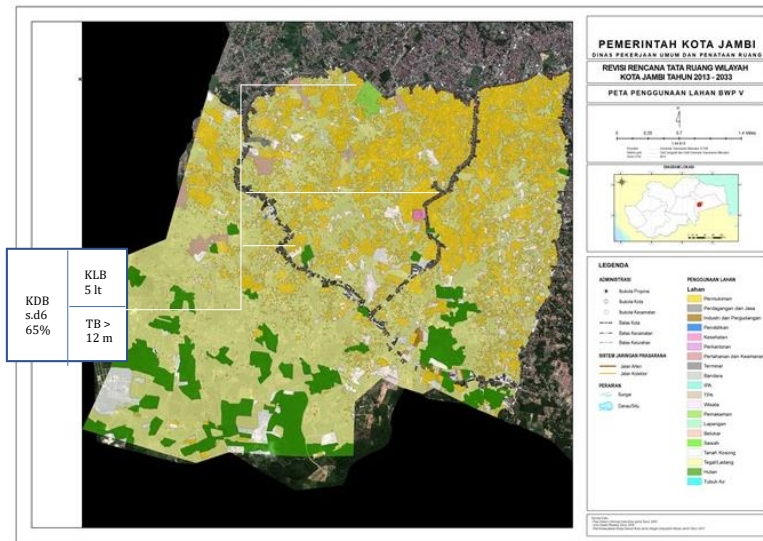
**1) Kepadatan Bangunan di BWP V**

Pemanfaatan ruang pada BWP V cenderung lebih tertata dibandingkan dengan BWP II dan BWP III. Kawasan ini didominasi oleh kepadatan bangunan dengan KDB 40-60%. Sementara Kepadatan bangunan dengan KDB <40% terdistribusi pada bagian kawasan terluar. Bangunan dengan KDB rendah ini terutama terjadi pada bangunan fungsi hunian berupa rumah tunggal (nonperumahan).

**2) Ketinggian Bangunan di BWP V**

ketinggian bangunan di BWP V didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini terutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel. Pada dasarnya belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP V ini.





**Gambar 2.17**  
**Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP V**

**F. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP VI**

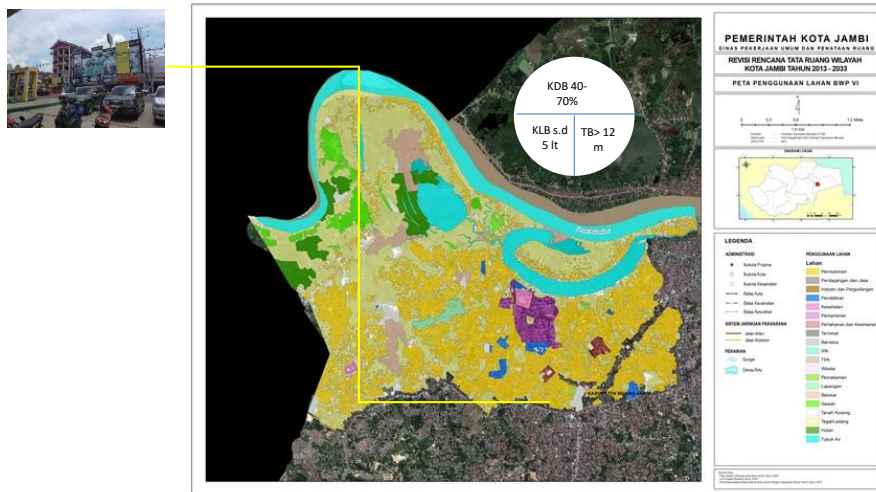
Kawasan BWP VI yang berfungsi sebagai kegiatan permukiman, pusat administrasi Pemerintahan Provinsi Jambi dan pusat pendidikan tinggi. Selain dipengaruhi oleh fungsi pusat-pusat kegiatan tersebut, intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan ini juga dipengaruhi oleh kondisi fisik alamiah, seperti sungai dan danau.

**1) Kepadatan Bangunan di BWP VI**

Walaupun berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan berskala regional, masih terdapat bagian-bagian kawasan dengan kepadatan rendah. Bangunan dengan KDB <40% terdistribusi terutama pada kawasan sekitar Danau, sementara bangunan dengan KDB 40-60% terdistribusi menyebar mendominasi kawasan terutama untuk bangunan dengan fungsi permukiman, perkantoran, dan perdagangan dan jasa.

## 2) Ketinggian Bangunan di BWP VI

Sama dengan kondisi ketinggian bangunan pada BWP V, ketinggian bangunan di BWP VI didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini terutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel dan juga bangunan untuk fungsi perkantoran pemerintah. Pada dasarnya juga belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP VI ini.



**Gambar 2.18**  
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP VI

### 2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

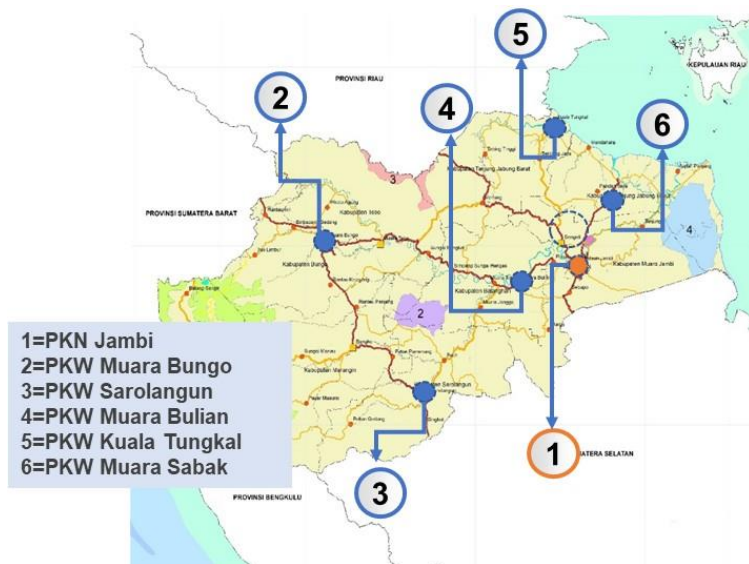
#### 2.1.4.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi Dalam Konstelasi Regional

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi ditetapkan pada Tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033. Rumusan rencana yang ditetapkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

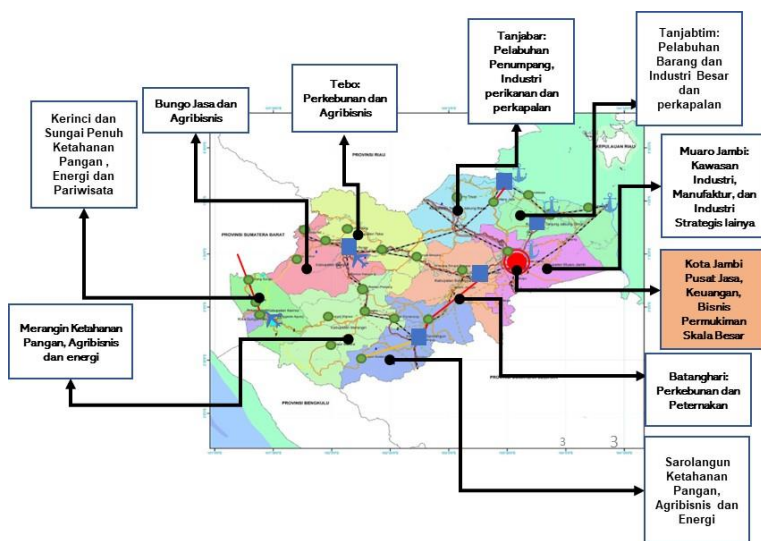
Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.

Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Begitu juga dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043. Dalam muatan RTRWN maupun RTRW Provinsi Jambi, Peran Kota Jambi tidak mengalami perubahan, dimana Kota Jambi masih tetap sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Pulau Sumatera dengan arahan Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional. Sementara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi diarahkan sebagai Pusat Jasa, bisnis, keuangan, dan permukiman skala besar.

Berdasarkan aspek kebijakan terhadap arahan peran dan fungsi Kota Jambi dalam konstelasi regional ini, dapat digambarkan bahwa Kota Jambi memiliki potensi pengembangan sektor-sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor-sektor tersebut perlu dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan jangka panjang guna memastikan adanya keterhubungan dengan peran dan fungsi Kota Jambi dalam kaitannya dengan aspek kebijakan dan perencanaan berjenjang.



**Gambar 2.19**  
**Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi**

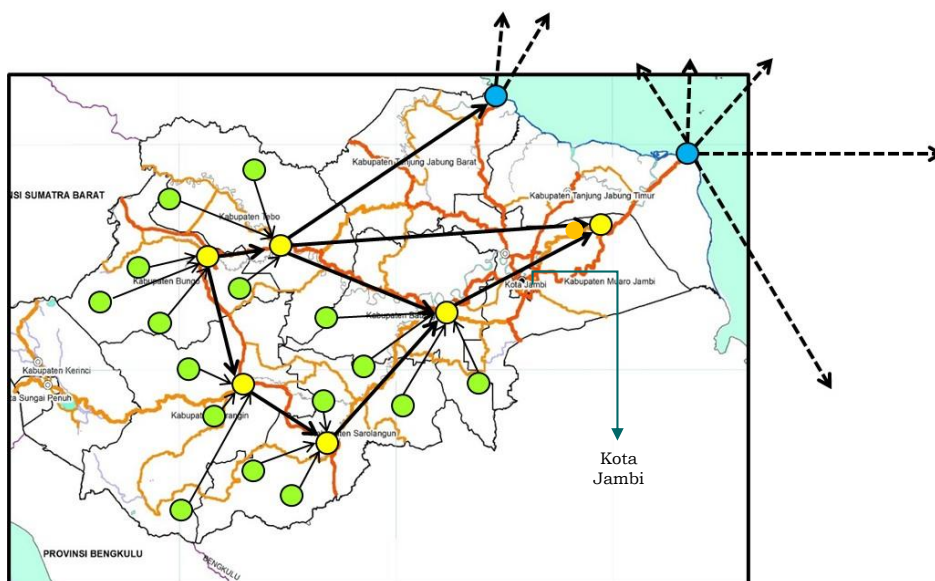


**Gambar 2.20**  
**Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

#### 2.1.4.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional

Sistem jaringan prasarana regional memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Sebagai pusat utama di Provinsi Jambi, sistem jaringan prasarana utama yang dimiliki dan mempengaruhi perkembangan wilayah diantaranya adalah:

- a) Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:
  1. Lintas Timur Sumatera;
  2. *Feeder* Kota Jambi-Muara Bungo;
  3. Jalan akses menuju Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Muara Sabak
- b) Rencana Jalan Tol Sumatera, yang berada di *hinterland* kota;
- c) Terminal Tipe A.
- d) Bandar Udara Pengumpul Sekunder;
- e) Rencana jaringan rel kereta api;



**Gambar 2.21**  
Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama dan Pola Aliran Barang di Provinsi Jambi

### 2.1.5 Kawasan Rawan Bencana

#### A. Kejadian Bencana di Kota Jambi

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), terjadi sebanyak 41 kejadian bencana yang tercatat dari tahun 2010 sampai tahun 2022 di Kota Jambi. Kejadian bencana tersebut diantaranya adalah bencana banjir, bencana angin puting beliung dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang pernah ada tersebut disajikan melalui tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Kejadian Bencana di Kota Jambi**

No	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban				Kerusakan			
			Meninggal	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Peribadatan	Perkantoran
1	Banjir	20	6	2	9.275	14.051	441	22	3	1
2	Puting beliung	8	1	2	-	-	197	-	-	-
3	Kebakaran	13	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		41	8	4	9.275	14.051	638	22	3	1

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), data kejadian tahun 2010 – 2022

Commented [L1]: Update Data

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Jambi adalah bencana banjir yang terjadi dari tahun 2010 sampai tahun 2022 sebanyak 20 kejadian, korban meninggal sebanyak 6 orang, terluka sebanyak 2 orang, menderita akibat kejadian bencana banjir sebanyak 9.275 orang, mengungsi sebanyak 14.051 orang. Sementara kerusakan rumah yang terdata sebanyak 441 unit, fasilitas pendidikan yang tergenang banjir sebanyak 22 unit, fasilitas peribadatan yang terkena dampak banjir sebanyak 3 unit dan 1 unit perkantoran yang terkena dampak banjir.

Bencana angin puting beliung terjadi sebanyak 8 kejadian yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 1 orang, korban terluka sebanyak 2 orang. Sementara kerusakan yang terjadi mengakibatkan sebanyak 197 unit rumah mengalami kerusakan. Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 13 kejadian yang memakan korban meninggal 1 orang.

**Tabel 2.11**  
**Rekap Data Penerima Bantuan Bencana Kota Jambi**

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
<b>Tahun 2021</b>			
Jambi Timur	Budiman	Kebakaran	1
	Tanjung Pinang	Kebakaran	1
Jelutung	Lebak Bandung	Kebakaran	1
	Jelutung	Rumah Roboh	5
Alam Barajo	Kenali Besar	Kestrum Listrik	1
	Mayang Mangurai	Kebakaran	3
	Rawa Sari	Rumah Roboh	2
	Bagan Pete	Kebakaran	2
Danau Teluk	Olak Kemang	Kebakaran	1
Kota Baru	Simpang III Sipin	Kebakaran	6
	Legok	Kebakaran	6
Danau Sipin	Sungai Putri	Kebakaran	1
	Sungai Putri	Tanah Lonsor	2
	Telanai Pura	Kebakaran	1
Talanai Pura	Buluran Kenali	Tenggelum	1
	Pematang Sultur	Rumah Roboh	1
	Paal Merah	Eka Jaya	Kebakaran
Jambi Selatan	Pasir Putih	Kebakaran	1
Pelayangan	Arab Melayu	Kebakaran	2
<b>Jumlah</b>			<b>41</b>
<b>Tahun 2022</b>			
Alam Barajo	Kenali Besar	Kebakaran	3
	Kenali Besar	Tanah Longsor	1
	Rawa Sari	Kebakaran	2
	Rawa Sari	Angin Putting Beliung	1
	Rawa Sari	Tenggelum	1
	Bagan Pete	Kebakaran	4
	Beliung	Tertimpa Pohon	1
Jambi Timur	Kasang	Kebakaran	6
	Kasang	Angin Putting Beliung	1
	Kasang	Tenggelum	3
	Tanjung Pinang	Kebakaran	2
	Sijenjang	Kebakaran	1
	Tanjung Sari	Tenggelum	1
Jelutung	Jelutung	Kebakaran	3
	Lebak Bandung	Kebakaran	5
	Handil Jaya	Kebakaran	2
	Handil Jaya	Tenggelum	1
	Payo Lebar	Tertimpa Pohon	1
	Payo Lebar	Kebakaran	6
	Cempaka Putih	Tenggelum	1
Kota Baru	Kenali Asam	Kebakaran	4
	Suka Karya	Kebakaran	2
	Simpang III Sipin	Kebakaran	1
Talanai Pura	Buluran Kenali	Kebakaran	1
	Teluk Kenali	Kebakaran	1
Paal Merah	Lingkar Selatan	Kebakaran	2
	Payo Selincah	Kebakaran	3

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
	Eka Jaya	Kebakaran	2
Danau Sipin	Legok	Angin Putting Beliung	1
	Legok	Kebakaran	2
	Legok	Tanah Longsor	1
	Solok Sipin	Kebakaran	11
	Sungai Putri	Tanah Longsor	1
Jambi Selatan	Thehok	Kebakaran	1
Pelayangan	Mudung Laut	Kebakaran	1
	Tahtul Yaman	Kebakaran	3
<b>Jumlah</b>			<b>76</b>

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, 2022.

Commented [L2]: Update Data

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kejadian bencana yang dialami penduduk di Kota Jambi diantaranya bencana kebakaran rumah, tanah longsor, angin puting beliung. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 41 orang, dan pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan atas kejadian bencana sebanyak 76 orang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selaku instansi yang terkait langsung dengan penanganan perumahan dan kawasan permukiman belum memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan.

## B. Kawasan Rawan Bencana di Kota Jambi

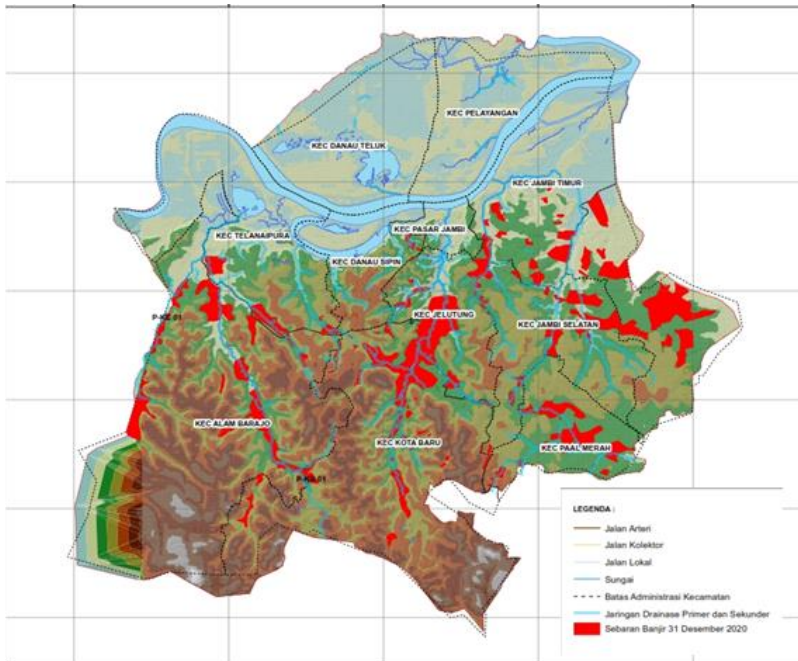
Kota Jambi merupakan wilayah yang berada pada dataran rendah dengan tingkat kelerengan lahan sebagian besar 0 – 2% memiliki 5 anak sungai dengan 8 daerah aliran sungai. Disamping itu, wilayah Kota Jambi telah terjadi pembangunan yang sangat signifikan sehingga terjadi perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kawasan yang pada awalnya sebagai daerah tangkapan air berubah menjadi lahan perumahan dan permukiman atau lahan dengan fungsi sosial lainnya. Intensitas hujan yang tinggi, akibat perubahan fungsi lahan tersebut menjadikan air hujan tidak terserap ke dalam tanah sehingga meluap ke permukaan.



**Tabel 2.12**  
**Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Permukiman (Terdampak Banjir) (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
Alam Barajo	Bagan Pete	1,3	15
	Beliung	4,92	129
	Kenali Besar	51,55	463
	Kenali Kecil	79,27	1324
	Mayang Mangurai	25,93	282
	Rawasari	14,87	575
Telanaipura	Simpang Rimbo	57,83	839
	Pematang Sulus	21,93	200
Danau Sipin	Simpang IV Sipin	37,61	1049
	Murni	6,68	348
Jambi Selatan	Solok Sipin	0,1	8
	Pakuan Baru	3,16	113
	Pasir Putih	56,24	1269
	Talang Bakung	48,38	940
	Tambak Sari	10	315
	The Hok	12,38	357
Jambi Timur	Wijayapura	4,03	162
	Budiman	0,23	4
	Kasang Jaya	4,16	98
	Rajawali	14,87	575
	Sulanjana	9,07	379
	Talang Banjar	38,45	931
Jelutung	Tanjung Pinang	0,05	16
	Tanjung Sari	12,51	329
	Cempaka Putih	1,27	53
	Handil Jaya	17,08	429
	Jelutung	84,06	1995
	Lebak Bandung	7,46	245
Kota Baru	Payo Lebar	8,24	307
	Talang jauh	23,15	400
	Kenali Asam	20,31	241
	Kenali Asam Atas	4,99	39
	Kenali Asam Bawah	30,72	334
	Paal V	102,79	1891
Paal Merah	Simpang III Sipin	41,17	940
	Suka Karya	52,19	827
	Talang Gulo	18,61	85
	Bakung Jaya	56,35	748
	Eka Jaya	109,41	2376
Pasar Jambi	Lingkar Selatan	47,98	1140
	Paal merah	84,85	1014
	Payo Selincah	75,08	2451
	Beringin	0,15	5
<b>Jumlah</b>		<b>1.301</b>	<b>26.240</b>

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan diolah dengan hasil digitasi dan interpretasi peta citra satelit



**Gambar 2.20**  
Peta Sebaran Lokasi Banjir di Kota Jambi

## 2.1.6 Kondisi Umum Demografi

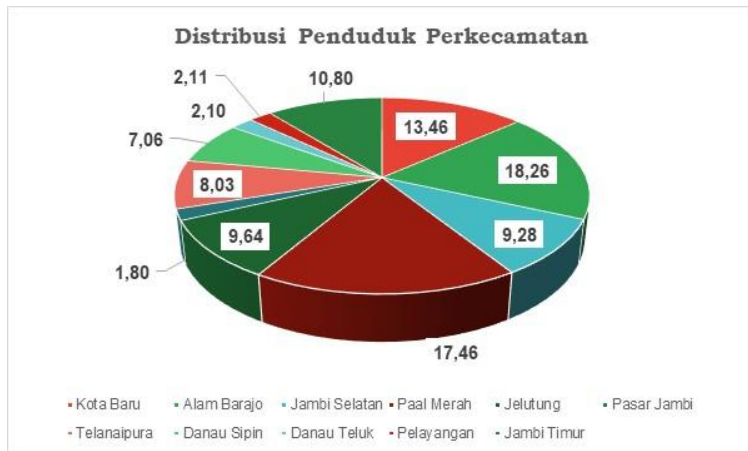
### 2.1.6.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi

Jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2016 adalah 583.487 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022, Kota Jambi memiliki jumlah penduduk sebanyak 619.553 jiwa. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,86% per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

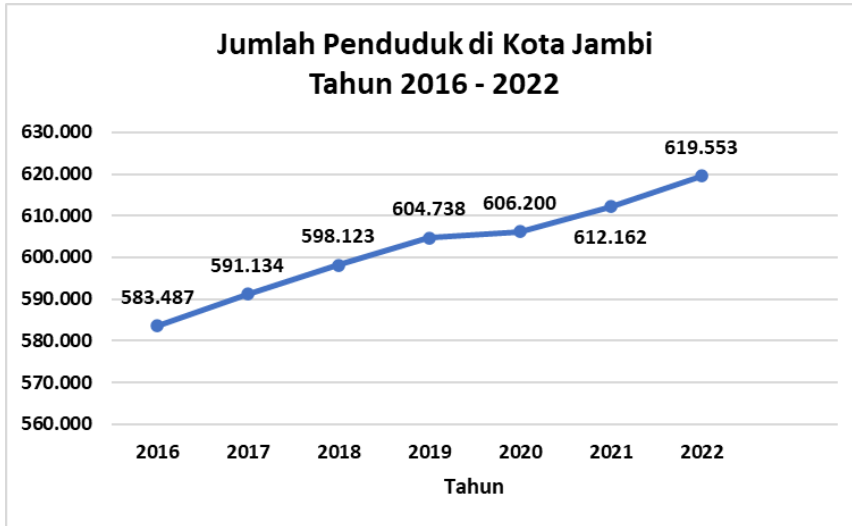
**Tabel 2.13**  
**Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022**

No	Kecamatan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Baru	73.513	75.384	77.049	78.620	80.062	81.525	83.381
2	Alam Barajo	94.773	97.184	99.349	101.350	108.196	110.377	113.146
3	Jambi Selatan	61.122	61.743	62.349	62.907	56.929	57.194	57.515
4	Paal Merah	89.002	89.835	90.641	91.383	105.906	106.895	108.182
5	Jelutung	62.907	63.369	63.792	64.213	59.442	59.602	59.744
6	Pasar Jambi	12.557	12.532	12.498	12.465	11.193	11.182	11.147
7	Telanaipura	49.970	50.482	50.966	51.451	49.212	49.456	49.720
8	Danau Sipin	47.738	48.228	48.689	49.152	43.375	43.561	43.734
9	Danau Teluk	12.036	12.083	12.123	12.160	12.822	12.907	13.009
10	Pelayangan	13.469	13.585	13.694	13.803	12.939	12.994	13.050
11	Jambi Timur	66.400	66.709	66.973	67.234	66.124	66.469	66.925
<b>Total</b>		<b>583.487</b>	<b>591.134</b>	<b>598.123</b>	<b>604.738</b>	<b>606.200</b>	<b>612.162</b>	<b>619.553</b>

Sumber: BPS Kota Jambi, Tahun 2023



**Gambar 2.21**  
**Grafik Distribusi Penduduk Per Kecamatan**  
**di Kota Jambi Tahun 2022**



**Gambar 2.22**  
**Grafik Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022**

### 2.1.6.2 Kepadatan Penduduk Kota Jambi

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Jambi tercatat sebanyak 619.553 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Alam Barajo sebanyak 113.146 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Pasar Jambi yakni sebanyak 11.147 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk tahun 2022 maka kepadatan per km<sup>2</sup> menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.14**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut**  
**Kecamatan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Kota Baru	27,25	83.381	3.059,85
2	Alam Barajo	36,06	113.146	3.137,71
3	Jambi Selatan	7,6	57.515	7.567,76
4	Paal Merah	24,25	108.182	4.461,11
5	Jelutung	7,61	59.744	7.850,72
6	Pasar Jambi	1,67	11.147	6.674,85
7	Telanaipura	20,32	49.720	2.446,85
8	Danau Sipin	7,28	43.734	6.007,42
9	Danau Teluk	13,44	13.009	967,93
10	Pelayangan	10,69	13.050	1.220,77
11	Jambi Timur	13,68	66.925	4.892,18
<b>Jumlah</b>		<b>169,85</b>	<b>619.553</b>	<b>3.647,65</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

#### 2.1.6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kota Jambi pada tahun 2022 didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 311.616 jiwa dan berjenis perempuan dengan jumlah 307.937 jiwa, dengan rasio jenis kelamin tertinggi berada pada Kecamatan Pelayangan sebesar 103,11. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.15**  
**Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kecamatan,**  
**Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Kota Baru	41.762	41.619	83.381	101,92
2	Alam Barajo	56.712	56.434	113.146	101,35
3	Jambi Selatan	29.121	28.394	57.515	100,06
4	Paal Merah	54.658	53.524	108.182	102,22
5	Jelutung	29.992	29.752	59.744	99,24
6	Pasar Jambi	5.696	5.451	11.147	97,50
7	Telanaipura	24.910	24.810	49.720	100,45
8	Danau Sipin	21.898	21.836	43.734	101,15
9	Danau Teluk	6.529	6.480	13.009	102,07
10	Pelayangan	6.795	6.255	13.050	103,11
11	Jambi Timur	33.543	33.382	66.925	101,81
<b>Jumlah</b>		<b>311.616</b>	<b>307.937</b>	<b>619.553</b>	<b>101,19</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

#### 2.1.6.4 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Jambi tahun 2022 secara keseluruhan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 15-19

tahun dan umur 20-24 tahun pada jenis kelamin perempuan yang mana pada usia tersebut termasuk ke dalam usia produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.16**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**  
**di Kota Jambi Tahun 2022**

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	27.773	26.657	54.430
2	5 - 9	26.467	25.266	51.733
3	10 - 14	25.499	23.964	49.463
4	15 - 19	25.283	24.078	49.361
5	20 - 24	25.840	25.079	50.919
6	25 - 29	26.541	25.654	52.195
7	30 - 34	25.199	24.327	49.526
8	35 - 39	23.521	24.291	47.812
9	40 - 44	22.831	23.226	46.057
10	45 - 49	21.354	21.982	43.336
11	50 - 54	18.535	19.030	37.565
12	55 - 59	15.437	15.453	30.890
13	60 - 64	11.522	11.448	22.970
14	65 - 69	8.011	8.478	16.489
15	70 - 74	4.464	4.682	9.146
16	+75	3.339	4.322	7.661
<b>Jumlah</b>		<b>311.616</b>	<b>307.937</b>	<b>619.553</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

#### 2.1.6.5 Struktur Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2022, agama Islam merupakan agama dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Jambi yakni sebesar 553.711 jiwa dari total jumlah penduduk. Sedangkan agama atau kepercayaan lainnya merupakan agama yang memiliki jumlah penduduk paling rendah yaitu sebesar 5.539 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.17**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut**  
**di Kota Jambi Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kota Baru	72.577	3.086	2.690	25	3.730	404
2	Alam Barajo	95.253	7.250	6.624	637	1.240	704
3	Jambi Selatan	55.013	984	799	441	457	192
4	Paal Merah	105.059	844	1.026	541	400	314
5	Jelutung	51.216	2.316	3.036	2.888	4	861
6	Pasar Jambi	7.775	1.145	640	37	1.714	6
7	Telanaipura	42.780	3.199	2.082	851	765	375
8	Danau Sipin	42.543	784	304	53	335	67
9	Danau Teluk	13.063	0	0	0	0	0
10	Pelayangan	13.140	11	0	0	0	0
11	Jambi Timur	55.292	2.059	3.323	1.668	2.315	2.616
<b>Jumlah</b>		<b>553.711</b>	<b>21.678</b>	<b>20.524</b>	<b>7.141</b>	<b>10.960</b>	<b>5.539</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

#### 2.1.6.6 Ketenagakerjaan

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, kemudian pada pasal 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Berdasarkan data dari BPS Kota Jambi, jumlah angkatan kerja di Kota Jambi pada tahun 2022 sebanyak 276.359 jiwa, sedangkan yang masih pengangguran sebanyak 27.158 jiwa. Kemudian penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain pribadi. Berdasarkan data BPS Kota Jambi, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Kota Jambi sebanyak 166.898 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam dalam periode survei, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data BPS Kota Jambi, persentase TPAK pada tahun 2022 sebesar 64,52% dan persentase TPT sebesar 8,95%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.18**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun**  
**Keatas Menurut Kegiatan Utama**

No	Kegiatan Utama	Jumlah
1	Bekerja	276.359
2	Pengangguran	27.158
3	Angka Kerja	303.517
4	Bukan Angka Kerja	166.898

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier.

Struktur perekonomian Kota Jambi dapat dilihat dari PDRB Kota Jambi berdasarkan lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Terdapat 17 lapangan usaha dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.19**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Jambi Tahun 2018 - 2022 (Milyar Rupiah)**

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, Perikanan	342,17	341,08	344,91	312,08	331,28
B Pertambangan dan Penggalian	579,55	548,01	368,316	477,45	654,55
C Industri Pengolahan	2.981,19	3.112,50	3.195,60	3.515,91	3.954,62
D Pengadaan Listrik dan Gas	61,12	66,74	69,02	75,26	85,70
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,41	83,91	81,73	84,21	92,81
F Konstruksi	2.554,04	2.801,84	2.796,98	3.028,75	3.148,56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.896,46	9.712,78	9.496,73	10.427,11	11.999,96
H Transportasi dan Pergudangan	3.570,37	3.707,78	2.588,22	2.545,57	3.523,55
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	682,67	735,07	683,77	707,96	883,71
J Informasi dan Komunikasi	1.333,28	1.436,66	1.559,39	1.625,75	1.740,95
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.582,39	1.646,67	1.815,00	2.020,52	2.184,70
L Real Estate	715,29	785,76	792,09	835,79	923,53
M,N Jasa Perusahaan	860,37	931,78	894,5	974,47	1.290,30
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.503,89	2.632,52	2.696,63	2.684,85	2.617,75
P Jasa Pendidikan	1.289,00	1.398,84	1.458,19	1.485,20	1.567,50
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	635,72	703,37	767,5	898,32	902,61
R,S,T,U Jasa lainnya	199,92	210,6	206,54	208,94	239,89
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>28.797,41</b>	<b>30.636,17</b>	<b>29.511,69</b>	<b>31.908,14</b>	<b>36.141,97</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Jambi tahun 2018-2022 secara keseluruhan setiap sektornya mengalami peningkatan kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan di tahun 2022. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan pendapatan terbesar yaitu sebesar Rp 11.999,96 Milyar. Sedangkan sektor dengan pendapatan terkecil berada pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar Rp 85,70 Milyar.

**Tabel 2.20**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)**

Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	195,98	190,88	189,62	166,65	169,69
B	Pertambangan dan Penggalian	432,13	425,97	441,94	453,18	452,49
C	Industri Pengolahan	2.200,32	2.272,93	2.214,91	2.263,00	2.343,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33,65	35,61	36,70	39,24	43,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46,13	46,50	45,05	46,16	49,29
F	Konstruksi	1.809,48	1.943,29	1.921,53	2.018,40	1.999,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.120,19	5.505,78	5.237,95	5.454,19	5.751,44
H	Transportasi dan Pergudangan	2.481,60	2.530,30	1.979,23	1.970,64	2.319,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447,02	476,26	444,85	458,85	565,96
J	Informasi dan Komunikasi	974,85	1.037,68	1.130,82	1.175,88	1.282,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.079,09	1.104,82	1.197,91	1.270,63	1.260,13
L	Real Estate	474,67	510,07	508,43	524,67	547,62
M,N	Jasa Perusahaan	531,25	558,90	522,44	534,68	619,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.341,77	1.402,20	1.370,84	1.374,43	1.315,30
P	Jasa Pendidikan	858,39	924,88	955,41	956,96	984,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	486,04	534,36	571,30	656,73	659,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	148,78	155,35	149,94	151,21	166,12
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>18.667,87</b>	<b>19.561,13</b>	<b>18.918,89</b>	<b>19.515,50</b>	<b>20.530,61</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar harga konstan Kota Jambi tahun 2018-2022 secara keseluruhan setiap sektornya mengalami peningkatan kecuali pada sektor Konstruksi dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan di tahun 2022. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan pendapatan terbesar yaitu sebesar Rp 5.751,44 Milyar. Sedangkan sektor dengan pendapatan terkecil berada pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar Rp 43,32 Milyar.

### 2.2.1.2 Distribusi Sektor Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh

setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Berdasarkan Informasi dari BPS Kota Jambi, selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Jambi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil (33,20%); Transportasi dan Pergudangan (9,75%); Industri Pengolahan (10,94%); Konstruksi (8,71%); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (7,24%). Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Jambi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Jambi pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, yaitu mencapai 33.20% (mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 30,83%).

Selanjutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,75% (penurunan dari 12,33% di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,94% (menaik dari 10,23% di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,71% (menurun dari 8,87% di tahun 2018) dan lapangan usaha Adminisltrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,24% (menurun dari 8,68% di tahun 2018).

**Tabel 2.21**  
**Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Jambi 2018 – 2022 (persen)**

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,19	1,11	1,17	0,98	0,92
B	Pertambangan dan Penggalian	2,01	1,79	1,25	1,50	1,81
C	Industri Pengolahan	10,23	9,97	10,84	10,97	10,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,22	0,24	0,24	0,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,27	0,28	0,27	0,26
F	Konstruksi	8,87	9,15	9,49	9,50	8,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,83	31,17	31,31	32,72	33,20
H	Transportasi dan Pergudangan	12,33	12,03	8,59	8,12	9,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,37	2,40	2,32	2,22	2,45
J	Informasi dan Komunikasi	4,63	4,69	5,29	5,10	4,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,54	5,50	6,24	6,34	6,04
L	Real Estate	2,48	2,56	2,69	2,62	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	2,99	3,01	3,04	3,01	3,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,68	8,59	8,99	8,26	7,24
P	Jasa Pendidikan	4,48	4,57	4,95	4,66	4,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,30	2,60	2,85	2,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,69	0,69	0,70	0,66	0,66
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

### 2.2.1.3 Perkembangan Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

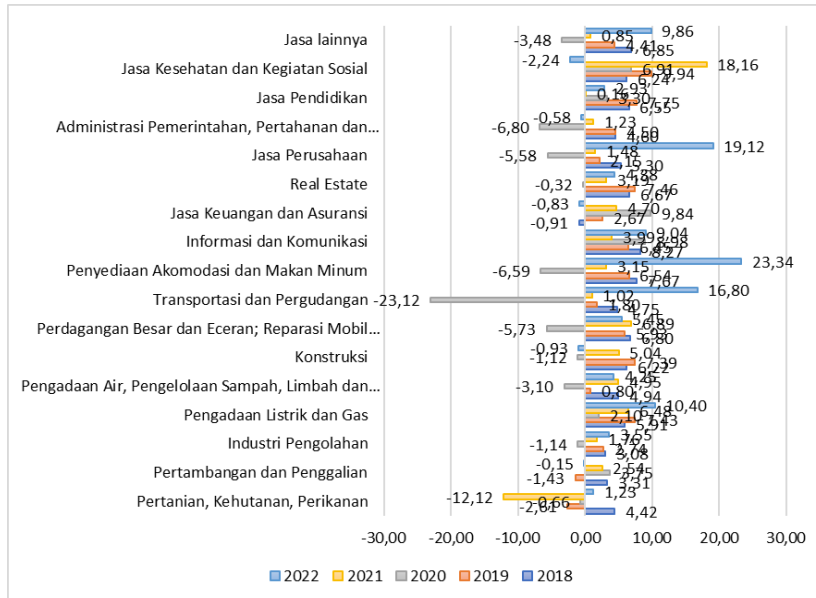
Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kota Jambi pada tahun 2022 terjadi kenaikan sekitar 5,36% (dari 4,08% di tahun 2021). Nilai PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan 2022, mencapai 20.529,73 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,36%, dari tahun 2021 sekitar 4,08%.

Berdasarkan informasi dari BPS Kota Jambi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 23,34% dan katagori terkecil berada di kategori Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sekitar -2,24% (mengalami penurunan dari 18,16% di tahun 2021).

**Tabel 2.22**  
**Laju Pertumbuhan Rill PDRB menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Jambi 2018 – 2022 (persen)**

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4,42	-2,61	-0,66	-12,12	1,23
B	Pertambangan dan Penggalian	3,31	-1,43	3,75	2,54	-0,15
C	Industri Pengolahan	3,08	2,74	-1,14	1,76	3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,91	7,43	2,10	6,48	10,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	0,80	-3,10	4,95	4,25
F	Konstruksi	6,22	7,39	-1,12	5,04	-0,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,80	5,93	-5,73	6,89	5,45
H	Transportasi dan Pergudangan	4,75	1,80	-23,12	1,02	16,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	6,54	-6,59	3,15	23,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,27	6,45	8,98	3,99	9,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,91	2,67	9,84	4,70	-0,83
L	Real Estate	6,67	7,46	-0,32	3,19	4,38
M,N	Jasa Perusahaan	5,30	2,15	-5,58	1,48	19,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,60	4,50	-6,80	1,23	-0,58
P	Jasa Pendidikan	6,55	7,75	3,30	0,16	2,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,24	9,94	6,91	18,16	-2,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,85	4,41	-3,48	0,85	9,86
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5,30</b>	<b>4,73</b>	<b>-4,24</b>	<b>4,08</b>	<b>5,36</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

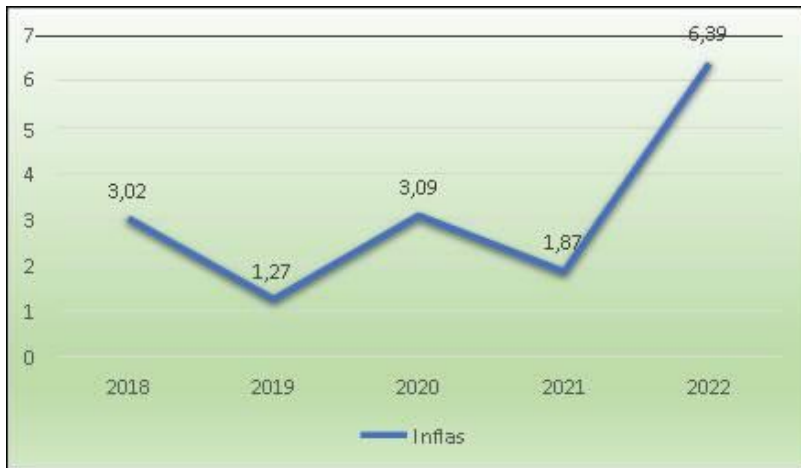
**Gambar 2.23**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Rill PDRB menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Jambi 2018 – 2022 (persen)**

#### 2.2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Laju inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% dan laju inflasi terendah pada tahun 2019 sebesar 1,27%. Pada Tahun 2022, inflasi Kota Jambi sebesar 6,39% berada di atas inflasi nasional 2020 sebesar 5,51%.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS,2023.

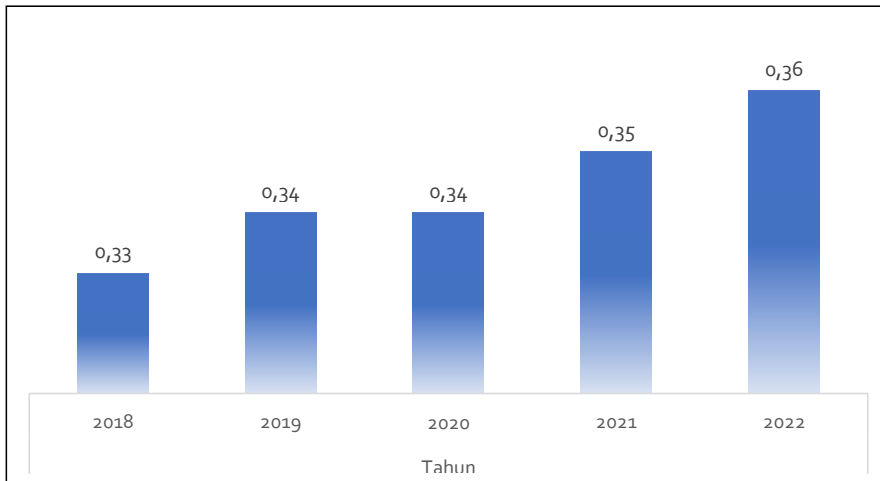
**Gambar 2.24**  
**Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,50 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,65 persen.

#### 2.2.1.5 Indeks Gini Ratio

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2022 mencapai sebesar 0,36 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 0,35. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan

kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 0,34.



Sumber: BPS,2023

**Gambar 2.25**  
**Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.

## 2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1 PDRB perkapita

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2022 mencapai 58.335,54 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 44.479,44 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan



bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

**Tabel 2.23**  
**Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>PDRB (milyar rupiah)</b>						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	28,797.41	30,636.93	29,465.15	31,893.58	36,141.96
2	Atas Dasar Harga Konstan	18,667.87	19,550.81	18,721.13	19,484.47	20,529.73
<b>PDRB Perkapita (ribu Rupiah)</b>						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	48,147.91	50,661.66	48,196.62	52,099.90	58,335.54
2	Atas Dasar Harga Konstan	31,211.80	32,329.50	30,622.46	31,828.94	33,136.36

Sumber : BPS Kota Jambi, 2023

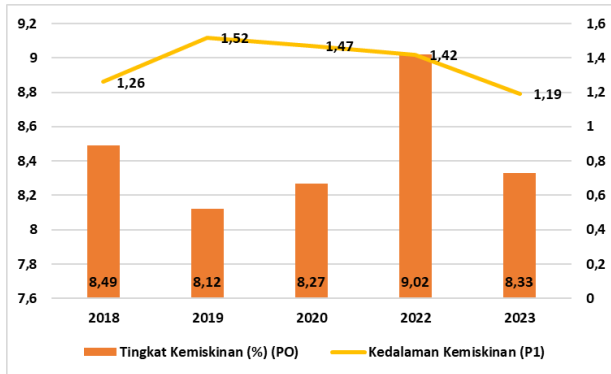
### 2.2.2.2 Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 8,33 % pada Tahun 2022. Dengan tingkat kemiskinan 8,83% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari Tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada 8,49%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,04% perTahun.

**Tabel 2.24**  
**Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018 – 2022**

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Miskin (Ribu)	50,61	48,95	50,44	54,23	50,4
2	Tingkat Kemiskinan (%) (PO)	8,49	8,12	8,27	9,02	8,33
3	Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	466.854	488.034	529.090	563.403	605.556
4	Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,26	1,52	1,47	1,42	1,19
5	Keparahan Kemiskinan	0,28	0,42	0,4	0,34	0,25

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Jambi tahun 2017 – 2023, Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2017–2023, BPS Provinsi tahun 2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023.



**Gambar 2.26**  
**Grafik Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018 – 2022**

### 2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

**Tabel 2.25**  
**Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Group Kesenian	185	185	185	185	185
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2023.

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya jumlah cabang olahraga. Tahun 2018 jumlah cabang olahraga sebanyak 30 menjadi 39 pada tahun 2022, Namun 39 cabang olahraga ini hanya memiliki gedung olahraga sebanyak 2 unit, artinya masih kekurangan gedung olahraga.

## 2.3 ASPEK PELAYANAN PUBLIK

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

#### 2.3.1.1 Pendidikan

##### A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7–12; 13–15 dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7–12) dan usia SMP (13–15). Realisasi APS yang dicapai pada tahun 2022 untuk usia SD/MI sebesar 99,70 %, artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,70 persen. Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 98,87 %. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari tahun 2018 mengalami fluktuasi, walaupun mengalami kenaikan yang relatif stabil. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

**Tabel 2.26**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk**  
**Kota Jambi Tahun 2018-2022**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	66.212	61.106	57.383	56.088	67.937
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	66.234	58.300	58.097	56.675	68.133
3	APS SD/MI, Paket A	99.99	100.48	98.77	100,48	99.70
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	29.698	26.651	26.900	25.478	31.427
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	31.236	30.795	30.754	29.097	31.786
3	APS SMP/MTS, Paket B	95.07	83.00	87,46	98,48	98.87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

##### B. Angka Partisipasi Murni

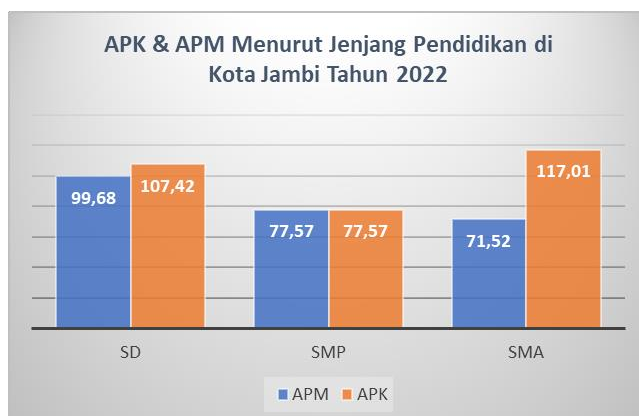
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka partisipasi penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi, Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2022 sebesar 99,68, Perhitungan realisasi ini

diukur dengan rumus Jumlah Murid SD/Sederajat usia 7-12 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi. APK SMP pada tahun 2022 sebesar 77,57 perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah Murid SMP/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi. Terakhir, APM SMA pada tahun 2022 sebesar 117,01.

**Tabel 2.27**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022**

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<b>APM</b>			
SD	99,36	100,00	99,68
SMP	81,86	73,78	77,57
SMA	78,55	63,22	71,52
<b>APK</b>			
SD	107,32	107,52	107,42
SMP	81,86	73,78	77,57
SMA	111,94	122,99	117,01

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2022



**Gambar 2.27**  
**Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022**

### C. Ketersediaan Sekolah

Pada Tabel 2.27. menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2018-2022. Secara umum, sampai dengan

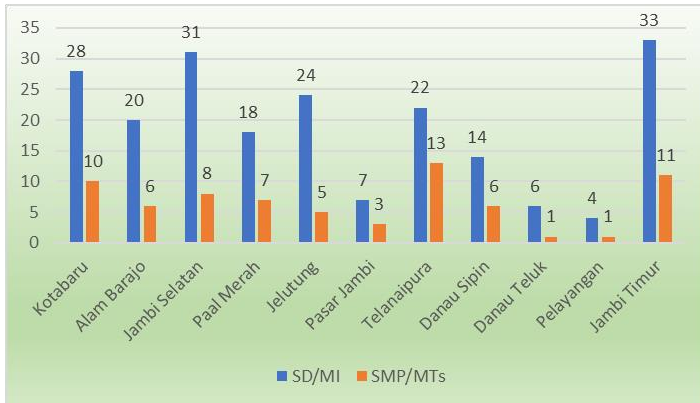
tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.

**Tabel 2.28**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1. SD/MI						
1.1.	Jumlah Ruang Kelas	2.602	2.625	2.632	2.635	2.388
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	58.300	58.097	57.799	56.675	56.799
1.3.	Rasio	0,044	0,045	0,045	0,047	0,042
2. SMP/MTS						
2.1.	Jumlah gedung sekolah	1.131	1.135	1.236	1.237	1.239
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.795	26.900	30.737	29.097	22.482
2.3.	Rasio	0,037	0,042	0,040	0,045	0,055

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

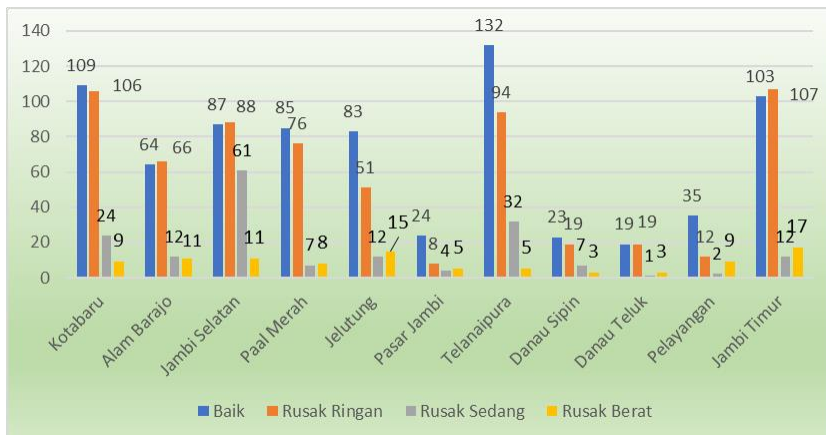
Untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs relatif sebaran antar kecamatan cukup merata. Persebaran ini dirasa masih kurang dalam menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid. Untuk tingkat SD/MI sekolah terbanyak ada di kecamatan Jambi Timur sebanyak 33 sekolah, sedangkan sekolah yang paling sedikit ada di kecamatan Pelayangan sebanyak 4 sekolah. Untuk tingkat SMP/MTs sekolah paling banyak di kecamatan Telanaipura, sedangkan yang sedikit ada di kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan sebanyak 1 sekolah. Sebaran gedung sekolah perkecamatan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

**Gambar 2.28**  
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2022

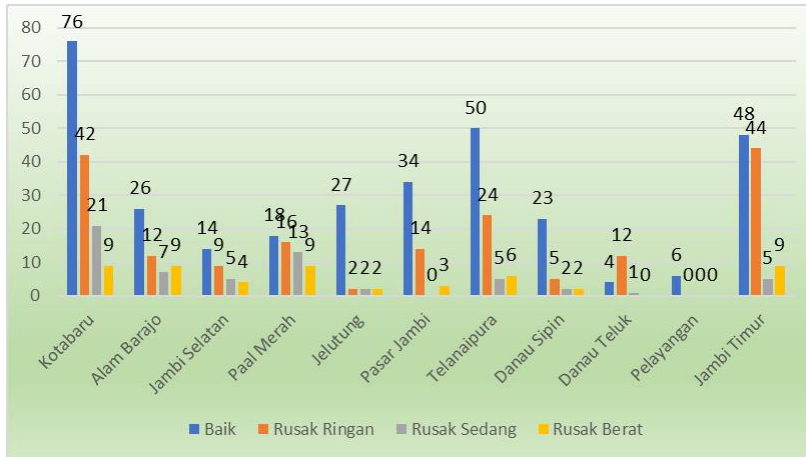
Kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

**Gambar 2.29**  
Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2022

Sedangkan untuk kondisi ruang kelas SMP/MTS adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

**Gambar 2.30**  
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2023

### 3. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

**Tabel 2.29**  
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.206	3.184	3.232	3.116	3.105
1.2.	Jumlah Murid	62.336	60.976	59.616	60.594	57.293
1.3.	Rasio	0,051	0,052	0,067	0,051	0,054
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.557	1.558	1.621	1.741	1.634
2.2.	Jumlah Murid	26.350	26.442	29.817	27.204	26.403
2.3.	Rasio	0,059	0,058	0,061	0,064	0,062

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.30**  
**Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTS		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	385	7,539	0.051	157	2,697	0.058
2	Kec. Danau Sipin	233	3,577	0.065	132	1,902	0.069
3	Kec. Danau Teluk	63	1,056	0.060	22	262	0.084
4	Kec. Jambi Selatan	443	8,218	0.054	122	2,437	0.050
5	Kec. Jambi Timur	447	7,525	0.059	281	4,049	0.069
6	Kec. Jelutung	326	5,703	0.057	119	1,925	0.062
7	Kec. Kota Baru	399	8,092	0.049	287	4,298	0.067
8	Kec. Paal Merah	264	6,103	0.043	131	2,190	0.060
9	Kec. Pasar Jambi	69	969	0.071	112	1,718	0.065
10	Kec. Pelayangan	63	1,061	0.059	8	65	0.123
11	Kec. Telanai Pura	413	7,417	0.056	263	4,160	0.063
<b>Jumlah</b>		<b>3.105</b>	<b>57.260</b>	<b>0.054</b>	<b>1.634</b>	<b>25.703</b>	<b>0.064</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

#### 4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.31**  
**Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SD/MI/Paket A</b>						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	11.308	11.438	11.425	10.499	9.765
2	Jumlah Siswa SD	11.308	11.438	11.425	10.499	9.765
3	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
<b>SMP/MTS/Paket B</b>						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	8.623	8.658
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	8.623	8.658
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

### 2.3.1.2 Kesehatan

#### A. Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2018 - 2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.32**  
**Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

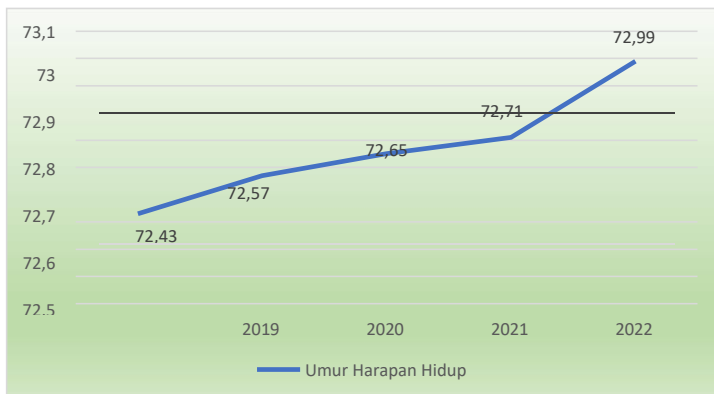
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup	72,43	72,57	72,65	72,71	72,71
2	Angka Kematian Ibu	2	5	3	6	4
3	Angka Kematian Bayi	7	7	11	4	2
4	Jumlah Kelahiran Hidup	10.205	10.104	10.489	10.211	9.734

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

#### B. Usia Harapan Hidup (UHH)

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya Usia Harapan Hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup di Kota

Jambi selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



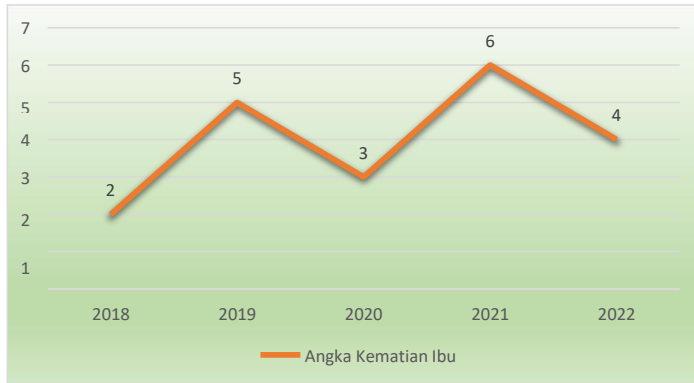
Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.31**  
**Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2022 (dalam tahun)**

Pada gambar terlihat selama periode 2018-2022, Umur Harapan Hidup di Kota Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2018 umur harapan hidup di Kota Jambi sebesar 72,43 meningkat menjadi 72,99 pada tahun 2022, Hal ini berarti bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2022, rata-rata penduduk Kota Jambi dapat bertahan hidup hingga usia 72 tahun.

### C. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

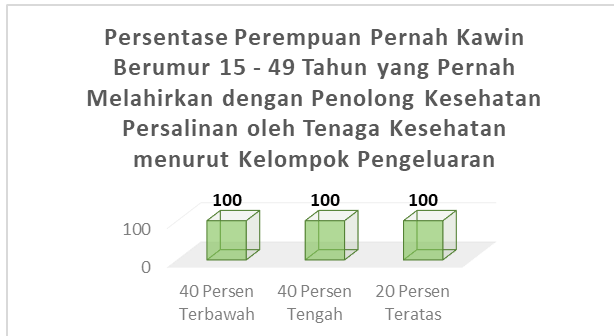
**Gambar 2.32**  
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar tersebut, AKI di Kota Jambi selama rentang tahun 2018-2022 berfluktuasi, dengan AKI terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 2 orang dan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar 6 orang. Proporsi perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dengan penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 100 %.

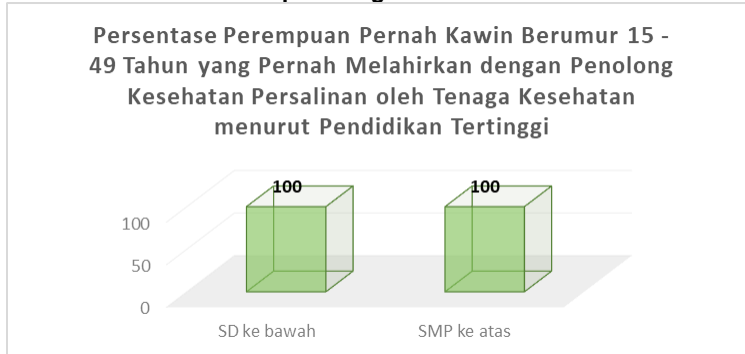
**Tabel 2.33**  
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Karakteristik, 2022

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
<b>Kelompok Pengeluaran</b>	
40 Persen Terbawah	100,00
40 Persen Tengah	100,00
20 Persen Teratas	100,00
<b>Pendidikan Tertinggi</b>	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	100,00
<b>Kota Jambi</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022.



**Gambar 2.33**  
**Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022**



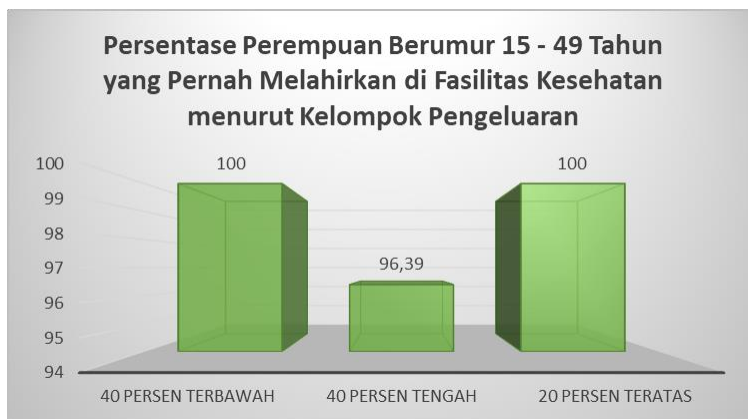
**Gambar 2.34**  
**Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022**

Demi menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan anak maka proses persalinan diharuskan berada pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Kota Jambi Tahun 2022, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan Kota Jambi sebesar 98,77%.

**Tabel 2.34**  
**Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Karakteristik, 2022**

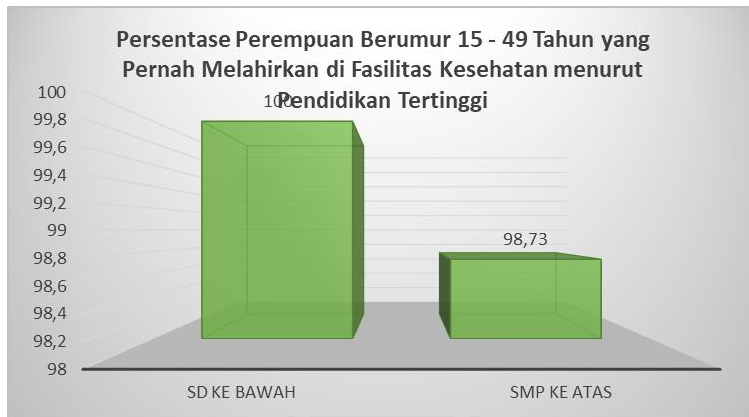
Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
<b>Kelompok Pengeluaran</b>	
40 Persen Terbawah	100,00
40 Persen Tengah	96,39
20 Persen Teratas	100,00
<b>Pendidikan Tertinggi</b>	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	98,73
<b>Kota Jambi</b>	<b>98,77</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022.



**Gambar 2.35**

**Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022**



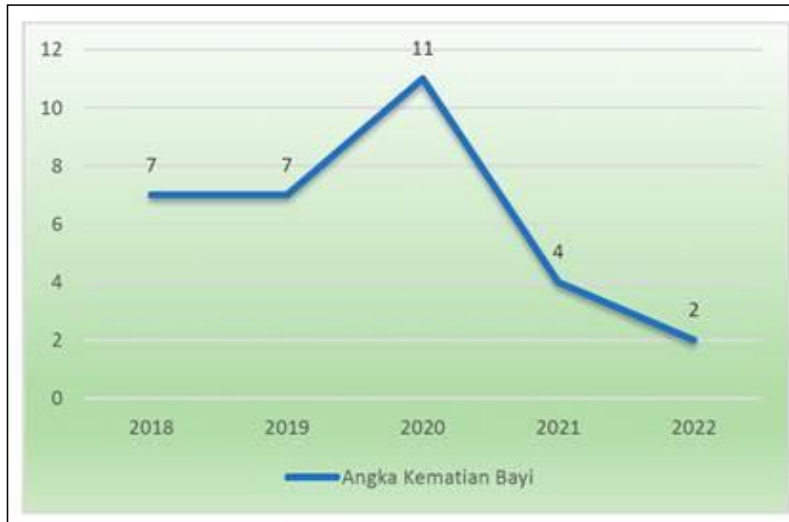
**Gambar 2.36**

**Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022**

#### **D. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

**Gambar 2.37**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Dengan menurunnya angka kematian bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi selama periode 2018-2022.

Indikasi penurunan angka kematian berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB dan angka *Stunting* (kondisi anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi) pada balita dan anak di wilayah Kota Jambi. Dimana Jumlah balita gizi buruk menurun dari tahun 2021 sebanyak 43 orang menjadi 25 di tahun 2022. Sedangkan Angka *Stunting* juga mengalami penurunan dari 26,2 di tahun 2018 menjadi 14 di tahun 2022.

**Tabel 2.35**  
**Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	4	4	4	43	25
2	Jumlah Balita	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio PBGB (%)	0,01	0,01	0,01	0,16	0,06
4	Angka Stunting	26,2	18,62	17,4	17,4	14

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

#### E. Capaian Umum Layanan Fasilitas Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	460	460	467	468	469
2	Jumlah Balita	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio RPPB (%)	0,962	1,003	1,337	1,653	1,229

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

**Tabel 2.37**  
**Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	17	17	17
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio RSPP (%)	0,0028	0,0028	0,0027	0,0028	0,0027

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

**Tabel 2.38**  
**Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	58	58
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,009	0,009	0,0094	0,0093

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.



**Tabel 2.39**  
**Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter	326	868	398	399	506
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio DPP (%)	0,053	0,014	0,064	0,065	0,081

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2022, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas sebanyak 20 unit terdiri dari Puskesmas perawatan 4 unit, Puskesmas Pembantu 38 unit dan puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 20 Puskesmas. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 265 orang, dokter spesialis 195 orang, dokter gigi 46 orang, bidan 437 orang, dan perawat sebanyak 391 orang.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu semua puskesmas yaitu sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah

terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu dari 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang melayani pasien umum yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, Upaya pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas dan RSUD juga memfokuskan pada pelayanan terhadap penderita AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), bekerja sama dengan lintas sektor yaitu masyarakat dan swasta. Saat ini jumlah suspek malaria di Kota Jambi mengalami penurunan dari 6.619 pada tahun 2020 menjadi 1942 pada tahun 2022. Sedangkan Kasus TB paru mengalami peningkatan sebanyak 921 kasus sejak tahun 2020, dari jumlah 1.021 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.942 kasus pada tahun 2022, begitu pula pada kasus kumulatif penderita AIDS yang mengalami peningkatan dari 683 kasus pada tahun 2020 menjadi 730 kasus pada tahun 2022.

Untuk menanggulangi penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) ini diperlukan kerjasama lintas sektor dalam mendukung pelayanan Fasilitas Kesehatan pemerintah dalam melayani masyarakat.

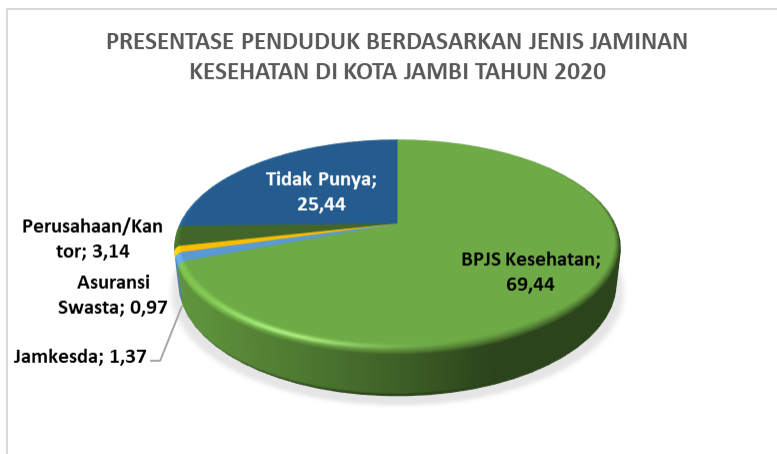
#### **F. Kepesertaan Jaminan Sosial**

Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2022 Presentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan pada Tahun 2022 sebanyak 74,92%. Jaminan Kesehatan terdiri dari BPJS kesehatan, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/Kantor. Persentase dari berbagai jenis jaminan kesehatan di Kota Jambi yaitu BPJS kesehatan sebesar 69,44%, Jamkesda sebesar 1,37%, Asuransi Swasta sebesar 0,97% dan perusahaan/kantor sebesar 3,14%.

**Tabel 2.40**  
**Presentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut**  
**Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2022**

Kabupaten/Kota	BPJS Kesehatan	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Punya
Kerinci	38,42	0,41	0,25	0,78	60,34
Merangin	42,57	0,21	0,06	0,46	56,74
Sarolangun	53,63	1,76	0,03	1,54	43,19
Batang Hari	63,04	2,24	0,79	2,73	31,21
Muaro Jambi	50,09	0,35	0,08	3,24	46,64
Tanjung Jabung Timur	41,60	50,16	0,00	0,34	10,83
Tanjung Jabung Barat	42,77	0,26	0,00	1,80	55,16
Tebo	38,97	0,00	0,00	0,29	60,75
Bungo	41,97	1,22	0,09	1,56	55,19
<b>Kota Jambi</b>	<b>69,44</b>	<b>1,37</b>	<b>0,97</b>	<b>3,14</b>	<b>25,44</b>
Kota Sungai Penuh	74,85	0,85	0,46	0,74	23,10
Provinsi Jambi	50,46	3,74	0,28	1,75	44,09

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022.



**Gambar 2.38**  
**Grifik Presentase Penduduk Berdasarkan Jenis Jaminan Kesehatan**  
**di Kota Jambi Tahun 2022**

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### A. Jaringan Jalan

Jalan merupakan salah satu prasarana yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan perekonomian karena dapat memperlancar arus

perdagangan dari satu tempat ke tempat lainnya. Menurut Kota Jambi Dalam Angka tahun 2022, Panjang jalan di Kota Jambi telah mencapai 510,452 Km. Rincian dari masing-masing jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.41**  
**Panjang Jalan Kota Jambi Menurut Permukaan, Kondisi, dan Kelas Jalan Tahun 2020 – 2022**

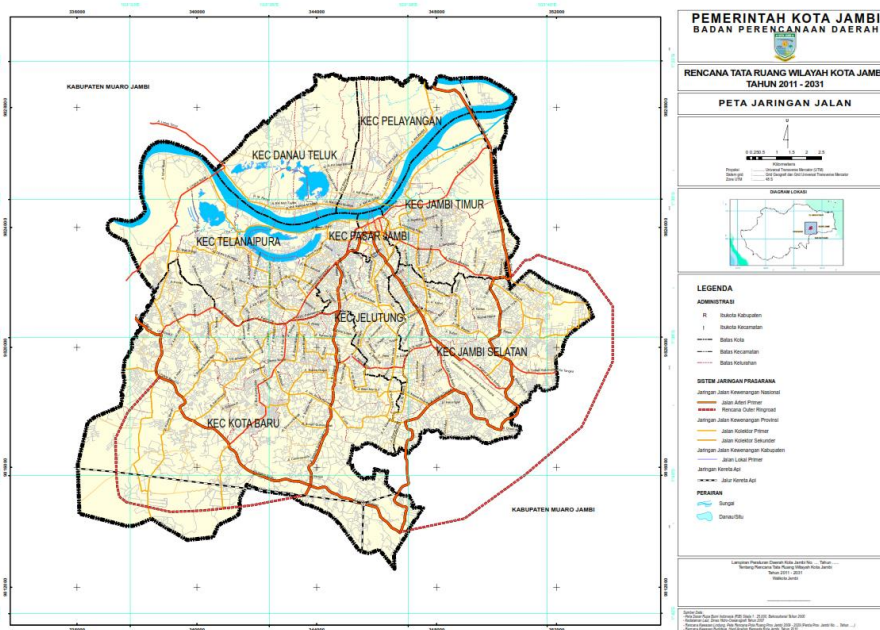
No	Rincian	Panjang Jalan (Km)		
		2020	2021	2022
1	Permukaan			
	Aspal	465.408	473.127	475.693
	Kerikil	8.924	4.766	5.565
	Tanah	36.120	32.559	29.194
	Tidak Terinci	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>510.452</b>	<b>510.452</b>	<b>510.452</b>
2	Kondisi Jalan			
	Baik	371.910	366.587	412.814
	Sedang	40.241	35.350	43.914
	Rusak	54.337	71.027	47.825
	Rusak Berat	43.964	37.488	5.899
	<b>Total</b>	<b>510.452</b>	<b>510.452</b>	<b>510.452</b>

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Kota sebagai suatu sistem/tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang kota. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota yang meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal yang membentuk pola perkembangan dari kota itu sendiri.

Jaringan jalan Kota Jambi terbentuk dengan pola yang radial konsentris, dimana jaringan jalan primer terfokus pada orientasi 1 (satu) titik utama, yaitu terhadap CBD pada BWP I yang berkembang dengan kombinasi setengah cincin dengan keberadaan ruas jalan arteri yang melingkar dari timur hingga ke wilayah bagian barat kota. Sistem jaringan jalan Kota Jambi berdasarkan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.39  
Peta Jaringan Jalan Kota Jambi

## B. Penyelenggaraan Penataan Ruang

### Aspek Perencanaan Tata Ruang

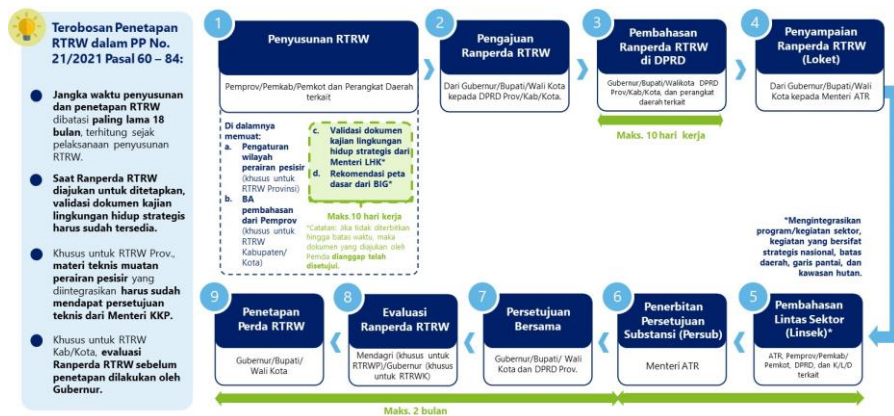
Sebagaimana diketahui, bahwa untuk aspek rencana tata ruang di Kota Jambi, rencana tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai sejauh ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013-2033.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebabkan perubahan dinamika pembangunan secara umum dan

secara khusus bidang penyelenggaraan penataan ruang yang berdampak terhadap kebutuhan perubahan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut sedang dalam proses perubahan dengan arahan utama, mencabut Peraturan Daerah yang berlaku pada saat ini. Pada dasarnya proses revisi RTRW sudah dimulai sejak Tahun 2019 melalui penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diikuti dengan Penyusunan Materi Teknis dan Raperda RTRW pada Tahun 2020. Namun demikian, karena ada dinamika pembangunan dengan terbitnya Undang-undang Cipta Kerja, maka Pemerintah Kota Jambi menyusun kembali Dokumen Materi Teknis dan Raperda di Tahun 2021 berikut dengan penyiapan pemenuhan syarat Persetujuan Substansi.

Proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang menjadi peraturan daerah harus melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit mulai dari harmonisasi sektoral di tingkat kota, pembahasan di tingkat provinsi, dan permohonan persetujuan substansi di tingkat pusat. Untuk melalui alur proses ini, Pemerintah Kota setidaknya harus memenuhi 13 (tigabelas) item persyaratan.



**Gambar 2.40**  
**Proses Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang**

Terkait dengan syarat-syarat persetujuan substansi ini, dapat dilaporkan bahwa seluruh persyaratan sudah dapat dinyatakan siap. Untuk proses Tahun 2022, sudah sampai pada tahap pembahasan dengan DPRD Kota Jambi

melalui Pansus RTRW Kota Jambi, dan pada Tahun 2023 sudah sampai pada tahap asistensi (pra loket) dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN. Kondisi pemenuhan syarat persetujuan substansi dan dokumentasi proses yang dilalui sampai saat ini dapat dilihat pada tabel dan dokumentasi kegiatan berikut ini:

**Tabel 2.42**  
**Progres Penyiapan Syarat Persetujuan Substansi**

No	Dokumen Kelengkapan	Keterangan
1	Berita acara kesepakatan substansi antara kepala daerah dengan DPRD Kabupaten atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda	Nomor : HKM.01/532/PUPR/IV/2022 Nomor : PD.03.02/10/DPRD/2022 Tanggal 1 April 2022
2	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy dan hardcopy)	√
3	Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi	√
4	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, dan album peta yang sudah meingintegrasikan muatan pengaturan perairan pesisir, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy) a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana.	√
5	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	√
6	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota	√
7	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	KP 1 : Dilaksanakan Pada Hari Kamis, 30 Juli 2020 KP 2 : Dilaksanakan Pada Hari Senin, 8 Desember 2020
8	Berita Acara dengan provinsi/kab/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kab/kota lain) -Muaro Jambi	Dilaksanakan Pada Hari Rabu, 23 Juni 2021
9	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial Dasar Untuk Penyusunan RTRW Kota Jambi Nomor : 1.11/KA-BIG/IGT.02.04/8/2023
10	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	Validasi KLHS Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2013-2033 Nomor : S.1136/DLH-2.1/VIII/2022 31 Agustus 2022
11	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Berita Acara TKPRD Kota Jambi Pada Hari Kamis, 7 September 2021
12	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Berita Acara Kegiatan Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Nomor : 603/DPUPR-3.2/XII/2021

No	Dokumen Kelengkapan	Keterangan
		24 Desember 2021
13	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)	Rekomendasi Atas peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Nomor : PB.01/367-200/III/2023 17 Maret 2023

Salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan substansi rancangan rencana tata ruang dari pemerintah pusat adalah Berita Acara Kesepakatan Substansi antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Untuk mendapatkan kesepakatan ini, proses yang dilalui adalah pembahasan substansi bersama unsur/perangkat DPRD, yang membahas pasal demi pasal yang terkandung dalam rancangan RTRW Kota Jambi.

Proses ini pada dasarnya sudah dimulai sejak Tahun 2021, yaitu melalui proses harmonisasi dengan Bapemperda DPRD Kota Jambi, dan dilanjutkan pembahasan pasal per pasal dengan Pansus RTRW Kota Jambi. Dalam proses pembahasan, dapat dikatakan berjalan lancar dan banyak mendapatkan masukan dari forum Pansus untuk penyempurnaan substansi RTRW Kota Jambi.



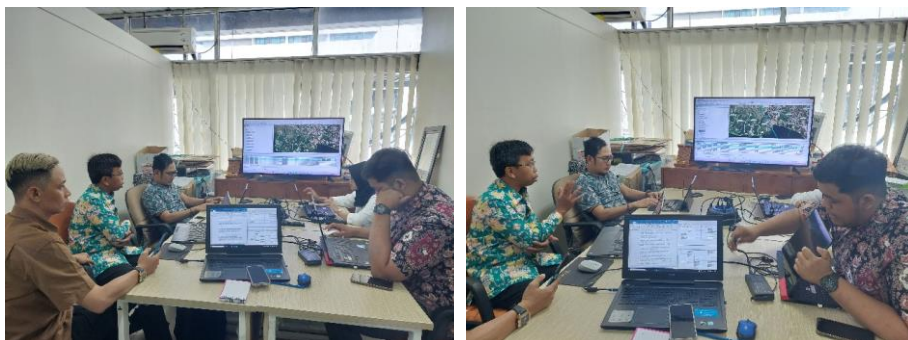
Gambar 2.40

Pembahasan Substansi Rancangan RTRW bersama Pansus DPRD Kota Jambi

Tahapan untuk mendapatkan Persetujuan Substansi dari Pemerintah Pusat adalah harus melalui proses Rapat Limtas Sektor. Namun sebelum Rapat Lintas Sektor tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui Subditnya memastikan terlebih dahulu kesesuaian vertikal dan horizontal dari rancangan



RTRW yang dimohonkan. Tahap ini melalui proses klinik. Pada Tahun 2022, pelaksanaan klinik dilaksanakan pada Bulan April dan Bulan Agustus Tahun 2022 di Kantor Kementerian ATR/BPN.



Gambar 2.41

Klinik Rancangan RTRW di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta

### Aspek Pemanfaatan Ruang Kota

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam arti lain, kesesuaian pemanfaatan ruang adalah kesesuaian program Pembangunan dalam umur rencana RTRW terhadap program-program yang sudah tertuang dalam indikasi program yang bertujuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang kota.

#### I. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Secara Umum

Terdapat beberapa rencana perwujudan struktur ruang yang belum terakomodasi pada kondisi faktual dilapangan, terutama kebijakan-kebijakan yang muncul setelah Perda RTRW Kota Jambi ditetapkan, seperti fungsi sistem perkotaan, pembangunan jalur kereta api, dan lain sebagainya.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan, serta sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki berhubungan fungsional. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan ataupun tidak. Wujud struktural pemanfaatan

ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang.

Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota (Sinulingga, 2005: 97, yaitu:

- Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk di dalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat pelayanan.
- Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat.
- Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau.
- Jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas

Struktur ruang memiliki sifat yang mapan, tidak berubah dalam jangka pendek atau dapat diprediksi dalam jangka panjang, sedangkan bentuk kota memiliki sifat yang sesuai dengan bentukan alam, pertumbuhan karakteristik sosioeko, serta mengakomodasi kegiatan penduduk dengan efisien.

#### **1) Pusat Pelayanan Yang Sudah Terbentuk**

Rencana sistem pusat-pusat pelayanan Kota Jambi ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah kegagalan perwujudan rencana struktur ruang yang tertuang didalam RUTR Kota Jambi Tahun 2000, dan strategi mereduksi peran pusat Kota Jambi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana sistem pusat kegiatan ditetapkan dengan mengakomodir beberapa pusat yang sudah ada dan juga rencana pengembangan pusat baru yang berperan sebagai Subpusat Kota dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pusat Kota adalah pusat yang telah terbentuk sebelumnya dengan fungsi sebagai Pusat Ekonomi, dan Pusat Administrasi Pemerintahan baik Pemerintahan Provinsi Jambi maupun Pemerintahan Kota Jambi.



Pusat Ekonomi Kota Jambi



*Pusat Administrasi Pemerintahan  
Provinsi Jambi*



*Pusat Administrasi Pemerintahan Kota  
Jambi*

Gambar 2.42  
Pusat Kota dan Pelayanan di Kota Jambi

Subpusat Kota, yaitu: Kawasan Olak Kemang, Kawasan Pasar Baru Talang Banjar, Kawasan Kebun Handil, dan Kawasan Sipin. Semua pusat ini berfungsi sebagai pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dengan skala pelayanan minimal adalah Bagian Wilayah Perkotaan masing-masing.



Gambar 2.43  
SubPusat Kota Kawasan Pasar Baru Talang Banjar

Pusat-pusat lain yang sudah terwujud pengembangannya adalah pusat dengan skala lingkungan, seperti pusat di Arab Melayu, Pusat di Perumnas Aur Duri, dan Pusat di Mayang Mengurai.



*Gambar 2.44  
Pusat Lingkungan di Kawasan Perumnas Aur Duri*



*Gambar 2.45  
Pusat Lingkungan di Arab Melayu, namun belum berfungsi*



*Gambar 2.46  
Pusat Lingkungan di Mayang Mangurai*

## **2) Pusat Yang Belum Terbentuk**

Saat ini baru 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan pemanfaatan ruang RTRW Kota Jambi dari 20 (duapuluh) tahun rencana, sehingga masih terdapat beberapa pusat yang direncanakan belum terwujud. Pusat-pusat yang belum terwujud tersebut didominasi oleh Pusat Pelayanan Lingkungan, yaitu pusat lingkungan di Kawasan Persimpangan Jl.Yos Sudarso dan Ruas Lingkar Timur Kelurahan Sejinjang, Jalan R B Siagian Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Talang Bakung dengan daerah pelayanan Kelurahan Eka Jaya, Kelurahan Thehok, Kelurahan Bagan Pete, Kelurahan Buluran Kenali Pematang Sujur. Pusat pelayanan lingkungan ditetapkan selain untuk pelayanan juga untuk menggantikan peran aglomerasi pedagang informal, seperti yang terjadi di Jalan Lingkar Timur (Pasar 46), Pasar Perumnas Aur Duri, dan beberapa pusat lingkungan lainnya, namun belum semua terwujud.



*Gambar 2.47  
Lebih dikenal dengan Pasar 46. Belum ada pasar pengganti di Simpang Sejinjang  
untuk mengakomodir kebutuhan*



*Gambar 2.48  
Pasar Pasir Putih yang belum terwujud penataannya*

Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Jambi terkait dengan pusat-pusat skala lingkungan adalah pertumbuhan pasar-pasar skala lingkungan secara

swadaya yang cenderung kurang tertata dan memiliki kualitas lingkungan yang rendah, seperti yang terjadi di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Lokasi pasar ini tidak sesuai dengan arahan perwujudan pusat skala lingkungan untuk sekitar kawasan tersebut. Di BWP V tersebut memang diarahkan pusat lingkungan, yaitu di Kelurahan Bagan Pete, yang sekaligus bertujuan menarik perkembangan permukiman kota.



*Gambar 2.49*

*Pasar Skala Lingkungan yang tumbuh di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam*

## **II. Pemanfaatan Ruang Tahun 2022**

Pemanfaatan ruang Tahun 2022 adalah sebagai salah satu bentuk laporan implementasi indikasi program RTRW Kota yang berlaku pada saat ini. Telaah pemanfaatan ruang Tahun 2022 ini di fokuskan kepada rencana-rencana program yang diarahkan perwujudannya pada PJM 3. Telaah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.43**  
**Implementasi Pemanfaatan Ruang PJM 2 RTRW Kota Jambi**

No	Program/Kegiatan	Implementasi		Keterangan
		Terwujud	Tidak Terwujud	
1	Pembangunan Pusat aglomerasi parkir di Kecamatan Pasar Jambi		V	Masih terkendala dari pelaku pedangan informal yang berada pada bangunan eksisting pada saat ini
2	Peningkatan dan Pengembangan Event Kepariwisataaan	V		Atraksi wisata menyambut hari-hari besar keagamaan dan nasional
3	Pembangunan pusat perdagangan di ex.Terminal Rawasari	V		Bangunan terealisasi, namun operasional belum optimal
4	Pembangunan Pasar Rakyat di Kelurahan Sijenjang, Kelurahan Lingkar Selatan, Kelurahan Bagan Pete, Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Kenali Asam	V		
5	Rehabilitasi dan Peningkatan Dimensi Jalan:			
	Jl. Marsekal Surya Dharma –Jl. Pangeran Hidayat – Jl. R.M. Marzuki		V	
	Jl. Prof. M.Yamin, SH;		V	
	Jl. Sultan Agung		V	
	Jl. Husni Thamrin		V	
	Jl. Gatot Subroto	V		
	Jl. Jend. Sudirman	V		
	Jl. Sukarno Hatta	V		
	Jl.Amir Hamzah-Jl.R.E Martadinata	V		
	Jl.Rd.Mataher		V	
	JlKoi Pol M.Taher-Jl.Djamin Datuk Bagido-Jl.Brigjen Katamso		V	
	Jl.Rangkayo Hitam-Rangkayo Pinggai-Jl.Sentot Ali Basya		V	
	Jl. Prof. DR. Abd. Saleh - Jl. Adam Malik - Jl. Agus Salim - Jl. Basuki Rahmat	V		
	Jl. Multatuli - Jl. Let. Muda Sarniem - Jl. Lirik - Jl. Dharma Wangsa		V	
	Jl. K.H. Ahmad Dahlan - Jembatan Makalam		V	
	Jl. Sumbiyono - Jl. Dr. Mawardi		V	
	Jl. T.P. Sriwijaya - Jl. Sersan Anwar Bay		V	
Jl.Depati Parbo		V		
Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Yoenis Sanis - Jl. Roni Sani		V		
Jl. Purnama - Jl. Sunan Drajat -	V			

No	Program/Kegiatan	Implementasi		Keterangan
		Terwujud	Tidak Terwujud	
	Jl. Sunan Gunung Jati			
	Jl. Sari Bhakti		V	
6	Pembangunan Jalan Lingkar Utara		V	Sedang proses pematangan lahan
7	Pembangunan Fly Over Soedirman		V	
8	Perluasan Bandar Udara STS	V		
9	Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel dan Tower Bersama	V		
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan DAS	V		Terlaksana namun belum optimal
11	Peningkatan Kapasitas Produksi IPA Tanjung Sari	V		
12	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase	V		Terlaksana namun belum optimal
13	Pengembangan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Arteri dan Kolektor	V		Terlaksana, namun belum seluruhnya
14	penghijauan dan pembangunan jalan inspeksi pada sempadan sungai		V	
15	pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Primer yang berfungsi sebagai RTH Kota	V		Terlaksana, namun belum seluruhnya
16	Pengembangan taman kota	V		Baru sebatas penataan, belum menambah ruang baru
17	Pengembangan Hutan Kota	V		Terlaksana, namun belum seluruh target
18	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kepadatan Tinggi	V		
19	Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran	V		
20	Pembangunan Kolam Retensi di Jambi Timur, Telanaipura, Kota Baru		V	Masih terkendala pengadaan lahan

### Aspek Pengendalian Ruang Kota

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, dapat juga diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang secara umum lebih ditekankan pada tahap pra Pembangunan fisik, dalam hal ini adalah konteks perizinan. Untuk mewujudkan kesesuaian ruang dengan regulasi yang diatur dalam rencana tata ruang, pasca terbitnya undang-undang Cipta Kerja, perizinan harus terlebih dahulu melalui tahapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

### I. Pengendalian Melalui KKPR

Untuk Kota Jambi, dikarenakan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terkoneksi dengan *Online Single Submission (OSS)*, maka KKPR yang dilaksanakan adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). PKKPR dilaksanakan terhadap permohonan KKPR melalui rapat pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FPR) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi.

Jumlah permohonan KKPR di Kota Jambi sebanyak 75 permohonan, terdapat 27 permohonan belum divalidasi dan yang sudah selesai baru 19 permohonan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel 2.44**  
**Rekapitulasi KKPR di Kota Jambi**

Permohonan	Belum di Validasi	Permohonan Dikembalikan	Menunggu Pembayaran	SPS Expired	SPS sudah dibayar	Sudah Inspoksi Lapangan	Sudah selesai
75	27		2	12	2	13	19

Sumber: GISTARU, 2023.










Gambar 2.50  
Salah satu kegiatan rapat permohonan KKPR










### II. Pengendalian Melalui Kegiatan Pengawasan









Selain melalui KKPR, kegiatan pengendalian tentu perlu ditunjang dengan kegiatan pengawasan dilapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi kesesuaian dokumen rencana Pembangunan dengan implementasi

pembangunan di lapangan, juga untuk pengawasan terhadap bangunan yang tidak didahului dengan perizinan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.45**  
**Kegiatan Pengawasan di Lapangan**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Dokumentasi
1	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Ruko)	JL. Marsda Surya Dharma RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Bawah	
2	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Ruko)	JL. Marsda Surya Dharma Kelurahan Kenali Asam Bawah	
3	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Ruko)	Jl. Adam Malik	
4	Hunian	JL. Depati Purbo Kel. Pematang Suluur Kec. Telanaipura	
5	Bangunan Perdagangan dan Jasa (Ruko)	JL. Yulius Usman Kel. Pematang Suluur Kec. Telanaipura	
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL. Pattimura Simp. IV Sipin Kel. Simp. IV Sipin Kec. Telanaipura	
7	Rumah Deret	JL. Kenali Jaya Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Dokumentasi
8	Hunian	JL.Kebun Daging RT.33 Kel.Mayang Mangurai	
9	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Syailendra Kel.Rawa Sari Kec.Kota Baru	
10	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Letmud Saraniem Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kota Baru	
11	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Singadikane RT.22 Kel.Sungai Putri Kec.Danau Sipin	
12	Hunian	JL.Gajah Mada RT.36 Kel.Lebak Bandung Kec.Jelutung	
13	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Simp.Surya Kel.Kebun Handil Kec.Jelutung	
14	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.H.Adam Malik RT. 19 Kel.The Hok Kec.Jambi Selatan	
15	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.Widuri II RT.31 Kel.Paal Lima Kec.Kota Baru	
16	Bangunan Perdagangan dan Jasa	JL.H.Kamil RT 10 Kelurahan Wijaya Pura Kec.Jambi Selatan	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Dokumentasi
17	Hunian	Lorong Komering Jaya	
18	Bangunan Perdagangan dan Jasa	Jl.Patimura RT.02 Kel.Kenali Besar Kec.Alambarajo	
19	Penertiban/pembongkaran	Pasar Paal IX Kel.Kenali Asam Bawah Kec.Kota Baru	
20	Penertiban/pembongkaran	Jl.RB.Siagian Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan	
21	Bangunan Perdagangan dan Jasa	Jl.Slamet Riyadi RT 20 Kel.Legok Kec.Danau Sipin	
22	Bangunan Perdagangan dan Jasa	Jl.Jendral Sudirman Kel.Talang Jauh Kec.Jelutung	
23	Hunian	JL.Platur Purnama Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Baru	
24	Hunian	JL.RD.Abdurrahman RT.34 Kel.Kenali besar Kec.Alam Barajo	

## C. Penyediaan Air Minum

### 1. Jaringan Perpipaan

Sistem penyediaan air minum merupakan kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Kota Jambi memiliki sistem penyediaan air minum yang menyebarkan air minum ke beberapa kecamatan, dan pelayanan ini didominasi dan dikelola oleh PDAM Tirta Mayang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.46**  
**Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pelanggan (SR)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)*	Persentase (%)**
1	Telanaipura	49.720	9.483	47.415	95%
2	Kota Baru	83.381	17.043	76.694	92%
3	Jelutung	59.744	11.995	59.975	100%
4	Pasar Jambi	11.147	3.529	10.587	95%
5	Jambi Timur	66.925	10.569	52.845	79%
6	Jambi Selatan	57.515	7.431	37.155	65%
7	Danau Teluk	13.009	2.021	10.105	78%
8	Pelayangan	13.050	2.121	10.605	81%
9	Danau Sipin	43.734	8.089	40.445	92%
10	Alam Barajo	113.146	15.720	78.600	69%
11	Paal Merah	108.182	6.005	30.025	28%
12	PKS.Sei Gelam		150		
<b>Jumlah</b>		<b>619.553</b>	<b>94.156</b>	<b>454.451</b>	<b>79,45%</b>

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023

\*)Asumsi 1 SR = 5 Jiwa

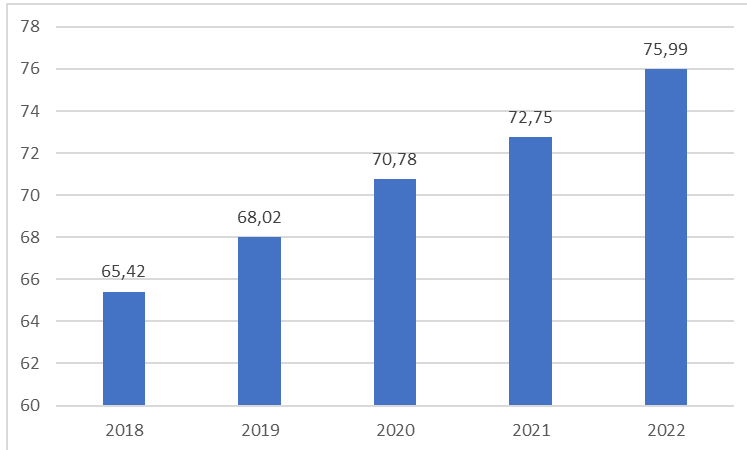
\*\*\*)Hasil Pengolahan Data

Persentase jumlah sambungan rumah air minum di Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 79,45%. Apabila dibandingkan dengan target nasional (91,05%), realisasi persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang dikelola secara aman masih terdapat gap sebesar 15,06%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.47**  
**Persentase Jumlah Sambungan Rumah Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Sambungan Rumah (Jiwa)	Persentase (%)
2018	78.259	65,42
2019	82.269	68,02
2020	85.809	70,78
2021	89.066	72,75
2022	94.156	75,99

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023



Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023.

**Gambar 2.41**  
**Grafik Persentase Sambungan Rumah yang terlayani PDAM**  
**di Kota Jambi Tahun 2022**

Saat ini, kapasitas terpasang PDAM Tirta Mayang Kota Jambi adalah 1.900 l/detik, sedangkan Kapasitas operasional saat ini sebesar 1.303 l/detik yang dioperasikan secara kombinasi dengan pemompaan dan gravitasi, dan 597 L/dt lainnya belum terpakai.

- **Unit Air Baku**

Sumber air baku yang digunakan PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi berasal dari Sungai Batanghari terbagi menjadi 4 zona pelayanan:

- a) Zona 1 untuk pelayanan Kec Danau Teluk dan Pelayangan dengan titik penyadapan air baku berlokasi di intake pasir panjang dan intake tanjung johor dengan pengolahan di IPA Pasir Panjang dan Tanjung Johor.
- b) Zona 2 untuk pelayanan Kec Alam Barajo, Telanipura dengan titik penyadapan air baku berlokasi di Intake Aurduri dengan pengolahan di IPA Aurduri 2, IPA Aurduri 3, dan IPA Perumnas Aurduri.
- c) Zona 3 untuk pelayanan Kec Danau Sipin, Jambi Selatan, Jelutung, Kota baru, Paal Merah, dan Pasar Jambi dengan titik penyadapan air



baku di intake pulau pandan dengan pengolahan di IPA Broni 1 dan IPA Broni 2.

- d) Zona 4 untuk pelayanan Kec Jambi timur dengan titik penyadapan air baku berlokasi di Intake Sijinjang dengan pengolahan di IPA Tanjung sari 1 dan 2.

- **Unit Produksi**

Penyelenggaraan penyediaan air minum perpipaan di Kota Jambi dimulai sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1928. Staadfonds atau Pemerintah Kota pada waktu itu mendirikan waterleiding bedrijf dengan kapasitas 7 liter/detik, selanjutnya dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Jambi No. 25/X/1974 tanggal 27 Maret 1974 ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).



**IPA Benteng, 1953**



**Gambar 2.51**

**IPA Benteng, 2023**

- a. Tahun 1975-1976, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Benteng (1928) yang dibangun dengan kapasitas 7 liter/detik ditingkatkan secara bertahap dari kapasitas 26 liter/detik menjadi 42 liter/detik.
- b. Tahun 1978–1983, Proyek Lima Kota yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia membangun SPAM di Kota Jambi. Salah satu kegiatan proyek tersebut membangun IPA Broni dengan kapasitas 300 liter/detik dan mulai dioperasikan tahun 1982, dan membangun IPA Jambi Seberang dengan kapasitas 10 liter/detik. Sejak saat itu IPA Benteng dihentikan operasinya, karena

kelebihan produksi dari IPA Broni, selain kondisi teknis IPA Benteng yang sudah rusak.

- c. Tahun 1989–1993, Proyek *Sumatera Secondary Cities Urban Development Project* (SSC-UDP) yang didanai dari pinjaman RDI dan sebagian hibah APBN, ditujukan untuk mengoperasikan kembali IPA Benteng dengan *up-rating* menjadi 220 liter/detik dan mengembangkan jaringan distribusi untuk melayani wilayah Tengah dan Timur Kota Jambi diantaranya kecamatan Jelutung, Pasar, Jambi Timur dan Jambi Selatan.
- d. Tahun 1997–1998, proyek kerjasama/kemitraan PDAM dengan Pihak Swasta mengembangkan SPAM di Wilayah Barat Kota Jambi, khususnya Kecamatan Telanaipura dan Kota Baru dengan membangun IPA Aurduri kapasitas 100 liter/detik dan jaringan pipa induk distribusi.
- e. Tahun 1997–2000, Proyek *Sumatera Urban Development Sector Project* (SUDSP) merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas IPA Broni menjadi 600 liter/detik, dan pembangunan reservoir kapasitas 750 m<sup>3</sup> yang berlokasi di Jl. M. Kukuh Kecamatan Kota Baru.
- f. Tahun 2005, pembangunan booster pump kapasitas 10 liter/detik yang berlokasi di Tanjung Pasir Jambi Kota Seberang ditujukan untuk memperbaiki pendistribusian air kepada pelanggan di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.
- g. Tahun 2006, pembangunan pipa induk di Jambi Kota Seberang dan Kota Baru (daerah Mayang Mengurai) melalui bantuan proyek APBD 2006 Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan pelayanan air minum.
- h. Tahun 2007, pembangunan reservoir kapasitas 500 m<sup>3</sup> pada lokasi Mayang Mengurai yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperluas jaringan di wilayah Kecamatan Kota Baru. Tahun 2009, pembangunan reservoir dengan kapasitas 150 m<sup>3</sup>. Tahun

2013, pembangunan Intake Sijinjang dan IPA Tanjung Sari dengan kapasitas 100 liter/detik.

Saat ini kapasitas terpasang PDAM Tirta Mayang sebesar 1.900 liter/detik dengan kebutuhan pelanggan sebesar (130-140) liter/orang/hari atau rata-rata (23-25) m<sup>3</sup>/bulan/SR, sedangkan kapasitas produksi nyata saat ini 1.303 liter/detik. Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Tirta Mayang adalah Sungai Batanghari, diolah melalui 7 unit IPA .

Proses pengolahan yang ada pada seluruh IPA tersebut merupakan proses pengolahan lengkap yakni :

- Koagulasi (proses pencampuran bahan kimia)
- Flokulasi (proses pengikatan koloid (butir-butir penguruh) oleh bahan kimia)
- Sedimentasi (proses pemisahan koloid (butir penguruh))
- Filtrasi (proses penyaringan)
- Klorinasi (proses penghilangan bakteri dari air terolah)

**Tabel 2.47**  
**Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi**

No.	Unit	Kap. Terpasang (L/S)	Kap. Produksi (Kemampuan) (MAX) (L/S)	Kap. Belum Terpakai (L/S)	Ket.
1	IPA Broni 1	600	300	300	Rusak
2	IPA Broni 2	600	600	0	
3	IPA Benteng	220	0	220	Rusak
4	IPA Tanjung Sari 1	100	80	20	
5	IPA Tanjung Sari 2	100	100	0	
6	IPA Aur Duri 1	100	50	50	Usia Teknis /Rusak
7	IPA Aur Duri 2	100	100	0	
8	IPA Aur Duri 3	100	100	0	
9	IPA Perumnas Aur Duri	20	20	0	
10	IPA Pasir Panjang	40	40	0	
11	IPA Tanjung Johor	20	14	6	
<b>Total</b>		<b>2.000</b>	<b>1.404</b>	<b>596</b>	

Sumber: PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023.

- **Unit Distribusi**

Tahun 2022, sistem perpipaan distribusi air bersih di yang dimiliki PERUMDA AIR MINUM Air Minum Kota Jambi Kota Jambi memiliki total sepanjang 1.373.899 m.

Tingkat kehilangan air/*Non Revenue Water* (NRW) PDAM Tirta Mayang Kota Jambi sampai tahun 2022 masih sangat besar yaitu sekitar 38,51 %.

**Tabel 2.49**  
**Tingkat Kehilangan Air PDAM Tirta Mayang Tahun 2022**

No	Uraian	Volume	Sat
1	Produksi Air	31.789.771	M <sup>3</sup>
2	Distribusi Air	30.866.001	M <sup>3</sup>
3	Konsumsi Air	19.003.603	M <sup>3</sup>
4	NRW	11.862408	M <sup>3</sup>
5	NRW	38,51	%

Sumber: PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023.

#### Permasalahan Pelayanan Air Minum Kota Jambi

a) Sumber

- Kekurangan air baku cenderung meningkat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, indikasi adanya pencemaran air sungai.
- Intake sering mengalami kesulitan dalam penyadapan air baku. Khususnya di Intake Sijinjang yang masih menggunakan jenis intake saluran, yaitu terganggunya pengaliran ke pintu masuk (inlet) intake, terutama pada musim kemarau karena terjadinya penumpukan sedimentasi.
- Kualitas dan tinggi muka air Sungai Batanghari fluktuatif, sehingga menyebabkan tingkat kesulitan yang relatif tinggi dalam mengolah air.

b) Pengolahan

- Menurunnya kinerja dan kapasitas operasi Instalasi Pengolahan Air.
- Kerusakan pada klariflokulator dan filter, serta menurunnya efisiensi dan debit pompa.

c) Transmisi – Distribusi

- Tingkat kehilangan air sebesar 38,51% pada tahun 2022.
- Cakupan pelayanan mencapai 80% untuk daerah perkotaan.

### Penyebab Permasalahan

- 1) Adanya penambangan emas tanpa izin (Peti) di Hulu Sungai Batanghari.
- 2) Fluktuasi muka Sungai Batanghari yang mencapai 1 m pada saat musim kemarau dan 8 meter pada hujan.
- 3) Sedimentasi Sungai Batanghari cukup tinggi.
- 4) Bila terjadi kemarau, di beberapa unit pengolahan mengalami penurunan kapasitas produksi.
- 5) Usia teknis peralatan mekanikal, elektrikal, peralatan pengolahan (tube settler keropos, filter), perpompaan dan pipa.
- 6) Kontinuitas operasi pelayanan yang belum mencapai 24 jam.
- 7) Unit pengolahan yang menggunakan sistem pengolahan lengkap belum dilengkapi/didukung oleh sarana yang lengkap.
- 8) Suhu air pada unit produksi tidak konstan.
- 9) Kapasitas pengolahan lengkap saat ini masih terbatas.
- 10) Jaringan pipa yang sudah melebihi umur ekonomis (sudah tua, rata-rata >20 tahun).
- 11) Kondisi jaringan pipa sudah banyak yang berada di badan jalan dan di bawah bangunan, sehingga kebocoran pipa tidak dapat terdeteksi.
- 12) Meter air pelanggan banyak yang sudah melebihi umur ekonomis (> 5 tahun), 15013 SR yang meter airnya belum diganti.
- 13) Belum adanya sistem zoning di daerah pelayanan yang menggunakan alat ukur.
- 14) Pemakaian air pada hidran kebakaran tidak dapat dideteksi karena tidak dilengkapi dengan *water meter*.
- 15) Adanya indikasi pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air.
- 16) Adanya indikasi sambungan ilegal terutama pada sambungan yang sudah dicabut.
- 17) Belum dimilikinya sarana pendeteksi kebocoran pipa.
- 18) Pada saat penggantian meter pelanggan, masih ditemukan meteran buram sehingga stan meter sulit terbaca.
- 19) Sebagian pipa asbes (ACP) masih dioperasikan.

Selain mengandalkan air minum perpipaan sebanyak 75,87% atau setara 94.006 SR, sisanya penduduk Kota Jambi mengandalkan air minum dari sistem nonperpipaan.

- a. Sistem non perpipaan eksisting, terdiri dari:
  - ❖ Sumur Gali dan Sumur Pompa,
  - ❖ Sumur Bor
  - ❖ Mobil Tangki Air
  - ❖ Air Hujan
- b. Permasalahan air minum sistem non perpipaan
  - Kontinuitas sumur gali didaerah selatan terganggu pada musim kemarau.
  - +30% sumur gali tidak memenuhi syarat kualitas bakteriologi karena tercemar.
  - *Lifetime* (usia pakai) sumur bor pendek, karena potensi air tanah dalam kecil.
  - Mobil tangki terbatas.

## 2. Sistem Bukan Jaringan Perpipaan Kota

Berdasarkan Permen PU Nomor 01 Tahun 2009 tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dimaksudkan dengan sistem bukan jaringan perpipaan kota adalah hidran umum, terminal air, mobil tangki air, penampungan air hujan, perlindungan mata air, sumur dalam, sumur pompa tangan, sumur gali, IPA sederhana, saringan rumah tangga, destilator surya atap kaca dan IPA *reserve osmosis*. Sistem Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang ada di Kota Jambi saat ini Sumur Gali Terbuka (SGL), Terminal Air (TA)/Hidran Umum (HU), Sumur Pompa Tangan Dangkal (SPT dk), Sumur Pompa Tangan Dalam (SPT dl), Penampungan Air Hujan (PAH) dan lainnya.

**Tabel 2.50**  
**Data Kumulatif Jumlah Sarana Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) per Kecamatan di Kota Jambi**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Parameter			
			Jenis	Jumlah	Jumlah Kk Terlayani	Tingkat Pelayanan (%)
1	Telanaipura	Putri Ayu	SGL	1.171	1.321	14,54
		Penyengat Rendah	SGL	198	224	4,78
		Simpang IV Sipin	SGL	2.854	3.218	37,69
2	Jambi Timur	Tanjung Pinang	SGL	3.127	3.526	40,48
		Payo Selincah	SGL	9.340	10.532	194,35
			TA/HU	6	7	0,13
		Talang Banjar	SGL	965	1.089	13,15
			TA/HU	1	2	0,02
3	Jambi Selatan	Pakuan Baru	SPT dk	330	373	3,92
			SGL	1.563	1.763	18,52
		Talang Bakung	SGL	10.388	11.713	91,73
		Paal Merah	SPT dl	115	130	1,14
			SGL	4.810	5.424	53,60
		Lingkar Selatan	SGL	16	19	0,43
4	Danau Teluk	Olak Kemang	SGL	113	128	3,92
5	Pelayangan	Tatul Yaman	SPT dl	323	365	10,96
			SGL	99	112	3,36
			PAH	53	60	1,80
6	Kota Baru	Kenali Asam Bawah	SPT dl	14	16	0,30
			SGL	2.787	3.143	59,08
			PAH	22	25	0,41
			Lainnya	2	4	0,08
		Rawasari	SPT dk	3.974	4.481	32,31
7	Jelutung	Lebak Bandung	SPT dk	9	11	0,08
			SGL	1.835	2.069	15,54

Sumber : RISPAM Kota Jambi, 2020

Keterangan : SGL (Sumur Gali Terbuka)

TA/HU (Terminal Air/Hidran Umum)

SPT dk (Sumur Pompa Tangan Dangkal)

SPT dl (Sumur Pompa Tangan Dalam)

PAH (Penampungan Air Hujan)

Lainnya (Jenis sarana air bersih selain daripada yang telah dijalankan)

#### D. Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah merupakan infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan. Kota Jambi memiliki beberapa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersebar di beberapa kecamatan.

Berdasarkan data Strategi Santiasi Kota (SSK) Kota Jambi dapat diketahui bahwa Kota Jambi memiliki persentase sanitasi layak sebesar 67,85% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat di kota Jambi masih minim dalam sanitasi yang dikelola secara aman. Untuk itu

masih dibutuhkan perhatian khusus Upaya meningkatkan sanitasi yang dikelola secara aman di Kota Jambi melalui program pemerintah.

**Tabel 2.51**  
**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang**  
**Menggunakan Sanitasi Secara Aman**  
**di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Tahun	Persentase (%)
2018	NA
2019	NA
2020	NA
2021	5,53
2022	5,75

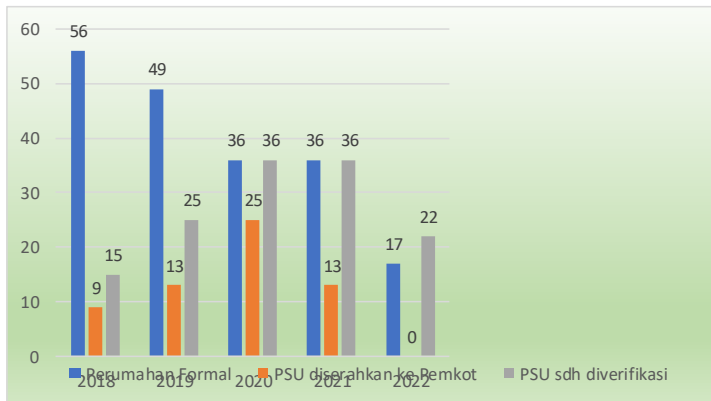
*Sumber: Laporan Tahunan DPUPR Kota Jambi, 2023.*

#### **2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.





Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023

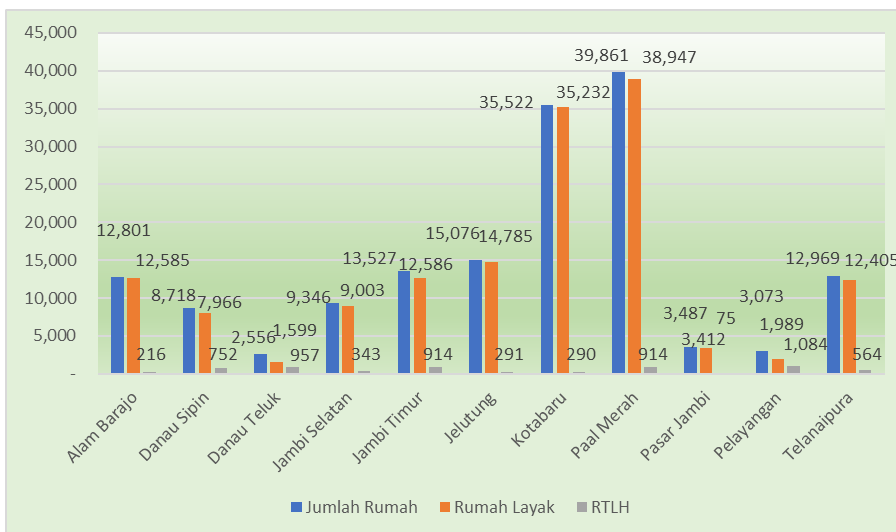
**Gambar 2.42**  
**Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal**

Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.43**  
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.44**  
Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2022

Berdasarkan yang disampaikan pada tahun 2022 jumlah RTLH sebanyak 6.427 unit dan telah dilaksanakan beberapa tahun. Prioritas lain dalam

pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi pada Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh dari 986,57 hektar. Dan pada tahun 2022 hasil Updating yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 147,7 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

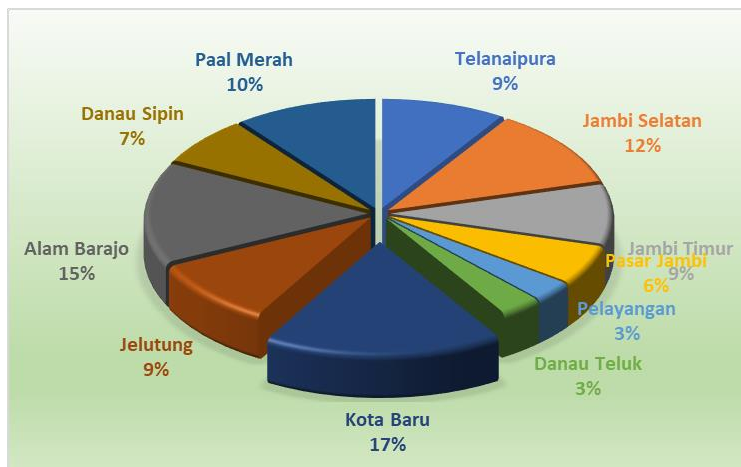
**Tabel 2.52**  
**Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2022 Berdasarkan SK Walikota**

NO	NAMA KAWASAN	KITERIA KEKUMUHAN (AWAL)	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	SISA LUAS (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam	Kumuh Ringan	10,06	0,00
2.	Kawasan Kumuh Beringin	Kumuh Ringan	23,02	2,45
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih – Sei. Asam	Kumuh Ringan	45,41	0,00
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung	Kumuh Ringan	3,71	0,00
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh	Kumuh Ringan	18,01	0,00
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru	Kumuh Ringan	13,93	0,00
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar	Kumuh Ringan	3,41	0,00
8.	Kawasan Kumuh Jelutung	Kumuh Ringan	27,03	0,00
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil	Kumuh Ringan	9,89	3,24
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya	Kumuh Ringan	4,12	0,00
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya	Kumuh Ringan	3,41	0,00
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas	Kumuh Ringan	2,60	2,60
13.	Kawasan Kumuh Legok	Kumuh Ringan	147,34	57,49
14.	Kawasan Kumuh Murni	Kumuh Ringan	14,04	0,00
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin	Kumuh Ringan	1,61	0,00
16.	Kawasan Kumuh Sejinjang	Kumuh Ringan	64,19	0,00
17.	Kawasan Kumuh Kasang	Kumuh Ringan	36,28	3,04
18.	Kawasan Kumuh Rajawali	Kumuh Ringan	29,41	19,71
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya	Kumuh Ringan	9,97	9,97
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari	Kumuh Ringan	51,72	6,97
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang	Kumuh Ringan	53,98	5,54
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman	Kumuh Ringan	55,13	0,00
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincah	Kumuh Ringan	8,79	8,79
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah	Kumuh Ringan	41,13	0,00
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali	Kumuh Ringan	14,16	0,00
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali	Kumuh Ringan	18,09	0,00
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sulur	Kumuh Ringan	36,16	0,00
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura	Kumuh Ringan	2,55	0,00
29.	Kawasan Kumuh Rawasari	Kumuh Ringan	7,29	7,29
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar	Kumuh Ringan	13,64	13,64
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete	Kumuh Ringan	6,97	6,97
32.	Kawasan Kumuh Jelmu	Kumuh Ringan	12,14	0,00
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut	Kumuh Ringan	31,10	0,00

NO	NAMA KAWASAN	KITERIA KEKUMUHAN (AWAL)	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	SISA LUAS (Ha)
34.	Kawasan Kumuh Tengah	Kumuh Ringan	14,26	0,00
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor	Kumuh Ringan	2,80	0,00
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang	Kumuh Ringan	70,54	0,00
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu	Kumuh Ringan	23,91	0,00
38.	Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang	Kumuh Ringan	54,78	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>986,57</b>	<b>147,7</b>

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini persentase titik lampu jalan yang telah terpasang pada tahun 2022 di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.45**  
**Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang Terpasang Tahun 2022 di Kota Jambi**

Dari total sebanyak 22.375 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energy (LED) kapasitas 120 watt sebanyak 274 titik dan kapasitas 60 watt sebanyak 1.350 titik. Untuk jumlah Tempat Pemakaman Umum yang ada di Kota Jambi yang merupakan tanggung jawab

urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2022 sebanyak 95 lokasi dengan luas sekitar 87.544 M<sup>2</sup>.

### 2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2022, jumlah personil Satpol PP 350 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1 : 1500, dengan jumlah penduduk ±606.200 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2022 adalah 186 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan sebanyak 3.

**Tabel 2.53**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	$\frac{350 \text{ orang}}{606.200 \text{ jiwa}}$	0,06
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	186	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.54**  
**Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum**  
**Di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggaran Perda	20	25	31		
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	20	25	31		
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100		
Jumlah Pelanggaran K3	621	579	109		
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	621	579	109		
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2023.

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan.

Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

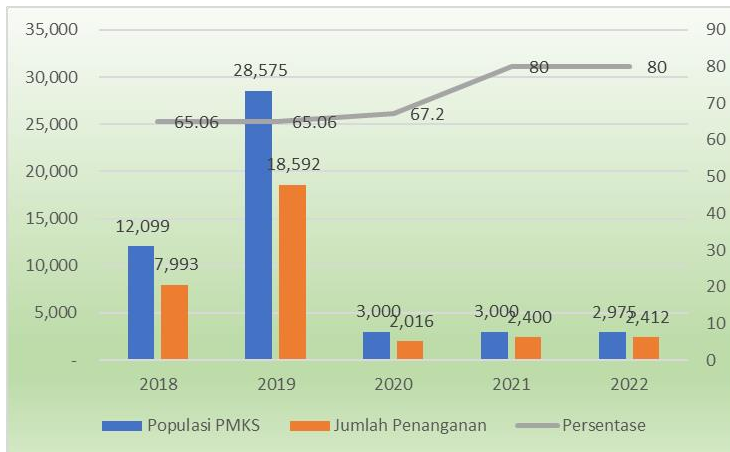
### 2.3.1.6 Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada

tahun 2022 sebanyak 1.699 orang lansia terlantar dan 1.489 lansia miskin, untuk tahun 2022 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 181 orang lansia mendapat bantuan APBN. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga di data sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 2.412 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang di dalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia.

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS dari tahun 2018-2022 berfluktuasi cenderung menurun dimana tahun 2018 sebanyak 12.099 orang menurun menjadi 2.975 orang pada tahun 2022, sementara jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 2.412 orang atau sekitar 80%.



Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

**Gambar 2.46**  
**Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

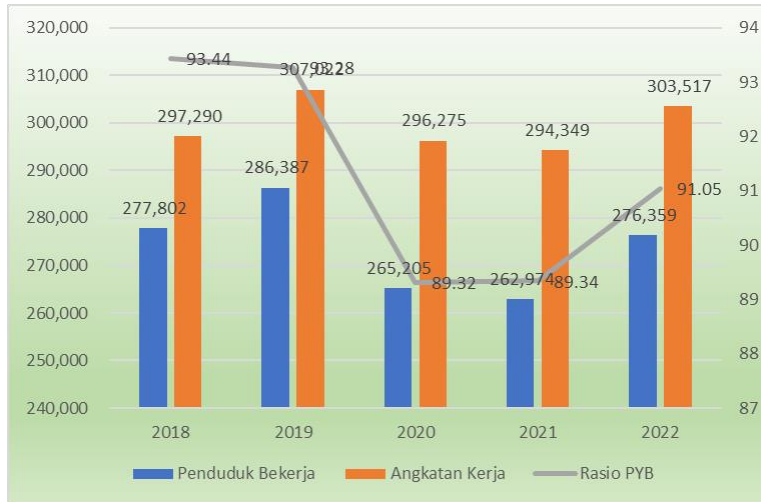
## 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

### 2.3.2.1 Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.

Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dari kurun waktu 2014-2016 dan pada tahun 2017 seiring dengan pembentukan perangkat daerah urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana gambar berikut.

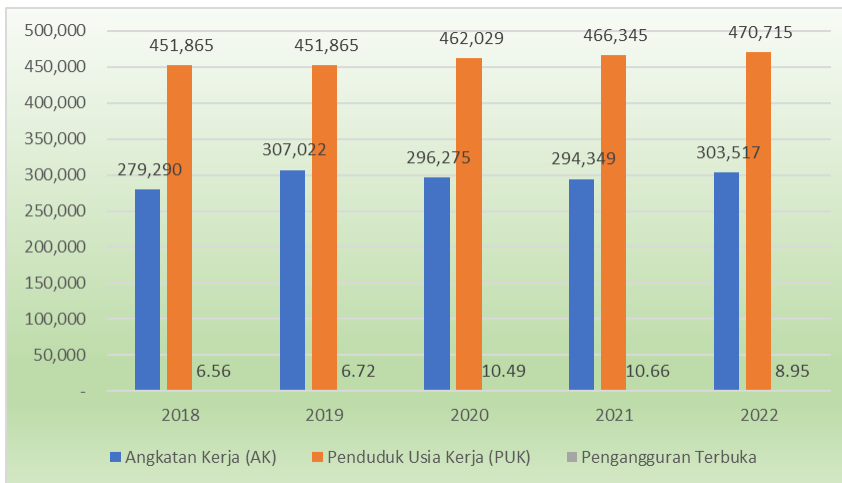




Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2023.

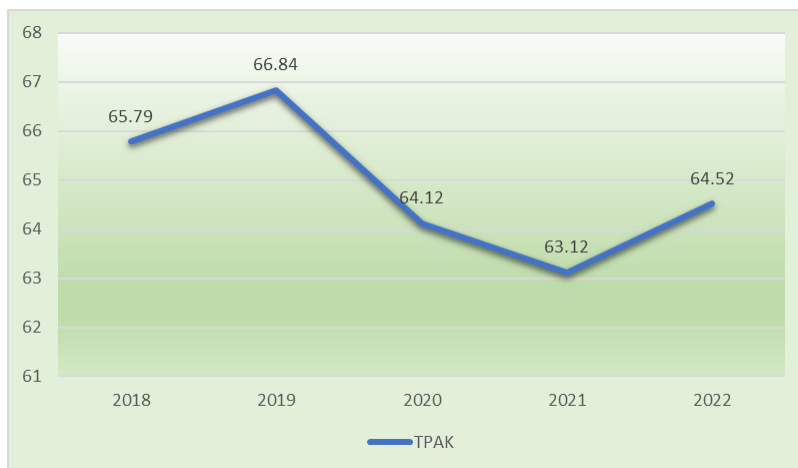
**Gambar 2.47**  
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Kondisi Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kota Jambi dapat di lihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.48**  
Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022.

**Gambar 2.49**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada tahun 2022 TPAK di Kota Jambi sebesar 64,52% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 63,12%, berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada tahun 2022.

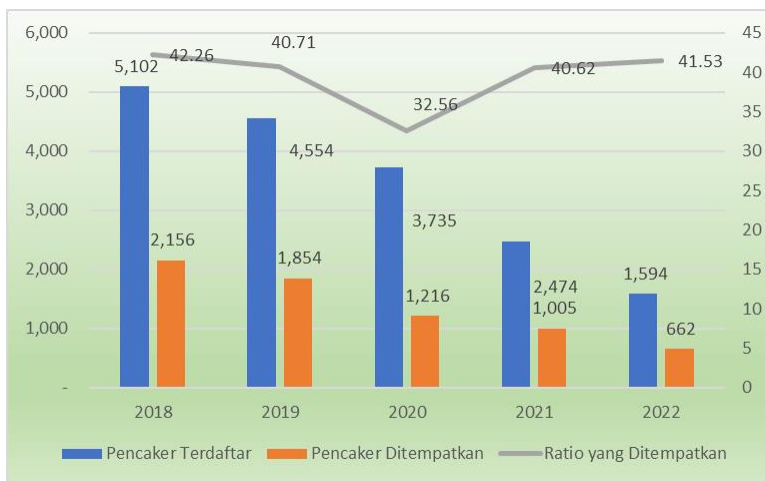
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2022 sekitar 8,95 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 8 orang merupakan pengangguran. TPT pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan aktifitas ekonomi kembali membaik pasca pandemi Covid-19 sehingga tenaga kerja bisa diserap.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.50**  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftarkan di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

**Gambar 2.51**  
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018-2022

Dari data tersebut tahun 2022 di Kota Jambi, rasio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 41,53 mengalami peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya sebesar 40,62, Membaiknya perekonomian pasca pandemi Covid-19 sehingga terbukanya kembali lapangan pekerjaan.

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2018-2022 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan setiap tahunnya bertambahnya jumlah Pegawai Negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara jumlah pegawai perempuan baru relatif kecil terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.55**  
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan	113.460	Dta	99.565	100.767	97.667
2	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4.315	4.376	4.020	3.893	3.643
3	Persentase	3,80 %	-	4,03%	3,86%	3,73%

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023 - BPS Kota Jambi 2023.

Disamping itu, selain dari perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu lima tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

**Tabel 2.56**  
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2017-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	113.460	Dta	99.565	100.767	97.667
2	Jumlah pekerja perempuan disektor swasta (orang)	53.065	Dta	49.521	8.045	7.183
3	Persentase	46.77 %	Dta	49,74	8,34	7,35

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023 dan BPS Kota Jambi 2023.

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2018-2022, persentase rata-rata perempuan yang bekerja mengalami peningkatan.

**Tabel 2.57**  
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	Dta	Dta	112.475	111.801	108.671
2	Jumlah Pekerja perempuan	Dta	Dta	99.556	100.767	97.667
3	Persentase	-	-	88,51%	90,13%	89,87%

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023 dan BPS Kota Jambi 2023.

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, dimana tahun 2018 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 85 kasus, meningkat pada tahun 2020 mencapai 130 kasus, namun terjadi penurunan kasus dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menjadi 111 kasus.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat kemudian menurun, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.



Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.52**  
**Pengaduan Perlindungan Perempuan**  
**Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

### 2.3.2.3 Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun

jenis pangan strategis antara lain : beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian. Situasi kemandirian pangan di Kota Jambi tahun 2022 dibuktikan dari segi ketersediaan Angka Kecukupan Energi (AKE) Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.005 kkal/kap/hari dari AKE yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 321 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 169,6 gr/kap/hari. Segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar deviasi *error* yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Survey Ekonomi Nasional. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut diasumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka *over supply* diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganeekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut

disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

**Tabel 2.58**  
**Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2022**

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	264,3	1.046	52,2	49,8	0,5	26,01	24,9	25,0	24,9
Umbi-umbian	53,3	54	2,7	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,2
Pangan Hewani	169,6	321	16,0	15,3	2,0	32,0	30,5	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	31,3	281	14,0	13,4	0,5	7,0	6,7	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	1,9	10	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	1,0	0,2
Kacang-kacangan	25,2	65	3,3	3,3	2,0	6,5	6,2	10,0	6,2
Gula	18,5	68	3,4	3,4	0,5	1,7	1,6	2,5	1,6
Sayur dan Buah	249,8	125	6,2	6,2	5,0	31,2	29,8	30,0	29,8
Lain-lain	61,1	34	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		<b>2.005</b>	<b>100,0</b>	<b>95,5</b>	<b>11,5</b>	<b>106,1</b>	<b>101,3</b>	<b>100</b>	<b>93,1</b>

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2022, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 93,1 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90. Hal ini menunjukkan telah beragamnya konsumsi pangan masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,2.

#### 2.3.2.4 Pertanahan

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 subbidang yaitu: 1) Pemberian izin lokasi; 2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; 6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) Pemberian izin



membuka tanah dan 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih di lakukan oleh BPN.

Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

**Tabel 2.59**  
**Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	614	614	614	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	295	295	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	48	48	48	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi, 2023.

Selain dari itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.60**  
**Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hak Milik	1.401	2.365	2.180	4.409	7.727
2.	Hak Guna Bangunan	341	720	1.560	1.656	1.533
3.	Hak Pakai	4	4	51	128	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

### 2.3.2.5 Lingkungan Hidup

#### A. Ketersediaan RTH Publik

RTH yang terdapat di Kota Jambi tersebar hampir diseluruh wilayah kecamatan yang ada. Secara umum, luas RTH publik di Kota Jambi diidentifikasi melalui interpretasi peta. Total luas RTH Publik di Kota Jambi hanya sekitar 12,67%, yang terdiri dari RTH Taman, RTH Pemakaman, dan RTH Hutan Kota. Luas masing-masing RTH tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.61**  
Luas RTH Publik di Kota Jambi

No.	Program	Luas RTH Publik (ha)	Perhitungan IHBI berdasarkan Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha)	%
1	RTH Tipologi A sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha) a. Rimba kota; b. Taman Kota; c. Taman Kelurahan;	266,41	679,65	4,01%
2	RTH Tipologi B sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha) a. Kawasan Perlindungan Setempat b. Kawasan Tanaman Pangan	2.633,49	1.111,91	6,54%
3	RTH Tipologi C sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 berupa ruang terbuka biru (ha)	949,91	189,98	1,12%
5	RTH Publik melalui kewajiban Penyediaan RTH Taman dan Pemakaman oleh pengembang perumahan		33,61	0,19%
6	Jalur Hijau Jalan		21,40	0,13%
7	Pemakaman		92,31	0,54%
Jumlah			2.128,56	12,67%

Sumber: Instansi Teknis Terkait dan Interpretasi Peta Citra Satelit, 2023.

#### 1) RTH Taman

RTH taman adalah merupakan RTH buatan dengan skala pelayanan kota ataupun kawasan. Sebaran RTH taman di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.62**  
RTH Taman di Kota Jambi

No	Nama Taman	Luas (M <sup>2</sup> )	Lokasi
1	Taman Tugu Makalam	38,46	Kec.Telanaipura
2	Taman PKK Murni	263	Kec.Telanaipura
3	Taman Simpang Pulai	464	Kec.Telanaipura
4	Taman Jaksa I	728	Kec.Telanaipura

No	Nama Taman	Luas (M <sup>2</sup> )	Lokasi
5	Taman Jaksa li	735	Kec.Telanaipura
9	Taman Ade Irma Suryani	120	Kec.Telanaipura
10	Taman Simpang Bi	388	Kec.Telanaipura
11	Taman Simpang Tanjung	210	Kec.Telanaipura
12	Taman Simpang Rumah Sakit Umum	82	Kec.Telanaipura
13	Taman Anggrek	25.056	Kec. Telanaipura
14	Taman Kirab Remaja	47	Kec. Kota Baru
15	Taman Arena Remaja	20.086	Kec. Kota Baru
16	Taman Tugu Juang	431,78	Kec. Kota Baru
17	Taman Batas Kota	160	Kec. Kota Baru
18	Taman Adipura	1298	Kec. Jambi Selatan
19	Taman Sekapur Sirih	68	Kec. Jambi Selatan
20	Taman PKK The Hook	1.210,25	Kec. Jambi Selatan
21	Taman Anjungan Kota	4000	Kec. Jambi Selatan
22	Taman Simpang Beringin	248	Kec. Jambi Selatan
23	Taman Simpang Tanjung Lumut		Kec. Jambi Selatan
24	Taman Simpang Jelutung	66	Kec. Pasar Jambi
25	Taman TP. Sriwijaya	452,16	Kec. Pasar Jambi
26	Taman Aur Duri	140,87	Kec. Danau Teluk
27	Taman Sanggar Batik	1.147,13	Kec. Pelayangan
28	Taman Lingkungan Perumnas	1.554	Kec. Jelutung
<b>Total</b>		<b>32.345,19</b>	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021.



Gambar 2.53  
Taman Arena Remaja



Gambar 2.54  
Taman Angrek



Gambar 2.55  
Taman Jaksa



Gambar 2.56  
Taman Tugu PKK

Selain taman lingkungan ataupun kawasan yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota seperti yang tertuang didalam tabel diatas, juga banyak terdapat taman lingkungan ataupun kawasan yang diwujudkan oleh swasta terutama oleh developer. Taman ini diwujudkan melalui taman perumahan. Beberapa taman perumahan yang telah diinventaris oleh Pemerintah Kota Jambi melalui instansi teknis terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.63**  
**RTH Taman Perumahan di Kota Jambi**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Total Unit Rumah			Luas Lahan Efektif Perumahan	Luas Kavling Efektif	PSU Luas RTH (M <sup>2</sup> )	
		MBR	NON MBR	Toko / Ruko				Total
1	Alam Berajo	7,308	2,205	119	9,632	1,781,834.47	1,131,337.48	134,345.19
2	Danau Sipin	12	32		44	8,911.00	6,020.07	535.83
3	Danau Teluk				0			
4	Jambi Selatan	352	285	25	662	119,058.00	82,529.14	5,418.90
5	Jambi Timur		14		14	1,909.00	1,091.00	416.00
6	Jelutung		78		78	14,984.00	10,939.50	522.00
7	Kota Baru	4,986	1,989	165	7,14	1,210,497.08	779,389.14	91,059.33
8	Paal Merah	2,151	944	218	3,313	557,120.10	368,062.68	37,174.90
9	Pasar Jambi				0			
10	Pelayangan				0			
11	Telanaipura	574	359	57	990	170,728.00	117,770.80	10,477.20
<b>Total</b>		<b>15,383.00</b>	<b>5,906.00</b>	<b>584</b>	<b>21,873.00</b>	<b>3,865,041.65</b>	<b>2,497,139.81</b>	<b>279,949.35</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi 2021.



**Gambar 2.57**  
**Taman Perumahan**

2) RTH Rimba Kota

Rimba kota disediakan dengan tujuan sebagai peyangga lingkungan kota dan berfungsi untuk: memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Saat ini, terdapat 2 (dua) hutan kota dan 1 (satu) areal lahan yang direncanakan untuk difungsikan sebagai hutan kota di Kota Jambi. 1 (satu) hutan kota yang sudah terbentuk dan berfungsi pada saat ini di Kota Jambi adalah Hutan Kota M.Sabki yang terdapat di Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru dengan luas sekitar 11 (sebelas) hektar dan Hutan Kota (Hutan Pinus) di Kelurahan Bagan Pete. 1 (satu) areal lagi akan difungsikan sebagai RTH Hutan Kota ketiga ini memiliki luas sekitar 41 ha dari 90 ha luas lahan yang direncanakan, areal ini terdapat di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru.



Gambar 2.58  
Hutan Kota

### 3) Jalur Hijau Jalan

Jalur hijau jalan dapat berupa median jalan ataupun pulau jalan dimana dalam konteks RTH berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, kebisingan, pemecah angin, pembatas pandangan, dan dapat juga berfungsi sebagai penahan lampu kendaraan bagi kendaraan yang berlawanan arah. Ruas jalan jalan yang memiliki jalur hijau jalan di Kota Jambi secara umum adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan arteri dan jalan kolektor.

**Tabel 2.64**  
**RTH Jalur Hijau Jalan**

No	Nama Jalan	Lokasi	Panjang (M)
1	Jln. Soekarno Hatta	Kec. Jambi Selatan	1.450,00
2	Jln. Jend. Sudirman	Kec. Jambi Selatan	2.244,00
3	Jln. Pangeran Diponegoro	Kec. Jelutung	1.235,00
4	Jln. KH. Hasyim Asyari	Kec. Jambi Timur	680,00
5	Jln. Sultan Thaha	Kec. Jambi Timur	1.450,00
6	Jln. Rd. Pamuk	Kec. Jambi Timur	1.234,00
7	Jln. Slamet Riyadi	Kec. Telanaipura	2.057,00
8	Jln. Yusuf Singadikane	Kec. Telanaipura	800,00
9	Jln. RE. Marta Dinata	Kec. Telanaipura	430,00
10	Jln. Jend. Ahmad Yani	Kec. Telanaipura	770,00
11	Jln. Bakarudin	Kec. Telanaipura	680,00
12	Jln. Patimura	Kec. Kotabaru	3.437,00
13	Jln. Hutan Kota	Kec. Kotabaru	1.500,00
14.	Jln. MTQ	Kec. Jambi Selatan	860,00
15.	Jln. Jend. Basuki Rahmat	Kec. Kota Baru	620,00
16.	Jln. Arief Rahman Hakim	Kec. Telanaipura	1.100,00
17.	Jln. Abdul Manaf	Kec. Telanaipura	600,00
18.	Jln. Mayjen Sutoyo	Kec. Telanaipura	250,00
<b>Total</b>			<b>21.397</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021.

**Tabel 2.65**  
**RTH Pulau Jalan**

No	Nama Jalan	Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
1	Sekapur Sirih	Kec. Jambi Selatan	68
2	Simpang Jelutung	Kec. Jelutung	66
3	Tp. Sriwijaya	Kec. Pasar Jambi	452,16
4	Taman Simpang Ppt	Kec. Telanaipura	52
5	Taman Honda	Kec. Telanaipura	125
6	Taman Tugu Juang	Kec. Telanaipura	200
7	Taman Kirab Remaja	Kec. Jelutung	47
8	Taman Tugu Jam	Kec. Jelutung	1074,66
<b>Total</b>			<b>2.085</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021.





Gambar 2.59  
RTH Jalur Hijau Jalan

4) Jalur Hijau Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Sungai yang melintasi wilayah administrasi Kota Jambi adalah Batanghari dan 7 (tujuh) SubDAS, meliputi :

1. DAS Kenali Kecil dengan panjang sungai 10,68 Km
2. DAS Kenali Besar dengan panjang sungai 13,79 Km
3. DAS Kambang dengan panjang sungai 43,04 Km
4. DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km
5. DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km
6. DAS Sijenjang/Lubukraman dengan panjang sungai 8,37 Km
7. DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km

Pertimbangan penetapan jalur hijau sempadan sungai di Kota Jambi antara lain:

- a. Seluruh aliran sungai yang mengalir di wilayah administratif Kota Jambi termasuk dalam kriteria sungai di kawasan perkotaan.
- b. Tanggul sungai hanya terdapat di aliran Sungai Batanghari dan panjang tanggul yang ada tersebut tidak sampai 10% dari panjang badan sungai sehingga dianggap tidak ada tanggul.
- c. Distribusi kedalaman Sungai Batanghari adalah lebih dari 3 (tiga) meter.
- d. Dengan demikian untuk aliran Sungai Batanghari secara keseluruhan dianggap sebagai aliran sungai tidak bertanggung di kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 m – 20 m sehingga penetapan sempadan sungai sekurang – kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- e. Garis sempadan sungai tidak bertanggung didalam dan diluar kawasan perkotaan diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

- f. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

Berdasarkan intepretasi peta citra satelit, tidak seluruh area yang seharusnya berfungsi lindung disempadan sungai terjaga dari kegiatan pembangunan fisik. Tabel berikut akan menjelaskan kondisi pemanfaatan lahan sempadan sungai di Kota Jambi.

**Tabel 2.66**  
**Kondisi Pemanfaatan Lahan**  
**di Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Jambi**

Fungsi Rencana	Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Sempadan Sungai	Belukar	4,00
	Hutan	2,86
	Industri dan Pergudangan	0,20
	Pemakaman	1,66
	Pendidikan	0,06
	Perdagangan dan Jasa	4,22
	Perkantoran	0,41
	Permukiman	50,43
	Pertahanan dan Keamanan	0,04
	Sawah	8,40
	Tanah Kosong	16,36
	Tegal/Ladang	103,20
	Tubuh Air	19,60
	Wisata	0,03
<b>Total</b>		<b>211,49</b>

Sumber: Intepretasi Peta Citra Satelit, 2023.





Gambar 2.60  
Pemanfaatan ruang di sempadan sungai

5) RTH Sempadan Danau

Setidaknya terdapat 4 (empat) danau diwilayah Kota Jambi, yaitu Danau Sipin, Danau Teluk Kenali, Danau Teluk, dan Danau Kiambang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, sempadan danau ditetapkan 50 (limapuluh) meter dari tepi danau yang diukur pada kondisi muka air tertinggi. Jika berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam PP 38/2011 tersebut, maka luas sempadan danau di Kota Jambi seharusnya adalah sekitar 360 ha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kawasan sempadan Danau Sipin dengan luas 161 Ha (seratus enam puluh satu hektar)
- b. Kawasan sempadan Danau Teluk Kenali dengan luas 45 Ha (empat puluh lima hektar)
- c. Kawasan sempadan Danau Teluk dengan luas 54 Ha (lima puluh empat hektar)
- d. Kawasan sempadan Danau Kiambang dengan luas 40 Ha (empat

puluh hektar).

Sama halnya dengan sempadan sungai, lahan disempadan danau juga tidak sepenuhnya berfungsi lindung atau non terbangun. Penggunaan lahan disempadan danau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.67**  
**Kondisi Pemanfaatan Lahan**  
**di Kawasan Sempadan Danau Di Kota Jambi**

Fungsi Rencana	Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Sempadan Danau	Belukar	4,98
	Hutan	59,78
	Kesehatan	0,01
	Perdagangan dan Jasa	0,97
	Perkantoran	0,04
	Permukiman	24,95
	Sawah	0,24
	Tanah Kosong	20,87
	Tegal/Ladang	55,64
	Tubuh Air	43,54
<b>Total</b>		<b>211,02</b>

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042, dan Interpretasi Peta Citra Satelit.

6) RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Luas lahan pemakaman di Kota Jambi saat ini sekitar 76,11 Ha. Luas ini merupakan luas terhadap lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun lahan pemakaman yang belum dikelola oleh pemerintah daerah. Secara umum, lahan pemakaman yang ada merupakan lahan yang sudah diperuntukan untuk pemakaman dari waktu yang sudah cukup lama.

**Tabel 2.68**  
**RTH Pemakaman di Kota Jambi**

No	Nama RTH	Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
	Kelurahan Sukakarya	RT. 1 Bumi Ayu I	3.000
		RT. 5 Bumi Ayu II / Bumi Ikhlas	12.282
		RT. 8 TPU Bumi Ayu	2.000
	Kel. Mayang Mangurai	RT. 35 TPU Pusara Agung	30.575
		RT. 22 Keluarga H. Jamari	5.000
		RT. 10 TPU Kebon Daging	10.000
		RT. 28 TPU Sakintang Dayo	16.800
	Kel. Bagan Pete	RT. 8 TPU Masyarakat Bagan Pete	5.000
		RT. 9 TPU Jln. Sari Bakti	2.500
		RT. 22 TPU Perum Permata Biru dan Pinang Merah	700
		Pemakaman dari Pengadaan Lahan Perumahan	1.500
	Kel. Kenali Besar	RT. 6 TPU Jln. Bersama	5.000
		RT. 8 TPU Jln. Pertamina	5.000
		RT. 25, 16 Perum Bougenville	10.000
		RT. 10 Jln. Anwar Bay	5.000
		Rt. 1 Jln. Yang. Raya	2.700
		RT. 16 TPU Amuntai	10.000
	Kel. Kenali Asam Atas	RT. 21 KEBON BOHOK	15.000
	Kel. Paal V	RT. 14 PAAL V	8.962
	Kel. Rawasari	RT. 13 TPU Kuburan Cina Jln. Patimura	24.000
		RT. 25 TPU Syailendra	100
		RT. 20 TPU Bagan Pete	10.000
	Kel. Kenali Asam Bawah	RT. 1 TPU Bumi Ayu	75.000
		RT. 5 TPU Wisma Loyo	50.000
		RT. 24 TPU Mutiara Hijau	20.000
	Kec. Telanaipura		
	Kel. Sungai Putri	TPU Putri Ayu	60.000
	Kel. Teluk Kenali	TPU RT. 3 Teluk Kenali	15.000
	Kel. Buluran Kenali	TPU RT. 5	8.000
		TPU RT. 7	3.000
		TPU RT. 12	7.000
		TPU RT. 13	2.000
		TPU RT. 14	10.000
	Kel. Penyengat Rendah	TPU RT. 1 Penyengat Rendah	10.000
		TPU Alsaihun RT. 3 Kampung Bugis	5.000
		TPU RT. 8 (TPU RT.3 – RT.10)	15.000
		TPU RT. 9 (Habib)	
		TPU RT. 11, 12 Kasang Gelagang	10.000
		TPU Kasang Gelagang (Rt.13,14,15,16,17, 19, 20, 26, 27,28)	2.000
		TPU RT. 24 Kampung Bugis	1.500
TPU RT. 24 Kampung Bugis	1.500		
	Kel. Selamat	TPU Kel. Selamat	10.000
	Kel. Solok Sipin	TPU Singkawang	20.000
	Kec. Jambi Timur		
	Kel. Kasang Jaya	TPU RT. 1 Kasang Jaya	20.000
		TPU RT. 6 Kasang	500
	Kel. Tanjung Sari	TPU RT. 6 Jl. Kerajaan Melayu	20.000
	Kel. Sijenjang	TPU RT. 2 Sijenjang	500
		TPU RT. 3 Jl. Rd. Fatah	1.500
		TPU RT. 6	500
		TPU RT. 8 Jl. Rd. Fatah	500

No	Nama RTH	Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
	Kel. Payo Selincih	TPU RT. 20	975
		TPU RT. 24 JL. Gunung Semeru	500
	Kel. Talang Banjar	TPU RT. 32 JL. Pangeran Antasari	10.000
	Kel. Tanjung Pinang	TPU RT. 33 Tanjung Pinang	500
		TPU RT. 13 Tanjung Pinang	500
	Kel. Thehok	TPU RT. 9 Sukorejo	20.060
		TPU RT. 25 Thehok	1.700
	Kel. Talang Bakung	TPU RT. 20 Talang Sari	20.000
		TPU RT. 10 Lrg. Makmur	10.000
		TPU Lrg. RT. 34 Mahkamah 1	10.000
		TPU Lrg. RT. 36 Mahkamah 2	10.000
	Kel. Palmerah	TPU RT. 6 Jl. AR. Saleh	2.232
		TPU RT. 16 Komplek YUKA	1.989
		TPU Lrg. Anugerah	603
		TPU RT. 33 Sri Rahayu	12.000
	Kel. Lingkar Selatan	TPU RT. 22 Lrg. Mustika	500
		TPU RT. 12 Lrg. Pengadilan	10.000
		TPU RT. 1	500
	Kec. Jelutung		
	Kel. Jelutung	TPU RT. 50 Puncak	4.500
	Kel. Talang Jauh	TPU RT. 30 Talang Jauh	4.000
	Kel. Handil Jaya	TPU Kebon Jahe	5.232
	Kec. Pasar Jambi		
	Kel. Beringin	TPU Kebon Jahe	20.000
	Kec. Danau Teluk		
	Kel. Pasir Panjang	TPU RT. 2 Pasir Panjang	7000
		TPU RT. 3 Pasir Panjang	5000
		TPU RT. 5 Pasir Panjang	3000
	Kel. Tanjung Raden	TPU RT. 1 Tanjung Raden	1.330
		TPU RT. 8 Tanjung Raden	1.500
		TPU RT. 1 Tanjung Raden	1.200
	Kel. Tanjung Pasir	TPU RT. 3 Tanjung Pasir	1.200
	Kel. Olak Kemang	TPU RT. 10 Olak Kemang	4.500
		TPU RT. 8 Olak Kemang	2.000
	Kel. Ulu Gedong	TPU RT. 10	4.000
	Kel. Tengah	TPU RT. 4 Kampung Tengah	10.000
	Kel. Jelmu	TPU RT. 5 Jelmu	5.000
	Kel. Mudung Laut	TPU RT. 8 Datuk Sintai	5.000
	Kel. Arab Melayu	TPU RT. 7 Arab Melayu	25.000
	Kel. Tahtul Yaman	TPU RT. 1 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 2 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 3 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 4 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 5 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 6 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 7 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 8 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 9 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 10 Tahtul Yaman	10.000
	Kel. Tanjung Johor	TPU RT. 5 Raudatul Janah	8.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022.



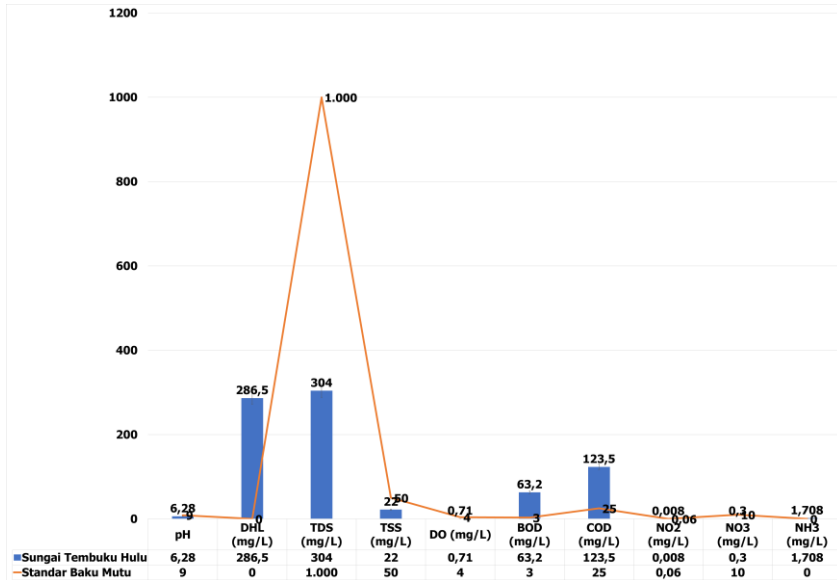
*Gambar 2.61  
RTH Pemakaman*

## **B. KUALITAS AIR**

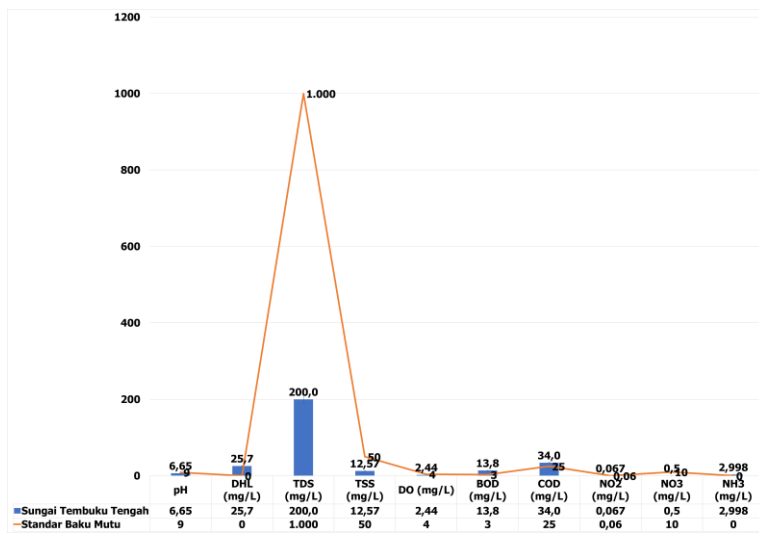
Sumberdaya air yang terdapat di Kota Jambi meliputi: sumberdaya air sungai, sumberdaya air danau, dan sumberdaya air tanah. Sumberdaya air sungai sendiri terdiri atas 2 (dua), yaitu: sumberdaya air Sungai Batanghari dan sumberdaya air SubDAS Batanghari yang terdiri dari 8 (delapan) Sub DAS, namun sumber daya air sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku adalah sumberdaya air Sungai Batanghari, yang merupakan sungai lintas provinsi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Berdasarkan kegiatan pemantauan kualitas air dimana beberapa informasi kualitas air dapat dilihat sebagai berikut:

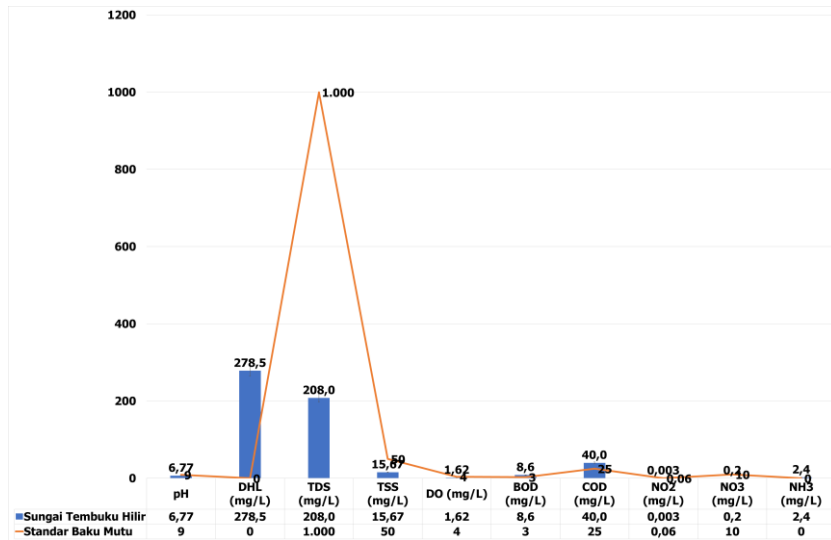




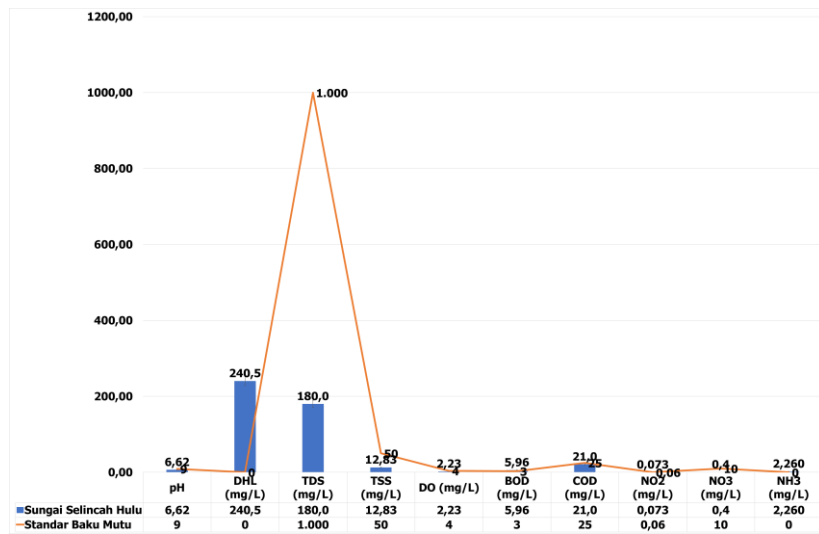
Gambar 2.62  
 Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hulu, Tahun 2022



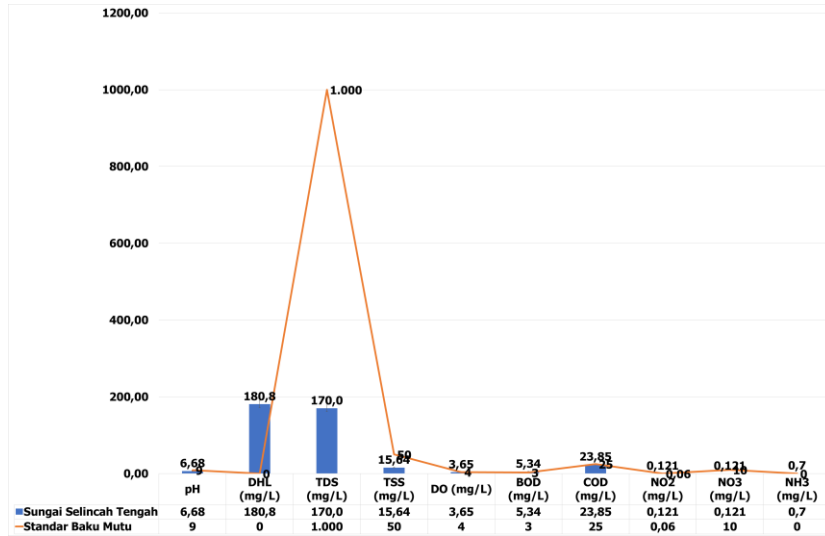
Gambar 2.63  
 Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Tengah, Tahun 2022



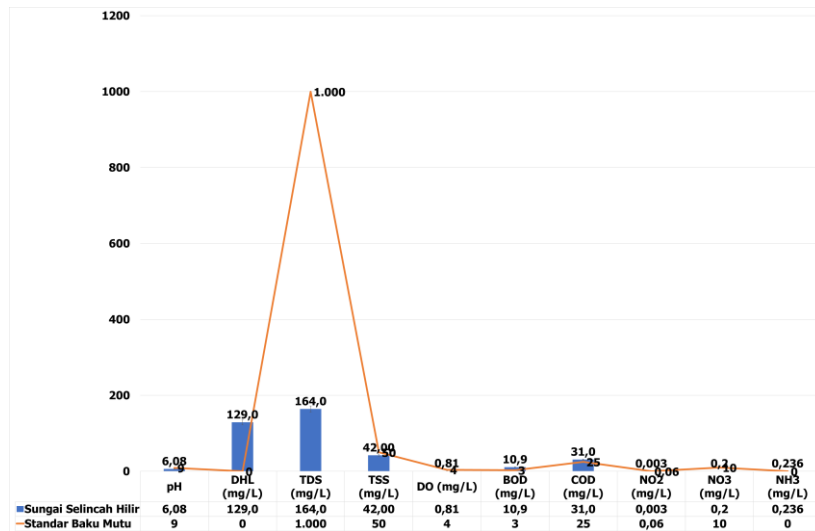
**Gambar 2.64**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hilir, Tahun 2022**



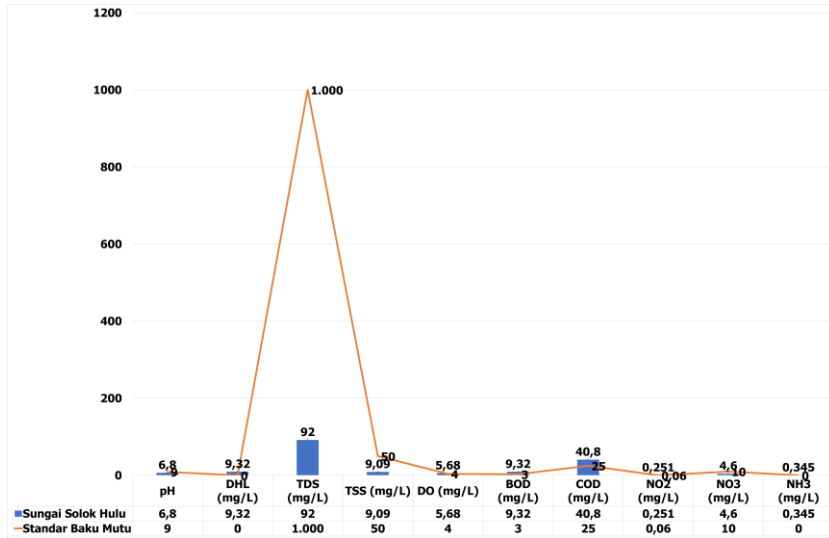
**Gambar 2.65**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Hulu, Tahun 2022**



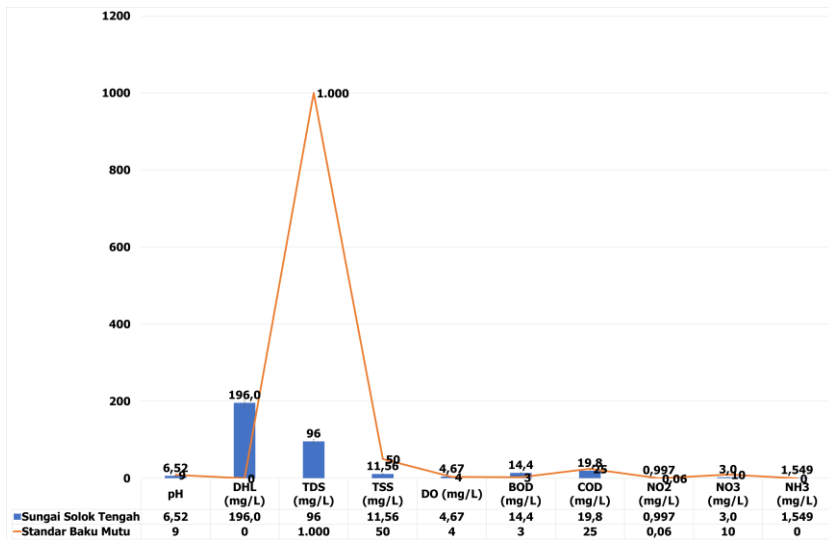
Gambar 2.66  
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincih Tengah, Tahun 2022



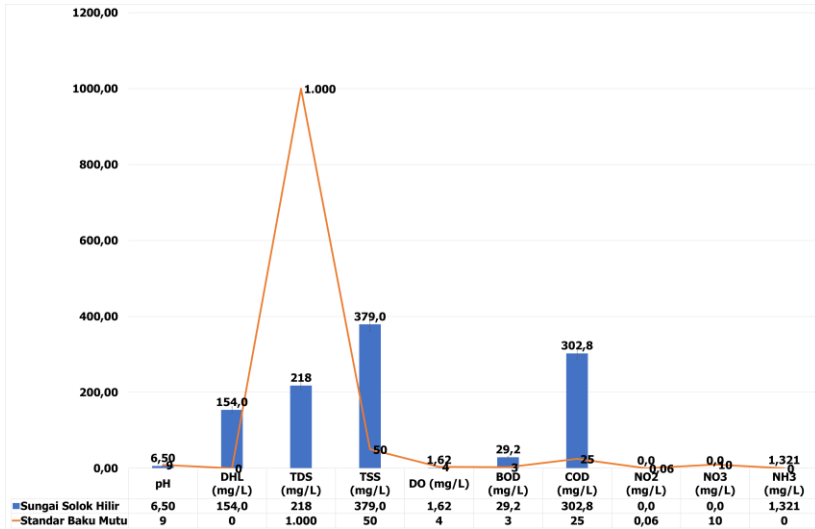
Gambar 2.67  
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincih Hilir, Tahun 2022



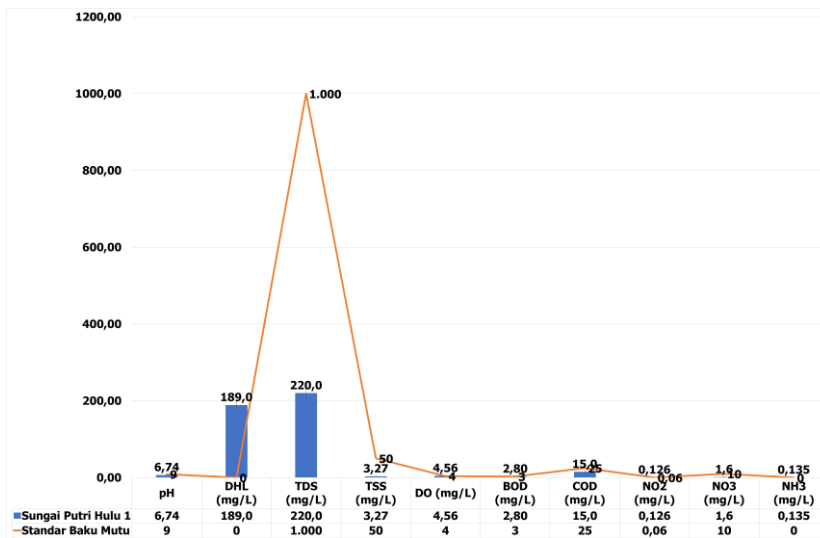
**Gambar 2.68**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hulu, Tahun 2022**



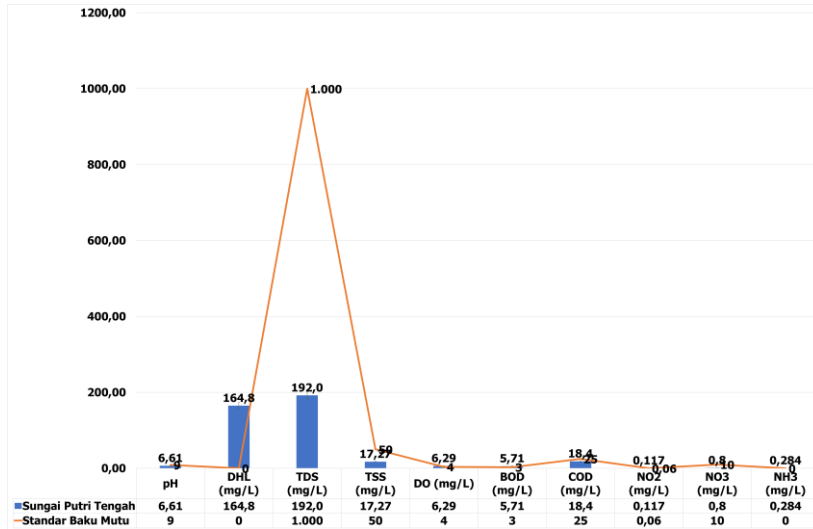
**Gambar 2.69**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Tengah, Tahun 2022**



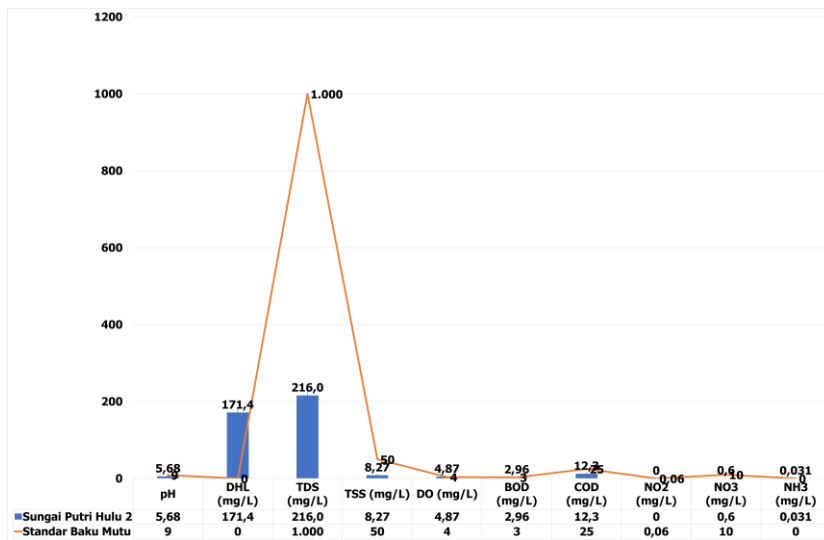
Gambar 2.70  
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hilir, Tahun 2022



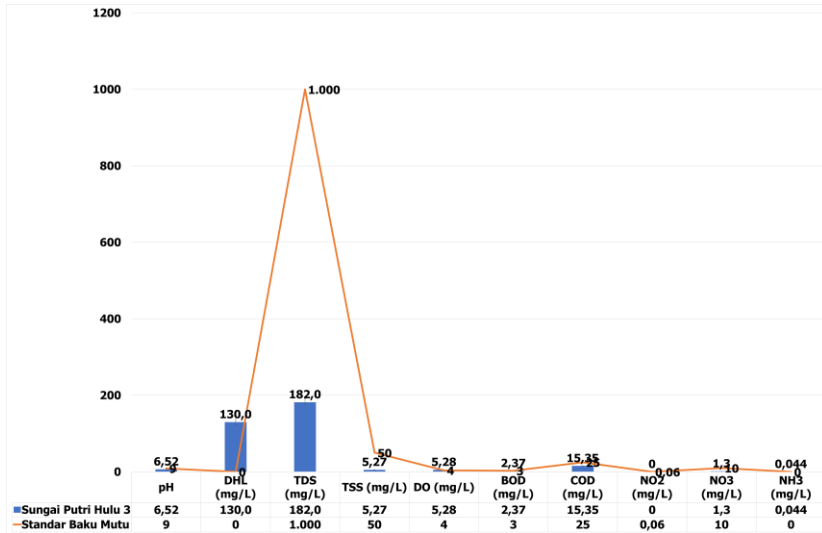
Gambar 2.71  
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 1, Tahun 2022



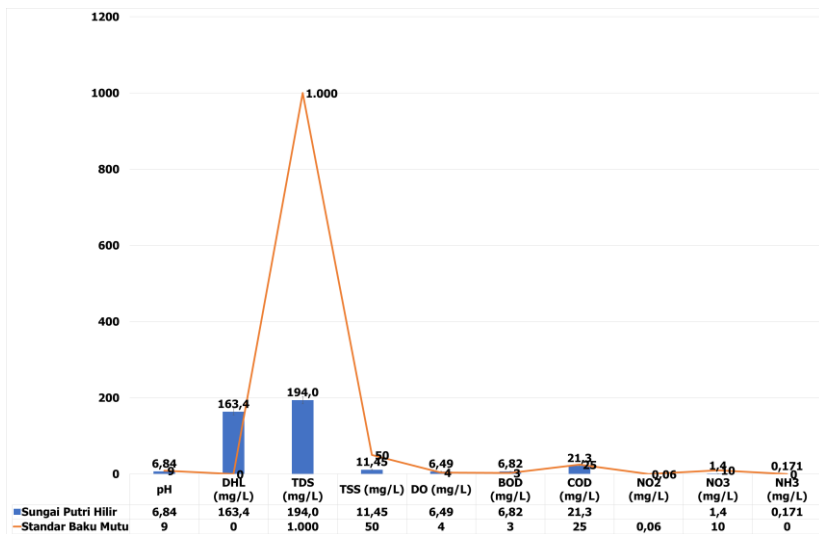
Gambar 2.72  
 Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Tengah, Tahun 2022



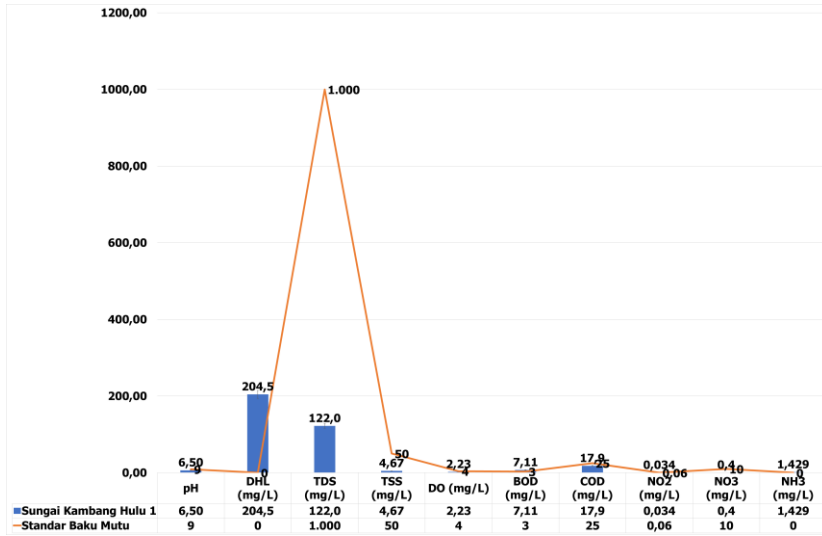
Gambar 2.73  
 Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 2, Tahun 2022



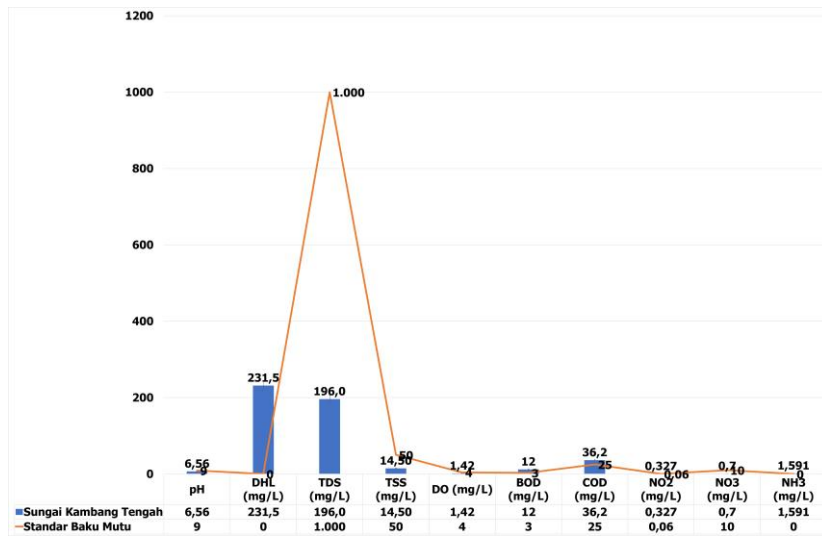
**Gambar 2.74**  
**Grifik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 3, Tahun 2022**



**Gambar 2.75**  
**Grifik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hilir, Tahun 2022**

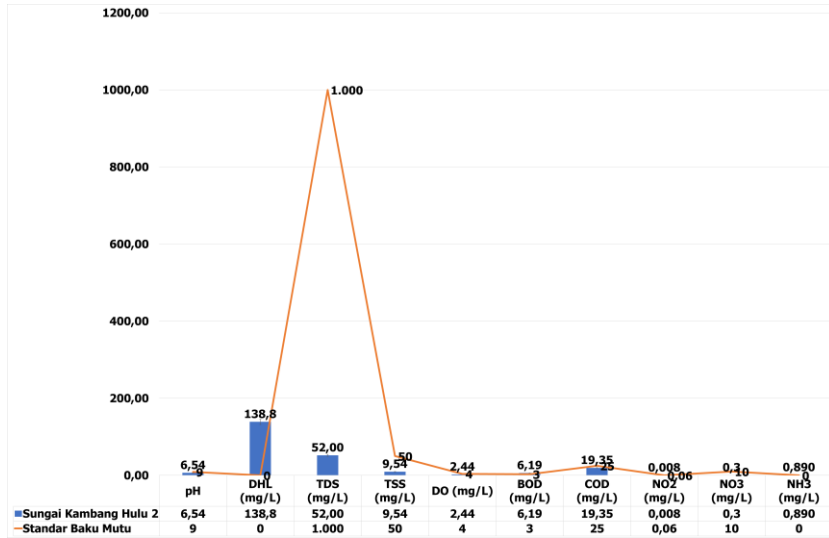


**Gambar 2.76**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 1, Tahun 2022**

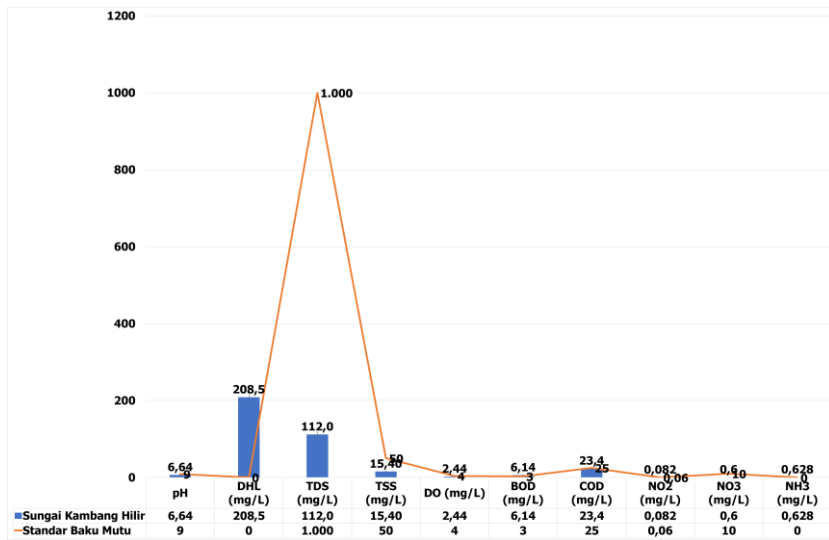


**Gambar 2.77**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Tengah, Tahun 2022**

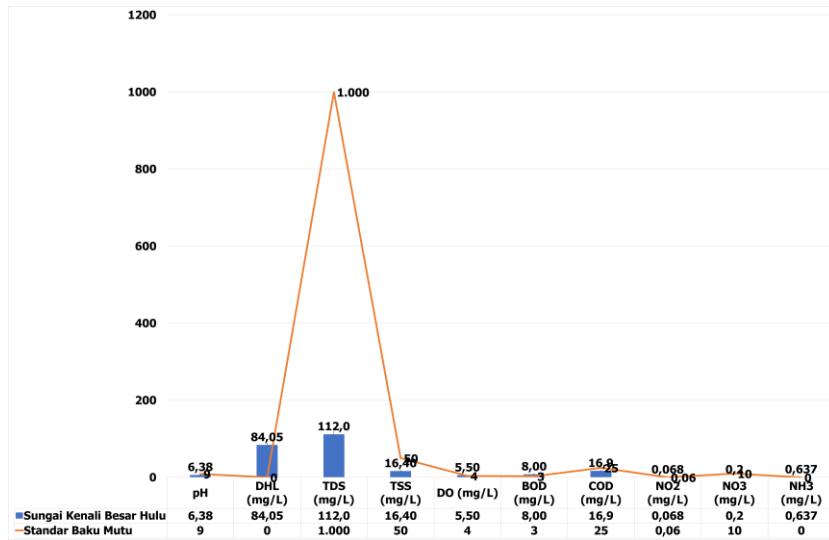




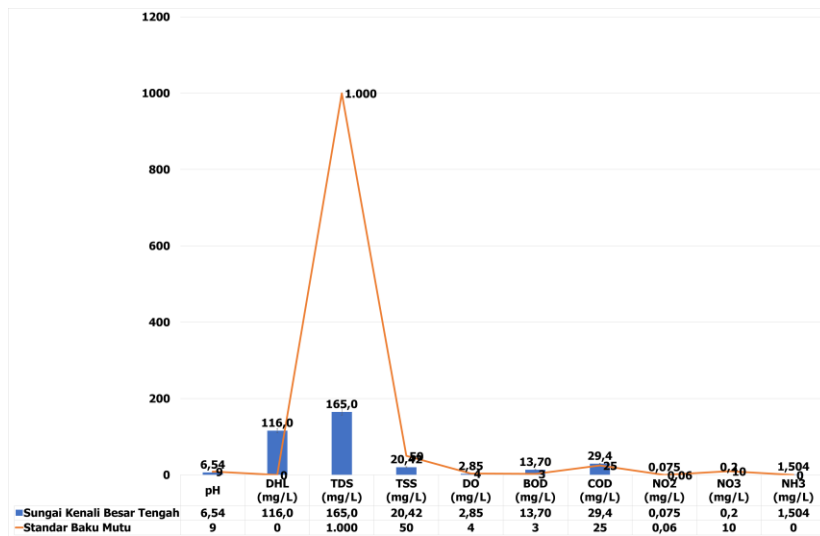
**Gambar 2.78**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 2, Tahun 2022**



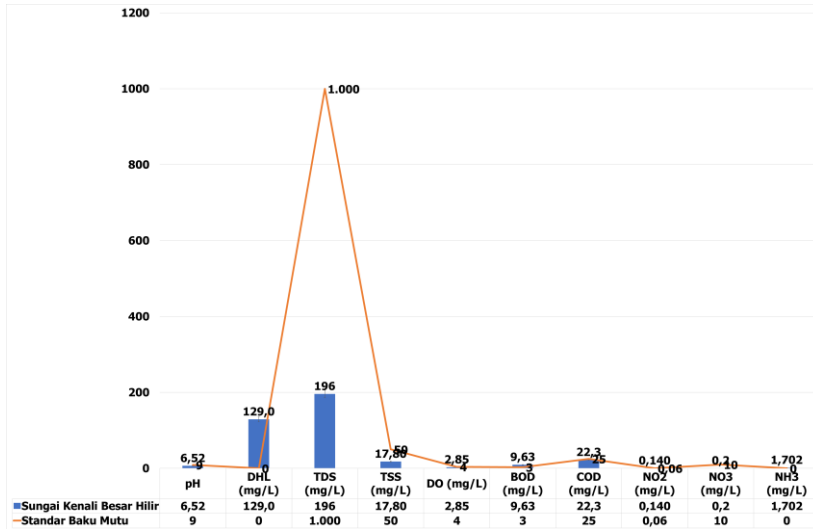
**Gambar 2.79**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hilir, Tahun 2022**



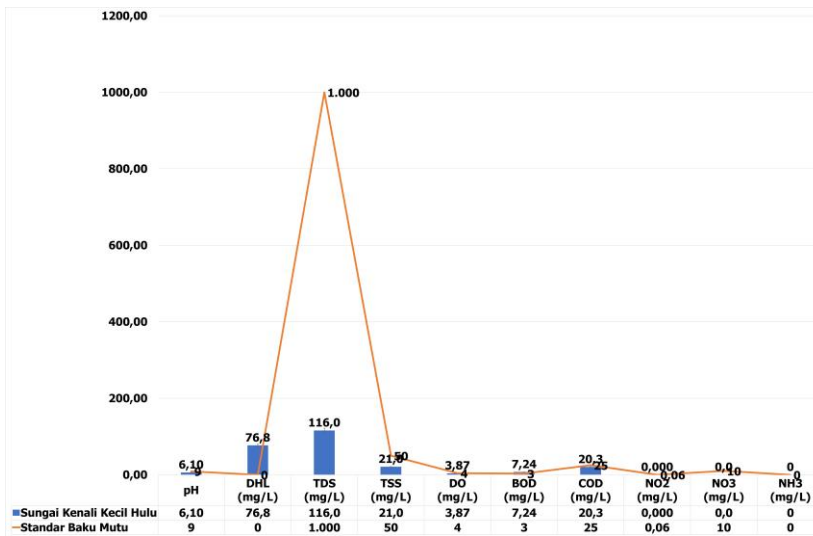
**Gambar 2.80**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hulu, Tahun 2022**



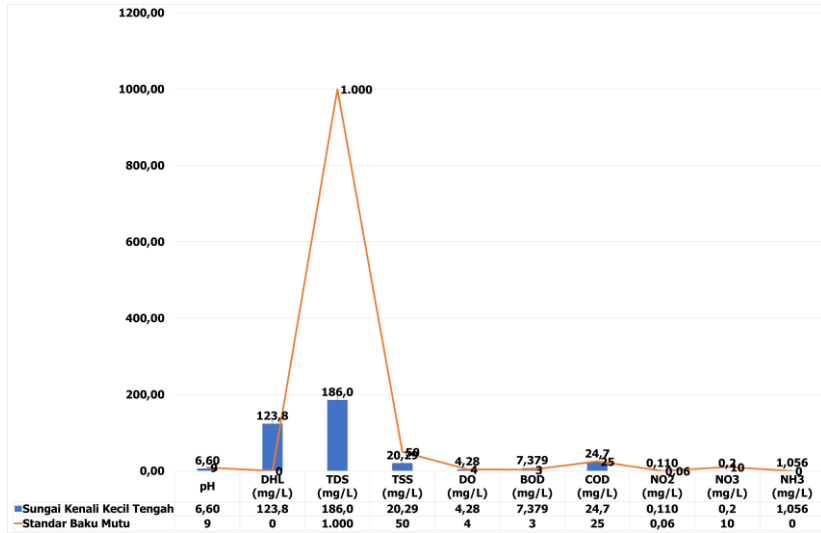
**Gambar 2.81**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Tengah, Tahun 2022**



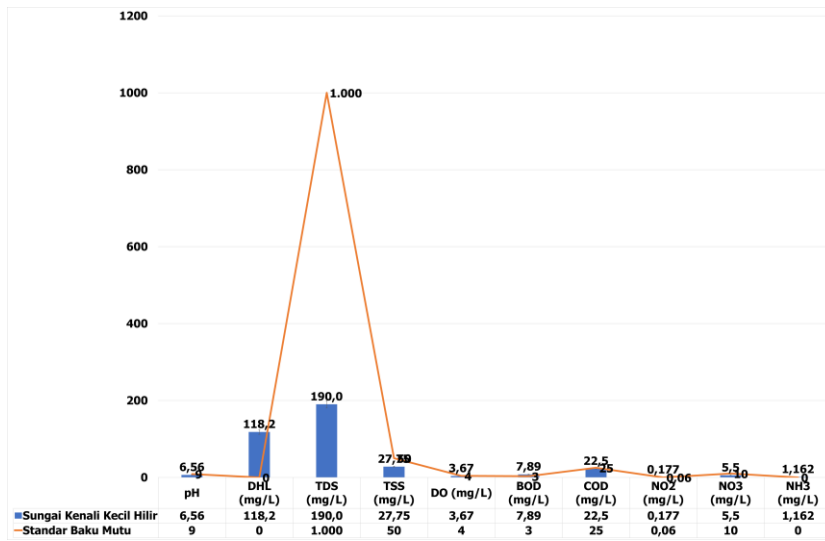
Gambar 2.82  
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hilir, Tahun 2022



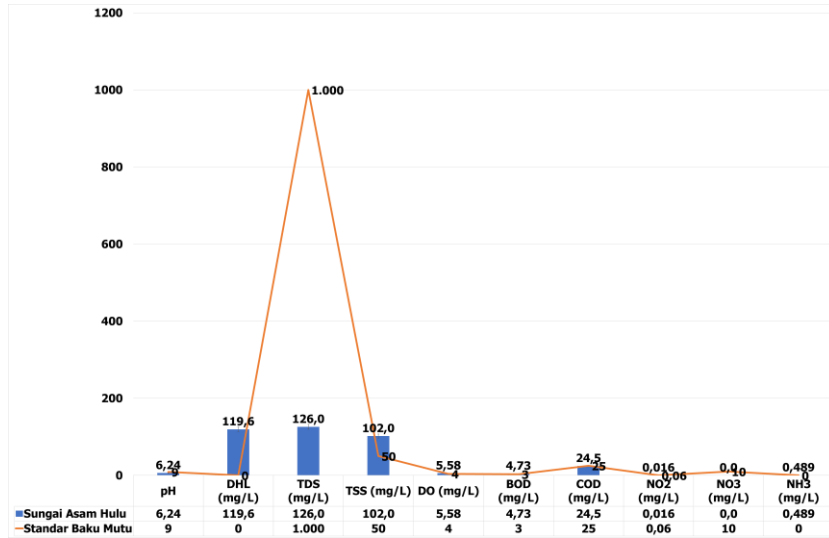
Gambar 2.83  
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hulu, Tahun 2022



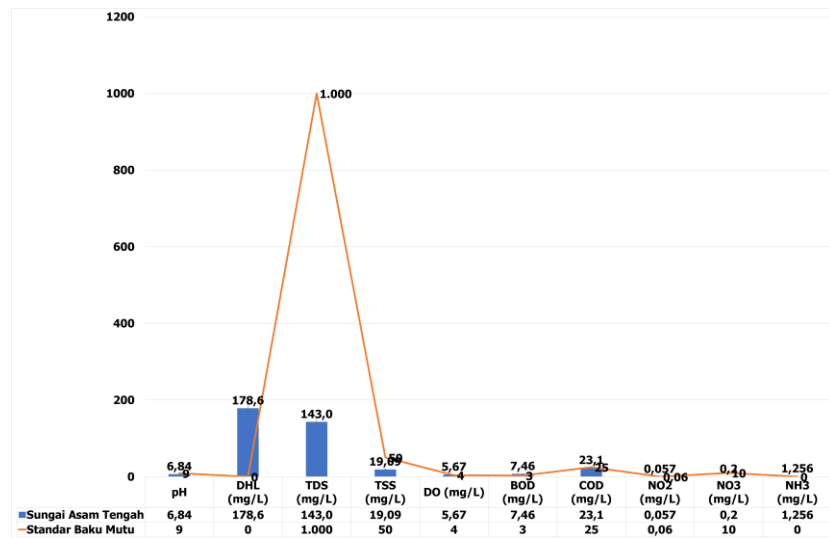
**Gambar 2.84**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Tengah, Tahun 2022**



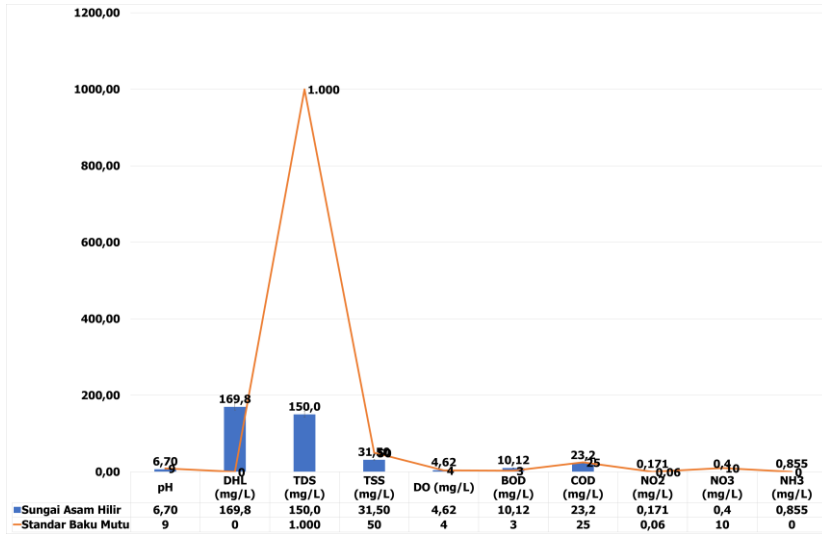
**Gambar 2.85**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hilir, Tahun 2022**



**Gambar 2.86**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hulu, Tahun 2022**



**Gambar 2.87**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Tengah, Tahun 2022**



**Gambar 2.88**  
**Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hilir, Tahun 2022**

**Tabel 2.70**  
**Kualitas Air Sungai di Kota Jambi**

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
1	Anak Air Sungai Tembuku	Perbatasan RT.05 & RT.06, Sukarejo, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi	Sungai Tembuku Hulu	01° 37' 17,4"	103° 37' 30,9"	Maret	31,5/29,2	6,58	335	186	14,57	0,20	77,1	195,2	0,008	-	4,496	2200000	5400000
			Sungai Tembuku Hulu			Mei	30,1/28,8	6,24	-	332,0	27,71	0,91	79,3	463,4	0,030	0,0	0,209	1300000	230000
			Sungai Tembuku Hulu			Oktober	32,8/28,8	6,12	247,5	252	33,6	0,40	65,9	208,3	0,037	0,4	2,058	-	230000
			Sungai Tembuku Hulu			November	32,1/28,0	6,28	286,5	304,0	22,00	0,71	63,2	123,5	0,008	0,3	1,708	240000	540000
			Sungai Tembuku Tengah	01° 37' 17,4"	103° 37' 30,9"	Maret	32,4/29,4	7,02	352,5	210	20,18	0,20	20,9	46,1	0,014	-	4,736	2400000	3500000
			Sungai Tembuku Tengah			Mei	32,3/31,2	6,46	-	158	8,77	2,23	24,0	55,9	0,017	0,2	7,94	230000	330000
			Sungai Tembuku Tengah			Oktober	33,5/29,1	6,50	190,2	186	10	1,62	10,6	34,1	0,215	0,8	1,11	-	230000
			Sungai Tembuku Tengah			November	29,5/28,3	6,65	25,7	200,0	12,57	2,44	13,8	34,0	0,067	0,5	2,998	130000	130000
		Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi	Sungai Tembuku Hilir	01° 35' 06,1"	103° 37' 31,9"	Maret	36,5/31,5	6,79	315,5	122	14,18	0,20	33,7	44,35	0,006	-	6,472	230000	310000
			Sungai Tembuku Hilir			Mei	35,1/30,6	6,30	-	86,00	93,95	2,43	16,4	45,0	0,022	0,5	0,132	1900000	1900000
			Sungai Tembuku			Oktober	34,4/28,9	6,30	96,0	196	29,8	0,40	21,2	48,5	0,029	1,5	0,604	-	790000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Hilir Sungai Tembuku Hilir			November	31,8/29,0	6,77	278,5	208,0	15,67	1,62	8,6	40,0	0,003	0,2	2,4	790000	2400000
2	Anak Sungai Selincih	Jalan Kapten. RB. Siagian, RT 21. Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi	Sungai Selincih Hulu	01° 37' 17,8"	103° 38' 12,1"	Maret	33,2/29,2	6,68	244,5	112	4,53	1,01	9,35	22,0	0,278	-	2,90	490000	490000
			Sungai Selincih Hulu			Mei	35,1/30,4	6,52	-	86,00	6,00	1,62	7,7	29,1	0,004	0,5	4,967	230000	2300000
			Sungai Selincih Hulu			Oktober	33,2/29,2	6,0	3,16	178	5,2	2,02	5,35	24,5	0,199	0,2	4,369	-	23000
			Sungai Selincih Hulu			November	34,5/29,0	6,62	240,5	180,0	12,83	2,23	5,96	21,0	0,073	0,4	2,260	700000	540000
			Sungai Selincih Tengah	01° 37' 17,8"	103° 38' 12,1"	Maret	33,9/30,0	6,66	169,4	116	6,00	2,44	11,8	13,7	0,517	0,517	-	35000	54000
			Sungai Selincih Tengah			Mei	36,1/31,2	6,52	-	132,0	13,17	1,01	15,2	47,2	0,003	0,003	0,0	13000	17000
			Sungai Selincih Tengah			Oktober	33,6/29,4	6,22	285,5	156	14	1,82	6,47	23,8	0,234	0,234	0,5	-	28000
			Sungai Selincih Tengah			November	31,2/28,4	6,68	180,8	170,0	15,64	3,65	5,34	23,85	0,121	0,121	0,7	33000	49000
		Jalan Raden Pattah - Jembatan Sijenjang, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi	Sungai Selincih Hilir	01° 34' 59,7"	103° 37' 32,8"	Maret	35,9/31,2	6,30	134,6	64	75,6	0,69	12,9	29,2	0,038	-	0,636	30000	30000
			Sungai Selincih Hilir			Mei	37,3/32,1	6,28	-	170,0	16,75	0,61	41,8	71,7	0,019	0,9	2,374	3400	4000



No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Sungai Selincih Hilir			Oktober	37,6/32,8	6,76	29,6	122	81,33	4,45	7,63	14,9	0,373	0,5	2,904	-	2300
			Sungai Selincih Hilir			November	31,8/28,8	6,08	129,0	164,0	42,00	0,81	10,9	31,0	0,003	0,2	0,236	4900	24000
3	Anak Sungai Solok Sipin	Jalan Prof. Dr. Soedewi, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Solok Hulu	01° 36' 30,2"	103° 35' 40,4"	Maret	36,0/30,0	6,20	16,5	52	31,4	3,33	16,5	15,45	0,367	-	0,590	17000	22000
			Sungai Solok Hulu			Mei	33,1/29,5	6,12	4,87	86	14,5	3,24	4,87	16,4	0,076	1,2	0,330	7900	7900
			Sungai Solok Hulu			November	28,9/27,8	6,8	9,32	92	9,09	5,68	9,32	40,8	0,251	4,6	0,345	-	92000
			Sungai Solok Tengah	01° 36' 30,2"	103° 35' 40,4"	Maret	34,5/31,5	6,60	205,5	66	8,36	0,59	15,2	31,2	0,049	-	3,228	35000	160000
			Sungai Solok Tengah			Mei	35,0/33,1	6,30	-	102	4,31	1,22	10,0	31,4	0,057	1,6	0,247	24000	24000
			Sungai Solok Tengah			November	32,5/28,5	6,52	196,0	96	11,56	4,67	14,4	19,8	0,997	3,0	1,549	-	300000
		Jalan Slamet Riyadi, RT.29, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Solok Hilir	01° 35' 36,4"	103° 36' 43,9"	Maret	35,6/31,6	6,54	240,5	132	535	0,61	22,9	65,8	0,027	-	3,704	350000	170000
			Sungai Solok Hilir			Mei	34,4/32,2	6,34	-	108	50,29	2,03	23,3	38,6	0,07	0,8	3,135	170000	170000
			Sungai Solok Hilir			November	31,1/28,4	6,50	154,0	218	379,0	1,62	29,2	302,8	0,0	0,0	1,321	-	540000
4	Anak Sungai Putri	Jalan Abunjani, Lorong Diamond, RT.16, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin,	Sungai Putri Hulu 1	01° 36' 50,7"	103° 35' 36,1"	Januari	30,5/28,5	6,60	190,2	148	6,53	2,92	27,1	45,85	0,570	5,9	1,65	240000	350000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Kota Jambi																	
			Sungai Putri Hulu 1			Mei	28,2	6,34	177,4	154	12,18	3,82	12,7	47,1	0,189	1,3	1,906	79000	79000
			Sungai Putri Hulu 1			Oktober	34,6/28,8	5,82	178,4	146	4,33	3,48	10,7	26	0,319	0,9	0,263	-	790
			Sungai Putri Hulu 1			Desember	30,8/28,4	6,74	189,0	220,0	3,27	4,56	2,80	15,0	0,126	1,6	0,135	13000	13000
			Sungai Putri Tengah	01° 36' 50,7"	103° 35' 36,1"	Maret	33,9/30,0	6,66	169,4	116	6,00	2,44	11,8	13,7	0,517	-	1,489	35000	54000
			Sungai Putri Tengah			Mei	29,2	6,82	129	170	23,09	5,23	6,26	23,0	0,117	0,7	1,411	35000	35000
			Sungai Putri Tengah			Oktober	32,6/28,8	6,15	166,5	147	70,425	5,66	5,94	39,80	0,337	1,4	0,156	-	33000
			Sungai Putri Tengah			Desember	31,1/28,1	6,61	164,8	192,0	17,27	6,29	5,71	18,4	0,117	0,8	0,284	540000	540000
		Jalan Gotong Royong, RT.26, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Putri Hulu 2	01° 36' 53,8"	103° 35' 23,0"	Januari	31,7/28,4	5,64	180,6	170	13,28	4,59	3,43	31,9	0,064	6,2	0,2	3300	3300
			Sungai Putri Hulu 2			Mei	28,0	6,46	130,4	124	4,91	4,43	3,94	15,9	0,011	4,0	0,076	200	200
			Sungai Putri Hulu 2			Oktober	36,7/28,5	5,30	160,7	140	26,36	5,46	3,68	13,7	0,002	1,2	0,056	-	33
			Sungai Putri Hulu 2			Desember	31,4/28,3	5,68	171,4	216,0	8,27	4,87	2,96	12,3	-	0,6	0,031	2400	9200
		Jalan Bungo Tanjung, RT.01, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Putri Hulu 3	01° 36' 48,9"	103° 35' 09,1"	Januari	31,9/28,2	5,84	134,6	127	3,88	5,63	2,17	2,8	0,695	6,8	0,202	200	200
			Sungai Putri Hulu 3			Mei	28,2	6,80	127,8	102	1,45	5,64	2,84	19,55	0,018	0,9	0,056	200	200
			Sungai Putri Hulu 3			Oktober	34,3/28,6	6,60	129	110	4,18	5,56	3,22	17,35	0,029	0,8	0,071	-	230
			Sungai Putri Hulu 3			Desember	30,7/28,0	6,52	130,0	182,0	5,27	5,28	2,37	15,35	-	1,3	0,044	2300	3300
		Jembatan Sungai Putri, RT.03/-5,	Sungai Putri Hilir	01° 36' 10,8"	103° 35' 10,1"	Januari	30,9/28,1	6,30	190,8	118	8,15	4,80	15,6	23,95		5,0	0,011	79000	240000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi																	
			Sungai Putri Hilir			Mei	28,4	6,98	129,2	150	9,47	5,64	11,7	19,2		1,6	0,208	160000	160000
			Sungai Putri Hilir			Oktober	34,7/29,1	6,12	164,4	128	15,6	6,06	7,74	19,70		1,3	0,580	-	110000
			Sungai Putri Hilir			Desember	30,1/27,8	6,84	163,4	194,0	11,45	6,49	6,82	21,3		1,4	0,171	230000	230000
5	Anak Sungai Kambang	Jalan Sunan Giri, RT.20, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	Sungai Kambang Hulu 1	01° 37' 26,0"	103° 35' 27,6"	Januari	28,0/27,2	6,96	190,0	130	8,15	2,71	11,0	13,6	0,074	1,9	2,766	350000	350000
			Sungai Kambang Hulu 1			Mei	27,8	6,56	155,2	116	12,57	3,02	9,53	18,9	0,139	2,3	1,274	23000	46000
			Sungai Kambang Hulu 1			Oktober	32,9/28,4	6,10	237,5	180	8,84	2,02	12,4	29,65	0	0,1	1,704	-	41000
			Sungai Kambang Hulu 1			November	33,0/28,4	6,50	204,5	122,0	4,67	2,23	7,11	17,9	0,034	0,4	1,429	240000	350000
			Sungai Kambang Tengah	01° 37' 26,0"	103° 35' 27,6"	Mei	28,6	6,78	172,6	160	11,82	2,42	12,5	34,4	0,350	2,7	0,751	350000	540000
			Sungai Kambang Tengah			Oktober	33,7/28,6	6,44	233,5	172	6,75	1,21	13,2	34,6	0	0,2	2,414	-	240000
			Sungai Kambang Tengah			November	31,9/29,0	6,56	231,5	196,0	14,50	1,42	12	36,2	0,327	0,7	1,591	540000	540000
		Jalan H. Juanda Mayang, Lorong Tegat Sari 1, Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kambang Hulu 2	01° 37' 48,2"	103° 35' 04,8"	Januari	27,8/28,5	6,18	161,4	124	7,54	1,88	11,9	21,6	0,041	1,8	3,036	140000	140000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Sungai Kambang Hulu 2			Mei	28,7	6,76	147,0	118	4,40	4,02	7,47	19,0	0,068	2,3	0,659	110000	140000
			Sungai Kambang Hulu 2			Oktober	32,8/29,2	5,82	139,4	148	8	1,62	14,7	45,0	0	0,2	0,998	-	240000
			Sungai Kambang Hulu 2			November	33,9/29,3	6,54	138,8	52,00	9,54	2,44	6,19	19,35	0,008	0,3	0,890	79000	79000
		Jalan Dr. Siwabesy Jembatan Buluran, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi	Sungai Kambang Hilir	01° 35' 57,9"	103° 34' 39,3"	Januari	29,4/28,2	6,42	195,4	124	5,60	3,75	9,53	12,4	0,267	1,5	4,671	240000	240000
			Sungai Kambang Hilir			Mei	28,4	5,98	194,4	130	4,00	5,23	13,2	18,2	0,303	2,9	0,617	240000	240000
			Sungai Kambang Hilir			Oktober	33,1/28,8	6,44	189,2	162	9,60	3,03	7,78	18,5	0,121	0,5	3,565	-	23000
			Sungai Kambang Hilir			November	31,1/28,8	6,64	208,5	112,0	15,40	2,44	6,14	23,4	0,082	0,6	0,628	240000	240000
6	Anak Sungai Kenali Besar	Jalan Thayib Fahrudin Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kenali Besar Hulu	01° 40' 12,8"	103° 35' 01,5"	Februari	30,4/28,0	6,22	103,2	126	51,39	3,45	11,6	21,6	0,067	1,3	0,443	240000	300000
			Sungai Kenali Besar Hulu			Juni	32,0/29,8	6,14	79,0	104	20,6	4,66	11,21	13,4	0,058	1,0	1,042	79000	130000
			Sungai Kenali Besar Hulu			September	33,7/28,9	6,97	95,60	122	25,43	4,46	7,81	13,9	0,010	1,5	0,512	920000	16000000
			Sungai Kenali Besar Hulu			Desember	32,9/28,0	6,38	84,05	112,0	16,40	5,50	8,00	16,9	0,068	0,2	0,637	2300000	2300000
			Sungai Kenali Besar Tengah	01° 40' 12,8"	103° 35' 01,5"	Februari	29,9/27,3	6,30	85,6	118	59,00	3,04	11,9	18,2	0,060	0,3	0,353	110000	170000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Sungai Kenali Besar Tengah			Juni	31,1/28,5	6,62	115	62	19,0	4,46	9,75	29,3	0,055	0,5	0,346	450000	450000
			Sungai Kenali Besar Tengah			September	34,5/28,6	7,33	99,8	167	45,66	3,04	13,7	18,85	0,008	1,8	0,581	1600000	1600000
			Sungai Kenali Besar Tengah			Desember	31,7/27,2	6,54	116,0	165,0	20,42	2,85	13,70	29,4	0,075	0,2	1,504	13000000	13000000
		Jalan Walisongo, RT. 13 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kenali Besar Hilir	01° 36' 06,9"	103° 33' 20,0"	Februari	28,8/26,6	6,52	137,4	182	96,50	2,03	16,8	28,1	0,114	4,3	0,996	540000	540000
			Sungai Kenali Besar Hilir			Juni	32,1/29,5	6,40	121,0	108	18,86	3,65	9,83	22,9	0,046	0,00	2,268	130000	130000
			Sungai Kenali Besar Hilir			September	33,8/28,4	6,56	96,2	74	17,83	4,06	9,15	14,5	0,000	1,2	1,503	240000	540000
			Sungai Kenali Besar Hilir			Desember	36,1/28,4	6,52	129,0	196	17,80	2,85	9,63	22,3	0,140	0,2	1,702	490000	1300000
7	Anak Sungai Kenali Kecil	Jalan Lingkar Barat, RT.31, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	Sungai Kenali Kecil Hulu	01° 38' 04,9"	103° 32' 27,7"	Februari	31,5/25,0	6,38	98,8	116	11,00	4,16	6,81	12,5	0,005	0,9		1000	5000
			Sungai Kenali Kecil Hulu			Juni	31,2/29,0	6,14	106,4	114	14,89	4,56	5,61	23,1	0,0412	1,5		1700	1700
			Sungai Kenali Kecil Hulu			September	35,1/27,5	6,12	53,2	32	19	5,18	5,32	8,10	0,000	1,1		200	200
			Sungai Kenali Kecil Hulu			Desember	27,8/27,0	6,10	76,8	116,0	21,0	3,87	7,24	20,3	0,000	0,0		1800	1800
			Sungai Kenali Kecil Tengah	01° 38' 04,9"	103° 32' 27,7"	Februari	30,9/28,0	6,38	165,6	176	23,69	2,84	12,8	21,0	0,261	1,8	1,092	160000	160000
			Sungai			Juni	31,1/28,2	6,64	191,4	134	23,10	3,45	9,81	49,7	0,300	1,1	1,291	49000	49000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Kenali Kecil Tengah																
			Sungai Kenali Kecil Tengah			September	32,3/27,8	6,62	978	76	23,26	5,48	5,86	11,5	0,008	1,2	0,990	150000	150000
			Sungai Kenali Kecil Tengah			Desember	30,9/27,1	6,60	123,8	186,0	20,29	4,28	7,379	24,7	0,110	0,2	1,056	410000	410000
		Jalan Walisongo, RT. 03 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kenali Kecil Hilir	01° 36' 06,8"	103° 33' 18,4"	Februari	28,5/26,7	6,26	144,2	158	69,38	4,87	17,5	31,1	0,193	2,8	1,446	240000	240000
			Sungai Kenali Kecil Hilir			Juni	32,2/30,0	6,58	156,2	124	19,0	4,79	9,27	34,1	0,225	1,3	0,722	7800	7800
			Sungai Kenali Kecil Hilir			September	34,9/28,4	6,7	112,8	640	21,82	4,06	11,80	17,7	0,008	1,5	0,880	34000	130000
			Sungai Kenali Kecil Hilir			Desember	32,6/28,2	6,56	118,2	190,0	27,75	3,67	7,89	22,5	0,177	5,5	1,162	130000	230000
8	Anak Sungai Asam	Jalan lingkar Selatan, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	Sungai Asam Hulu	01° 40' 24,8"	103° 36' 25,0"	Februari	30,0/29,4	6,54	146,4	154	64,84	4,46	10,9	34,4	0,006	2,0	0,898	3300	4900
			Sungai Asam Hulu			Juni	30,0/26,6	6,28	143,6	138	28,86	6,53	8,99	25,3	0,150	0,2	1,87	3300	3300
			Sungai Asam Hulu			November	32,0/28,2	7,04	78,0	74	64,0	2,94	10,6	16,0	0,000	0,0	0,212	-	54000
			Sungai Asam Hulu			Desember	29,1/29,0	6,24	119,6	126,0	102,0	5,58	4,73	24,5	0,016	0,0	0,489	13000	13000
			Sungai Asam Tengah	01° 40' 24,8"	103° 36' 25,0"	Februari	31,9/28,0	6,74	273,5	262	19,28	3,25	11,3	22,4	0,228	1,9	3,045	54000	92000
			Sungai Asam Tengah			Juni	32,0/29,8	6,86	350,5	208	7,00	2,43	7,94	24,3	0,352	0,7	5,439	160000	160000
			Sungai Asam			November	31,6/28,0	7,16	146,0	110	20,91	1,62	6,07	20,2	0,045	0,6	1,088	-	160000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Tengah Sungai Asam Tengah			Desember	30,7/27,8	6,84	178,6	143,0	19,09	5,67	7,46	23,1	0,057	0,2	1,256	240000	240000
		Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi	Sungai Asam Hilir	01° 35' 36,4"	103° 36' 43,9"	Februari	26,8/26,8	6,52	197,2	220	161,8	1,83	24,0	38,3	0,236	2,4	2,518	240000	350000
			Sungai Asam Hilir			Juni	32,8/30,8	6,74	257,5	168	23,70	3,25	14,30	26,0	0,168	0,2	2,988	49000	49000
			Sungai Asam Hilir			November	32,5/28,3	6,92	182,0	104	11,20	6,92	15,4	25,9	0,224	1,2	1,462	-	920000
			Sungai Asam Hilir			Desember	29,0/27,3	6,70	169,8	150,0	31,50	4,62	10,12	23,2	0,171	0,4	0,855	2300000	2300000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022

**Tabel II.71**  
**Kualitas Air Danau di Kota Jambi**

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
1	Danau Sipin	Jalan Mayjen M. Yusuf Singedekane, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Danau Sipin (Muara)	01°35'55,9"	103°34'45,9"	Jan	32,8/29,5	6,17	70,88	89	66,96	4,69	7,14	23,1	0,027	0,5	0,366	450	4900
			Danau Sipin (Muara)			Mar	38,4/30,1	6,62	124,8	116	16,6	7,18	5,435	23,9	0,027	0,6	0,393	4900	4900
			Danau Sipin (Muara)			Jun	35,0/31,0	6,42	107,4	166	17,14	4,04	6,44	28,9	0,013	0,2	0,397	1300	2300
			Danau Sipin (Muara)			Agust	31,1/30,03	6,00	86,2	86	11,45	5,88	4,8	21,9	0,062	0,9	0,146	2300	3300
		Jalan Mayjen M. Yusuf Singedekane,	Danau Sipin (Non)	01°36'01,6"	103°34'57,6"	Jan	33,1/29,0	6,48	70,29	100	59,50	4,02	5,06	14,7	0,032	1,5	0,332	3400	13000

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Komersil)																
			Danau Sipin (Non Komersil)			Mar	33,5/30,0	6,36	119,6	138	28,5	6,67	5,488	22,3	0,030	0,7	0,326	7900	7900
			Danau Sipin (Non Komersil)			Jun	42,7/31,0	5,82	115	134	29,5	8,18	5,85	32,6	0,01	0,8	0,437	200	450
			Danau Sipin (Non Komersil)			Agust	29,4/29,8	6,00	85,2	116	15,75	6,09	5,27	18,1	0,066	2,1	0,175	4900	7900
		Jalan Mayjen M. Yusuf Singedekane, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Danau Sipin (Komersil )	01° 36' 02,8"	103° 35' 19,5"		33,7/28,2		112	112	50,00						0,493	2200	35000
			Danau Sipin (Komersil )			Mar	33,1/30,1	6,50	134	134	23,33	5,46	7,64	20,4	0,032	2,1	0,488	24000	24000
			Danau Sipin (Komersil )			Jun	37,9/31,0	5,96	134	134	19,00	4,04	5,51	23,35	0,027	1,4	0,558	1700	3300
			Danau Sipin (Komersil )			Agust	32,5/30,2	6,20	106	106	12,73	5,07	4,31	26,1	0,065	2,2	0,182	1300	4900
2	Danau Teluk Kenali	Jalan K.H.A Masjid, RT.01, Kelurahan Teluk Kenali, Kota Jambi	Danau Teluk Kenali (Muara)	01°35'17,4"	103°34'03,9"	Jan	34,1/30,2	6,54	65,87	100	53,20	2,82	5,15	35,85	0,045	0,2	0,5	1700	7900
			Danau Teluk Kenali (Muara)			Mar	34,2/31,8	6,87	112,8	112	28,6	6,27	7,43	24,5	0,06	9,3	0,481	15000	15000
			Danau Teluk			Jun	36,0/32,8	6,22	116,6	176	26	4,04	5,38	39,5	0,018	1,2	0,534	2800	2800



No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Kenali (Muara)																
			Danau Teluk Kenali (Muara)			Agust	31,6/32,2	6,28	78,6	106	9,85	7,61	6,23	23,5	0,075	0,6	0,090	1300	1300
		Jalan K.H.A Masjid, RT.01, Kelurahan Teluk Kenali, Kota Jambi	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	01°36'21,0"	103°34'09,9"	Jan	32,9/29,6	6,82	65,48	98	48,80	5,10	5,75	41,9	0,038	1,1	0,391	1700	1700
			Danau Teluk Kenali (Non Komersil)			Mar	34,6/30,6	6,61	115,0	110	7,8	6,87	6,75	26,45	0,045	7,1	0,353	17000	17000
			Danau Teluk Kenali (Non Komersil)			Jun	35,0/31,4	6,2	101,0	110	16,4	8,08	5,09	32,1	0,014	1,1	0,134	780	13000
			Danau Teluk Kenali (Non Komersil)			Agust	32,4/30,4	6,38	80,0	124	11,82	5,88	5,55	23,2	0,082	0,9	0,123	450	2300
		Jalan K.H.A Masjid, RT.01, Kelurahan Teluk Kenali, Kota Jambi	Danau Teluk Kenali (Komersil)	01°36'12,9"	103°35'57,5"	Jan	33,4/30,6	6,94	65,38	94	44,40	7,92	5,29	54,2	0,035	1,7	0,288	4900	4900
			Danau Teluk Kenali (Komersil)			Mar	35,3/37,1	6,98	114,0	90	8,57	6,47	8,72	28,6	0,042	0,6	0,288	4900	7900
			Danau Teluk Kenali (Komersil)			Jun	36,8/31,4	6,4	104,0	102	20	8,79	6,61	32,7	0,017	1,8	0,231	4900	17000
			Danau Teluk Kenali (Komersil)			Agust	32,2/29,4	6,16	79,4	146	10,00	5,28	6,23	20,8	0,074	2,2	0,170	2300	2300
3	Danau Teluk	Kelurahan Olak kemang	Danau Teluk	01°34'36,2"	103°35'56,2"	Jan	33,0/29,6	6,34	41,0	70	12,28	1,04	5,86	27,4	0,000	0,5	0,04	330	330

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi	(Muara)																
			Danau Teluk (Muara)			Mar	34,0/32,0	6,52	50,6	72	12,5	8,49	5,0	15,4	0,013	0,6	0,04	18	180
			Danau Teluk (Muara)			Jun	33,7/30,8	5,74	49,0	80	11,5	8,08	5,16	26,4	0,007	0,3	0,220	240	920
			Danau Teluk (Muara)			Agust	36,5/30,8	6,00	42,8	70	9,71	5,48	3,67	14,3	0,01	0,8	0,04	130	230
		Kelurahan Olak kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi	Danau Teluk (Non Komersil)	01°34'38,2"	103°35'49,9"	Jan	32,7/29,0	6,18	40,98	64	11,43	2,82	5,73	14,7	0,013	0,4	0,04	330	330
			Danau Teluk (Non Komersil)			Mar	38/37,2	6,44	53,4	78	8,6	8,69	4,58	17,6	0,01	1,0	0,04	18	20
			Danau Teluk (Non Komersil)			Jun	37,4/30,8	5,88	51,1	70	20	7,28	4,39	28,25	0,014	1,2	0,22	130	240
			Danau Teluk (Non Komersil)			Agust	37,5/30,2	6,09	43,6	72	14,18	4,46	3,48	24,0	0,003	0,5	0,04	230	330
		Kelurahan Olak kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi	Danau Teluk (Komersil)	01°34'40,1"	103°35'54,8"	Jan	33,1/29,7	6,63	40,78	52	11,14	2,08	3,46	39,5	0,000	0,4	0,04	330	490
			Danau Teluk (Komersil)			Mar	34,8/31,8	6,30	52,6	70	8,0	8,69	4,58	14,1	0,009	1,0	0,04	330	300
			Danau Teluk (Komersil)			Jun	37,0/30,2	5,64	51,2	86	15,45	6,87	3,1	26,2	0,024	0,6	0,04	1300	9200
			Danau Teluk (Komersil)			Agust	41,2/31,4	7,20	44,6	66	9,22	6,29	3,31	15,5	0,013	0,4	0,04	7900	7900

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022

**Tabel 2.72**  
**Kualitas Air Sumur di Kota Jambi**

No.	Lokasi Sumur/ Titik Pantau	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Bau	TDS	Mangan (mg/L)	Seng (mg/L)	Sianida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	NO 3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Total coliform (jml/100 ml)
			Lintang	Bujur																	
1	Sumur Kawasan Industri	Januari	01°35'44,1"	103°37'29,5"	29,2/27,7	8,28	2	24	Tidak Berbau	140,5	0,392	0,05	0,006	0,005	2	0,3	2,87	0,02	0,32	0,35	-
		April	01°35'44,1"	103°37'29,5"	30,6/29,2	5,86	4	33	Tidak Berbau	272	0,022	0,03	0,001	0,02	7	3,9	0,134	0,02	0	1,92	-
		Juli	01°35'44,1"	103°37'29,5"	31,7/29	6,04	4	5	Tidak Berbau	238	0,014	0,02	0,005	0,002	6	0	0,03	0,04	0,35	3,3	11000
		November	01°35'44,1"	103°37'29,5"	30,4/29,4	6,12	5	12	Tidak Berbau	281	0,016	0	-	0,022	5	5,9	0,1612	0,02	0,44	1,54	180
2	Sumur Kawasan Perkantoran	Januari	01°37'35,5"	103°36'23,0"	32/29,1	7,74	0	4	Tidak Berbau	195	0,096	0,07	0,001	0,002	10	0,7	0,093	0,04	1,05	2,4	-
		April	01°37'35,5"	103°36'23,0"	28,6/27,3	6,18	26	405	Tidak Berbau	220,5	0,086	0	0,001	0	2	0	1,153	0,01	0	3,3	-
		Juli	01°37'35,5"	103°36'23,0"	33,3/27,6	6,42	35	363	Berbau	233	0,114	0	0,009	0,002	2	4,2	0,676	0,07	0,22	3,3	7000
		November	01°37'35,5"	103°36'23,0"	27,5/27,4	6,84	39	394	Tidak Berbau	203,5	0,041	0,01	0,004	0,083	2	2,8	5,184	0	0,7	0,91	54000
3	Sumur Kawasan Pemukiman	Januari	01°39'36,1"	103°36'05,6"	9,14	9,14	0	7	-	360	0,23	0,1	0,014	0,002	6	1,4	0,206	0,206	0,3	3,07	-
		April	01°39'36,1"	103°36'05,6"	29,4/28,7	5,22	0	6	-	335	0,181	0,03	0,002	0,003	2	6,6	0,035	0,035	0,02	2,64	-
		Juli	01°39'36,1"	103°36'05,6"	27,1/27	5,454	1	9	-	132	0,013	0,09	0,003	0,005	3	5	0,011	0,011	0,36	3,3	490
		November	01°39'36,1"	103°36'05,6"	31,7/28,6	4,92	3	8	-	265	0,036	0,19	0,002	0,004	1	10,2	0,1498	0,1498	0,61	1,51	20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022.

### C. Kualitas Udara

Udara merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi, udara tidak kasat mata, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Udara hanya dapat dirasakan dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang dimaksud udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Peningkatan kebutuhan *supply* oksigen di wilayah kota jambi akibat kualitas udara yang semakin menurun, dengan pantauan terhadap kualitas udara guna mengetahui trend tingkat pencemaranan udara secara *up to date* serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengendalian pencemaranan udara di Kota Jambi. Terkait Kualitas Udara Ambien pada tahun 2022 telah dilakukan pemantauan kualitas di wilayah Kota Jambi yang lokasinya mewakili kawasan padat lalu lintas, kawasan permukiman dan kawasan industri sebagai tabel berikut ini.

**Tabel 2.73**  
**Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi Tahun 2022**

No.	Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )
		Latitude	Longitude			
1	Kantor Lurah Jambi, Kota Jambi	-1,61583	103,616419	26 APRIL 2022 pukul 09.39 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 09.13 WIB	4,97	20,58
2	Pabrik Karet/ Puskesmas Sijenjang	-1,3896	103,628226	26 APRIL 2022 pukul 10.02 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 09.40 WIB	6,86	9,08
3	Perumahan Villa Kenali	-1,645444	103,585694	26 APRIL 2022 pukul 10.42 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 10.14 WIB	5,38	11,66
4	Komplek Walikota Jambi	-1,629584	103,607389	26 APRIL 2022 pukul 09.20 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 08.58 WIB	4,27	12,01
5	Blank Sample				<2,57	<0,41
6	Kantor Lurah Jambi, Kota Jambi	-1,58525	103,618416	5 JULI 2022 pukul 08.58 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 08.51 WIB	5,06	25,38
7	Pabrik Karet/ Puskesmas Sijenjang	-1,636000	103,635694	5 JULI 2022 pukul 09.15 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 09.07 WIB	6,38	13,01
8	Perumahan Villa Kenali	-1,618444	103,63175	5 JULI 2022 pukul 09.48 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 09.37 WIB	3,05	12,17
9	Komplek Walikota Jambi	-1,585805	103,61925	5 JULI 2022 pukul 08.40 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 08.36 WIB	6,4	12,55
10	Blank Sample				<2,57	<0,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2023.



**Gambar 2.89**  
**Alat AQMS di Kota Jambi**

Tingginya emisi karbon di Kota Jambi salah satunya dipicu oleh perkembangan kendaraan bermotor milik pribadi yang menggunakan bahan bakar Bensin sekitar 863.607 unit, bahan solar sekitar 47.912 unit dan yang menggunakan bahan bakar gas sekitar 18 unit. Kondisi ini potensial akan terus terjadi jika Pemerintah Kota Jambi tidak mengambil kebijakan dan mendorong hadirnya moda transportasi umum yang berkualitas.

**Tabel 2.74**  
**Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1	Sepeda Motor	771.783	771.709	60	14
2	Mobil Penumpang	93.525	80.841	12.684	0
3	Mobil Bus	845	11	834	0
4	Mobil Barang	45.277	11.032	34.241	4
5	Kendaraan Khusus	107	14	93	0
<b>Total</b>		<b>911.537</b>	<b>863.607</b>	<b>47.912</b>	<b>18</b>

*Sumber: Samsat Kota Jambi, Tahun 2023.*

Tingginya penggunaan bahan bakar minyak tanah, LPG, kayu bakar, bensin dan solar untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan pengolahan dan rumah tangga yang menyebabkan pencemaran udara. Bahan bakar yang menggunakan LPG pada industri kecil sebanyak 34.912 buah, dan yang menggunakan LPG pada rumah tangga sebanyak 298.464 buah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.75**  
**Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi**

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	LPG	Briket	Kayu Bakar	Bensin	Solar
A	Industri :								
1	Industri Kecil	-	-	-	34.912	-	-	-	-
2	Industri Sedang	-	-	-		-	-	-	-
3	Industri Besar	-	-	-		-	-	-	-
B	Rumah Tangga :	-	-	-	298.464	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333.376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Sumber: Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi, Tahun 2023.*

### E. Pengelolaan Persampahan

Kota Jambi, dengan jumlah penduduk kota Jambi pada tahun 2022 adalah 619.553 jiwa yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan atau 68 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan tersebut dan perkiraan timbulan sampah 0,70 kilogram per orang per hari, maka jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh kota adalah sekitar 433.687,10 kg/hari. Dengan timbulan sampah terbesar ada Kecamatan Alam Barajo sebesar 79.202,20 kg/hari, sedangkan timbulan sampah terkecil ada di Kecamatan Pasar Jambi yang hanya sebesar 7.802,90

kg/hari. Untuk lebih detail mengenai data timbulan sampah dikota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.76**  
**Jumlah Penduduk Per-Kecamatan dan Potensi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Massa Sampah (Kg /Orang /Hr)	Total Sampah (Kg/Hari)	Perlakuan				Massa Sampah Terangkut Ke Tpa (Kg/Hari)	Massa Sampah Terolah Di TPS 3R dan Bank Sampah/Hari (Kg/Hari)	Massa Sampah Terkurangi ( kg/Hari)	Sampah Yang Terkelola/Hr (Kg)	Persentase Sampah Yang Terkelola (%)
					TPA	Tps3r /Bs	Pembatasan Kantong Belanja	Tanpa Akses					
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8	9	10 = 5*6	11 = 5*7	12=5*8	13=10+11+12	14=(13/5)*100
1	Kota Baru	83.381	0,7	58.366,70	75%	5%	0,10%	19,90%	43.775,03	2.918,34	58,37	46.751,73	80,10%
2	Alam Barajo	113.146	0,7	79.202,20	73%	7%	0,10%	19,90%	57.817,61	5.544,15	79,20	63.440,96	80,10%
3	Jambi Selatan	57.515	0,7	40.260,50	73%	5%	0,10%	21,90%	29.390,17	2.013,03	40,26	31.443,45	78,10%
4	Paal Merah	108.182	0,7	75.727,40	73%	4%	0,10%	22,90%	55.281,00	3.029,10	75,73	58.385,83	77,10%
5	Jelutung	59.744	0,7	41.820,80	80%	1%	0,10%	18,90%	33.456,64	418,21	41,82	33.916,67	81,10%
6	Pasar Jambi	11.147	0,7	7.802,90	91%	6%	0,20%	2,80%	7.100,64	468,17	15,61	7.584,42	97,20%
7	Telanaipura	49.720	0,7	34.804,00	76%	7%	0,10%	16,90%	26.451,04	2.436,28	34,80	28.922,12	83,10%
8	Danau Sipin	43.734	0,7	30.613,80	72%	1%	0,10%	26,90%	22.041,94	306,14	30,61	22.378,69	73,10%
9	Danau Teluk	13.009	0,7	9.106,30	70%	1%	0,05%	28,95%	6.374,41	91,06	4,55	6.470,03	71,05%
10	Pelayangan	13.050	0,7	9.135,00	70%	2%	0,05%	27,95%	6.394,50	182,70	4,57	6.581,77	72,05%
11	Jambi Timur	66.925	0,7	46.847,50	75%	4%	0,10%	20,90%	35.135,63	1.873,90	46,85	37.056,37	79,10%
<b>Jumlah</b>		<b>619.553</b>		<b>433.687,10</b>					<b>323.218,59</b>	<b>19.281,07</b>	<b>432,37</b>	<b>342.932,03</b>	<b>79,07%</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi 2023.

Berdasarkan Komposisinya timbulan sampah di Kota Jambi terdiri dari 2 Komposisi yaitu sampah Organik dan sampah Anorganik. Sampah Organik merupakan penyumbang terbesar timbulan sampah di Kota Jambi, timbulan sampah yang dihasilkan oleh komposisi ini sebesar 95.030,09 m<sup>3</sup>/hari atau sebesar 61,9 % dari total timbulan sampah. Sedangkan sisanya merupakan komposisi timbulan sampah An Organik. Berikut ditampilkan data komposisi timbulan sampah di Kota Jambi.

**Tabel 2.77**  
**Komposisi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022**

No	Komposisi Sampah	Prosentase (%)	Jumlah Timbulan Sampah M <sup>3</sup> /Hari
1	ORGANIK	61,9	95.030,09
2	AN ORGANIK	38,1	
	a. Plastik	12,3	18.883,20
	b. Kaca	1,2	1.842,26
	c. Logam	0,3	460,57
	d. Limbah berbahaya	0,2	307,04
	e. Kertaskardus/karton	7,2	11.053,58
	f. Kain	2,1	3.223,96
	g. Karet	0,6	921,13
	h. Tulang belulang	0,1	153,52
	h. Lain-lain	14,1	21.646,59
	<b>Jumlah</b>	<b>100,0</b>	<b>153.521,95</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Tahun 2023.

#### 1) Sistem dan Infrastruktur

Kebijakan prasarana dan sarana persampahan dalam Rencana Induk ditinjau dari pengembangan wilayah berdasarkan RTRW adalah:

- a. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan.
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Perencanaan sistem persampahan dikelompokkan ke dalam dua kelompok kebijakan, yaitu: peningkatan layanan cakupan persampahan, dan perubahan pola sistem TPA menjadi *Sanitary Landfill*.

Saat ini, tengah dilakukan proses peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo dari sistem open dumping menjadi *Sanitary Landfill* yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, dan

juga sedang dibangun *Waste to Energy* (WTE) yang berlokasi di Pasar Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur.

Secara teknis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bertugas dalam hal pengumpulan sedangkan untuk pengangkutan sampah terutama dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

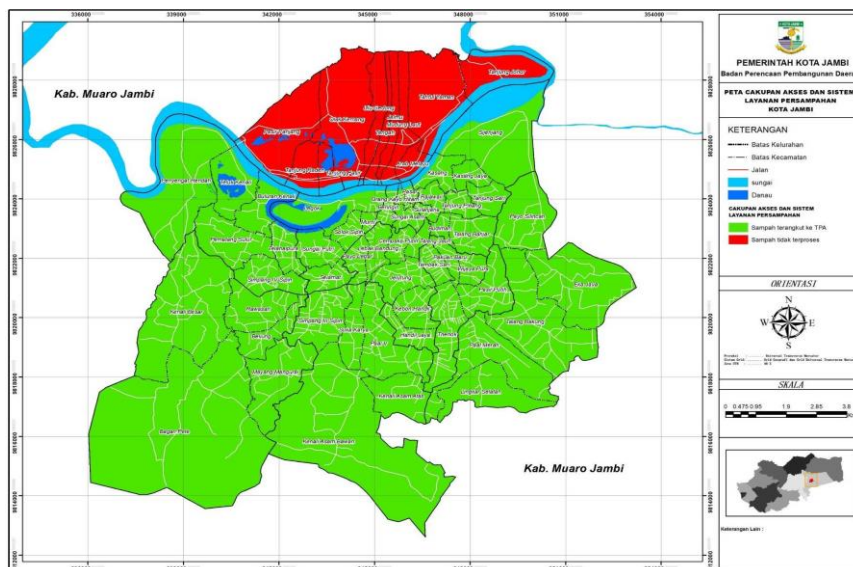
## 2) Kelembagaan dan Peraturan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, lembaga yang menangani pengelolaan sampah di Kota Jambi adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi sesuai dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru; Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan persampahan karena ditangani oleh 2 (dua) OPD dimana tugasnya merupakan satu kesatuan. Peraturan terkait pengelolaan sampah berupa peraturan mengenai retribusi sampah dan kebersihan, secara khusus peraturan mengenai pengelolaan sampah belum ada.

Kendala operasional yang terjadi adalah dimana proses pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tugas dan fungsi Bidang Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Sementara peralatan berada dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

## 3) Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan di Kota Jambi masih berupa penyediaan sarana pewadahan sampah di sumber sampah (seperti tong sampah pada sekolah/perkantoran) dan melakukan pemilahan sampah oleh kolektor sampah yang sekiranya memiliki nilai ekonomis. Sedangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi berupa penyediaan sarana pewadahan sampah untuk kebutuhan rumah tangga, mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS dan melakukan pemilahan sampah.



**Gambar 2.80**  
**Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan**  
**Persampahan Kota Jambi**

### 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, dilaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga.

Hingga tahun 2022, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 442.317 orang. Jika dibandingkan dengan penduduk dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk yang memiliki KTP-el telah mencapai 99,03%. Kondisi ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 95,68%

Tahun 2022 bayi lahir 1 tahun yang berakte kelahiran sebanyak 5.805 bayi dengan jumlah bayi lahir 7.080. Kondisi ini mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya, kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.78**  
**Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	229.944	254.387	7.998	5.900	5.805
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	614.329	616.359	8.286	6.131	7.080
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	446.304	437.164	444.205	450.989	446.641
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	427.041	218.832	443.049	450.376	442.317
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	95,68%	50,06%	98,74%	99,86%	99,03%
6.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	281.998	286.265	287.910	290.067	293.268
7.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	90.755	123.449	152.370	184.130	216.112

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2023.

### 2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

**Tabel 2.79**  
**Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	73	73	73	73	73
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)	0	0	0	0	0
4.	PKK aktif	73	73	73	73	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)					
7.	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)					
	a. Bidang Infrastruktur	310	310	310	310	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0

Sumber: DPMPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2023.

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok. Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

### 2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salah satunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.80**  
**Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,3	2,4	2,01	2,08
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	0,41 : 0,59
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	73.50	61.06	61.06	55,20	59,52
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	67.513	66.948	66.833	4.295	7,780*
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	69.99	59.31	59.31	42,50	55,67

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2023.

### 2.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarannya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.81**  
**Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)					
	a. Terminal	2	2	2	2	2
	b. Pelabuhan					
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	2	2	2	2	2
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%)					
	a. Jumlah total rambu (unit)	746	796	151	63	220
	b. Jumlah rambu lalu lintas (unit)	138	21	140	63	157
	c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	700	60	140	100	200
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	76%	80%	85%	90%	92%

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guadrill (%))	61%	-	69,69%	90%	92%
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)					
	a. Jumlah halte (unit)	-	25	25	25	25
	b. Jumlah marka jalan (unit)	2.292	2.218	10.000	2.794	2.627
	c. Jumlah paku jalan (unit)	-	-	-	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)		--	24	17	16
7.	Jumlah ATCS (unit)	5	3	6	7	1
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus)	1.243	841	658	369	509
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)					
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	455	457	202	364	560
11.	Jumlah korban kecelakaan					
	a. Meninggal	53	45	31	44	51
	b. Luka Berat	1	1	0	1	2
	c. Luka Ringan	723	661	291	502	666
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	534	815	464	498	654

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi di Kota Jambi dan jumlahnya cenderung menurun dari tahun 2018 dimana jumlah 1.241 kasus hingga 2021 sebanyak 369 kasus namun meningkat di tahun 2022 menjadi 509 kasus. Rendahnya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi telah tinggi.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 20 menit per kendaraan dengan variasi biaya



pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari tahun 2018-2022.

**Tabel 2.82**  
**Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1
2.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	34,14	22,43	10,70	9,30	12,59
3.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100
4.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	504.657	248.445	77.048	55.800	64.200
5.	Rasio ijin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	0,34	0,17	0,10	0,10	0,10
6.	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	0,99	0,97	0,90	0,91	0,94
7.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	81	113	60	28	22
	b. Mobil Bus	Unit	813	617	458	354	293
	c. Mobil Barang	Unit	28.700	25.664	30.438	33.510	22.717
	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji)	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	62	70	60	25	22
	b. Mobil Bus	Unit	489	498	395	287	158
	c. Mobil Barang	Unit	18.928	20.707	23.838	20.660	24.210
8.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	20	30	30	20
9.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah	-	-	-	-	-
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah	-	-	-	-	-
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus						
	1) JBB dibawah 2 ton	Rupiah	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2) JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3) JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	4) JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5) JBB diatas 24 ton	Rupiah	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	d. Plat/tanda uji	Rupiah	10.000	10.000	10.000	-	-
	e. Biaya Denda	Rupiah					
	f. Buku Uji	Rupiah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	g. Tanda Samping Uji (Cat)	Rupiah			-	-	-
	h. Tanda Samping Uji (Stiker)	Rupiah	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023.

### 2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan egovernment di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan

pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus sesuai kebutuhan rakyat, antara lain menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi masalah bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government, berdampak pada integritas system sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) tahun 2018 sebagai diamanatkan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*Maturity Level*) dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti:

**Tabel 2.83**  
**Nilai Indeks Kematangan SPBE**

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - <3,5	Baik
4.	1,8 - <2,6	Cukup
5.	<1,8	Kurang

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- Domain seperti kebijakan internal, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE.
- Aspek Seperti Tata Kelola, layanan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 35 Indikator yang merupakan informasi spesifik dari aspek pelayanan SPBE yang dinilai.

Penilaian SPBE yang belum terpenuhi sehingga Kota Jambi pada Tahun 2022 memperoleh Indeks SPBE dari Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 35 Indikator penilaian untuk Kota Jambi mendapat nilai 2,79 (Baik).

Untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media baru seperti website (*media online*); media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

**Tabel 2.84**  
**Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Website milik Pemerintah Daerah	28	40	40	43	43
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	51,85	74,07	74,07	79,63	79,63
3.	Persentase update website Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:					
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-
	b. Media baru seperti website ( <i>media online</i> ).	2	2	2	2	2
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023.

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website.

Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.81**  
**Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 secara keseluruhan tidak mengalami perubahan karena tidak bertambahnya siaran TV baik nasional maupun lokal. Masifnya perkembangan internet membuat perkembangan TV/Radio mengalami stagnasi.

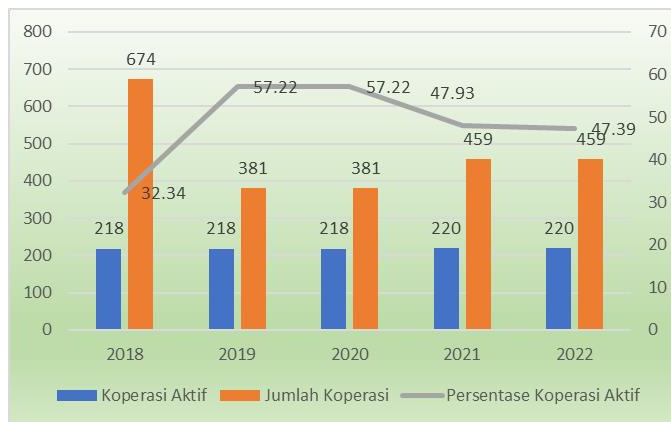


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.82**  
**Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2018 s.d. 2022 Kota Jambi**

### 2.3.2.11 Koperasi dan UKM

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Untuk tahun 2022 koperasi aktif berjumlah 220 unit, jumlahnya tetap sama dengan tahun lalu. Berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasanya paradigma pembinaan koperasi bukan lagi berorientasi pada kuantitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.83**  
**Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha

mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022, dimana pada tahun 2018 terdapat 10.763 unit meningkat menjadi 60.000 unit tahun 2022. Hal ini membuktikan kalau UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terbukti tetap bisa bertahan saat pandemi.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perizinan dimana hingga tahun 2022 UMKM yang telah memiliki perizinan/sertifikat sebanyak 10.763 unit, terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9.887 unit.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan tahun 2022 sebanyak 225 atau 0,0209% pelaku UMKM telah mendapatkan kesempatan mengikuti pameran meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 105 UMKM.

**Tabel 2.85**  
**Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang dibina)	Unit	10.763	10.763	10.763	10.763	10.763
2.	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	10.763	12.847	35.145	48.496	60.000
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0078	0,0088	0,0088	0,0097	0,0209
		Unit	95	95	95	105	225
3.	Cakupan bina kelompok UMKM	Unit	-	-	-	5 kel	102 kel
4.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit / Tahun	539	1.200	6.517	9.887	10.763
5.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	77,61	49,00	50,39	50,39	52,51

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2023.

### 2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.86**  
**Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah klub olahraga (buah)	30	218	218	218	218
2	Jumlah gedung olahraga (buah)	2	2	2	2	2
3	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	30	32	2	1	4
4	Jumlah organisasi pemuda (buah)	30	35	40	46	62
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	6	6	4	8	7

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2023.



## 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

#### a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan dan minuman jadi, bahan minuman dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, barang tahan lama, pajak pungutan dan asuransi, keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Berdasarkan Hukum Engel (*Engel Law*) bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2022 total konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 2.87**  
**Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah**  
**Tangga di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	16.415,75	17.584,80	17.679,42	18.860,43	20.730,26
ADHK 2010 (Miliar Rp)	11.483,38	12.061,84	12.020,30	12.536,50	13.068,18
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	57,00	57,40	60,00	59,14	57,36
Rata-rata konsumsi Perkapita					
ADHB (Juta Rp)	27,45	29,08	28,92	30,81	33,46
ADHK 2010 (JutaRp)	19,20	19,95	19,66	20,48	21,09
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT	1,05	2,43	-2,75	1,83	1,83
Perkapita	2,51	3,89	-1,42	4,16	3,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Selama periode 2018-2022 rata-rata konsumsi perkapita cenderung meningkat, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 yaitu 27,45 persen pada tahun 2018 menjadi 33,46 persen pada tahun 2022 menurut Atas dasar Harga Berlaku. Sedangkan menurut Atas Dasar Harga Konstan yaitu 19,20 pada tahun 2018 meningkat menjadi 21,09 di tahun 2022.

Pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 16.145 milyar Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 20.730 milyar Rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010).

Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pertumbuhan konsumsi rumahtangga berkisar antara 2 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 4,16 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada pengeluaran perkapita di Kota Jambi, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.88**  
**Persentase Pengeluaran Perkapita menurut Kelompok Komoditas di Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Makanan, Minuman, dan Rokok	44,20	44,62	43,68	43,99	44,64
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	26,08	25,81	28,83	29,77	30,11
Aneka Barang dan Jasa	12,15	12,64	13,75	13,17	13,99
Pakaian, Alas Kaki dan tutup kepala	3,33	3,27	2,94	2,49	2,80
Barang Tahan Lama	-	-	5,49	5,23	3,41
Pajak, pungutan dan asuransi	-	-	3,58	4,51	4,65
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	-	-	1,73	0,84	0,39
<b>Total Konsumsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

Secara rata-rata dari tahun 2018 s.d 2022, nampak pada pengeluaran perkapita perkomoditas di Kota Jambi, dimana konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 44,20 pada tahun 2018 dan 44,64 Pada tahun 2022.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki, barang tahan lama dan sebagainya.

## **2.4.2 Produktivitas Total Daerah**

### **2.4.2.1 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

#### **a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Sampai dengan tahun 2022 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

#### **b. Akseibilitas Daerah**

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/ akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

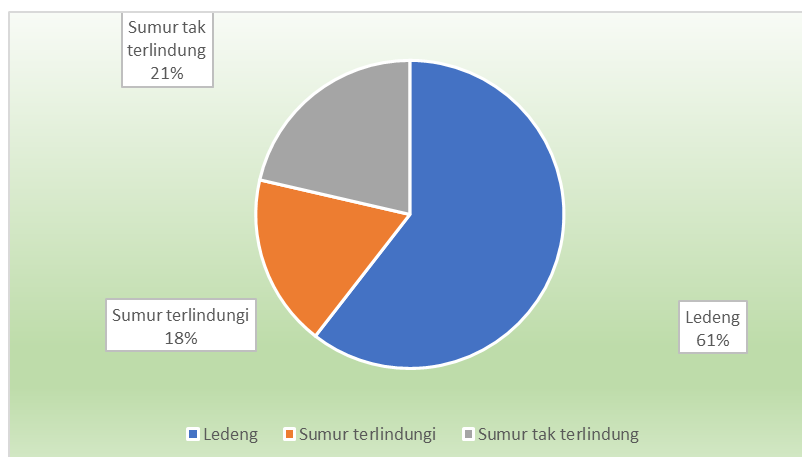
**Tabel 2.89**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan (KM)	510,45	510,45	510,45	510,45	510,45
2.	Jumlah Kendaraan					
	a. Roda 4	dta	dta	dta	dta	dta
	b. Roda 2	dta	dta	dta	dta	dta
3.	Rasio	dta	dta	dta	dta	dta

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023.

### c. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.



**Gambar 2.84**  
**Sumber air bersih**

**Tabel 2.90**  
**Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota**  
**Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ledeng (Perpipaan)	164.489	237.858	85.820	86.982	86.990
2.	Sumur Lindung	40299	60.734	23.183	25.132	26.012
3.	Sumur Tidak Terlindung	34144	37.385	29.506	30.756	31.820
4..	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	337.604	459.993	138.509	142.870	142.917
5..	Jumlah Rumah Tangga	557.435	688.113	144.281	145.786	145.824
6..	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	60,56	66,85	96	98	99

*Sumber: BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.*

**d. Fasilitas Listrik**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 488.187 pelanggan. Adapun pada tahun 2022, rumah tangga pengguna listrik menurun menjadi 238.165. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.85**  
**Jumlah Rumah Tangga Pengguna menggunakan Listrik di Kota Jambi**  
**Tahun 2018-2022**

### 2.4.3 Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

#### a. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan, kemudahan dalam memperoleh perizinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.91**  
**Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2022**

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (rata-rata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	OSS	-	-
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	OSS	-	-
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	OSS	-	-
4.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	OSS	-	-
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	28 Hari Kerja	22	Tergantung Ukuran Luas Bangunan
6.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (MBR)	28 Hari Kerja	11	Tergantung Ukuran Reklame
7.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 Hari Kerja	12	Tergantung jenis usaha
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	OSS	-	-

Sumber : DPMPTSP Kota Jambi, 2023.

**b. Pengenaan Pajak Daerah**

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 320.380.000.000 atau tercapai sebesar 92,20% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 301.796.809.124 selain pajak daerah terdapat retribusi dimana pada tahun 2022 sebesar Rp. 50.544.550 atau tercapai target sebesar 79,57% atau sebesar Rp. 40.216.623.270. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parkir.

**Tabel 2.92**  
**Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	<b>Pajak Daerah</b>					
	Target	203.500.000.000	242.090.000.000	232.060.000.000	297.860.000.000	320.380.000.000
	Realisasi	215.444.433.999	256.028.625.688	216.815.393.479	244.726.978.039	301.796.809.124
	Persentase	105,87%	105,76%	93,43%	82,16%	94,20%
2	<b>Junlah Retribusi</b>					
	Target	44.012.000.000	45.066.647.000	36.618.000.000	55.312.900.000	50.544.550.000
	Realisasi	40.389.059.087	38.541.261.596	40.479.596.104	51.844.265.428	40.216.623.270
	Persentase	91,77%	85,22%	110,55%	93,73%	79,57%

Sumber: BPPRD, BPKAD Kota Jambi, 2023.



### c. Angka Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Demonstrasi di Kota Jambi pada tahun 2022 hanya 1 yaitu demonstrasi ekonomi. Berkaitan dengan Kejadian demo di Kota Jambi bisa dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.93**  
**Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Demonstrasi Politik	6	-	-	1	-
2.	Demonstrasi Ekonomi	-	5	2	2	1
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Jambi, 2023.

#### 2.4.4 Sumberdaya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak

digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

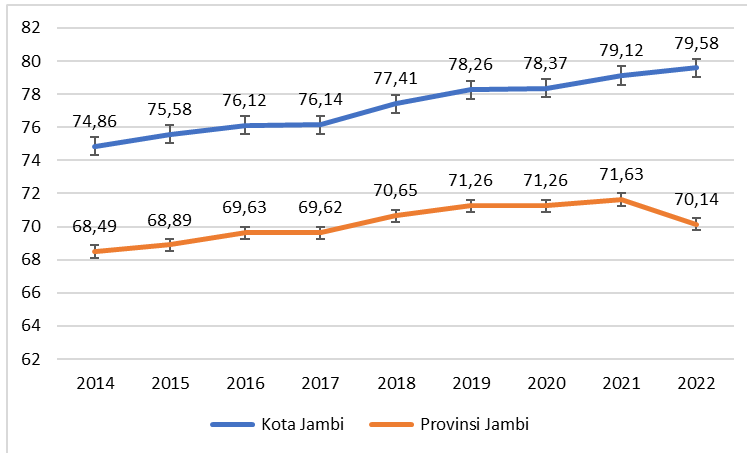
Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Mulai Tahun 2014, telah dipakai IPM metode baru sesuai dengan rekomendasi PBB. Perbedaan metode baru dengan metode lama ini adalah dimensi pendidikan dimana angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas.

IPM Kota Jambi pada tahun 2014 sampai 2022 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Dibandingkan dengan Provinsi Jambi, capaian IPM Kota Jambi selalu lebih tinggi. IPM Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 79,58 lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi yaitu 70,14. Nilai IPM Kota Jambi lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM di Kota/Kabupaten Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.94**  
**Indek Pembangunan Manusia**  
**Menurut Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Jambi 2014-2022**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	68,45	68,89	69,67	69,68	70,59	70,95	71,21	71,45	71,99
Merangin	67,25	67,15	67,86	67,86	68,81	69,07	69,19	69,53	69,98
Sarolangun	67,67	68,1	68,79	68,73	69,41	69,72	69,86	70,25	70,89
Batanghari	67,99	68,05	68,91	68,7	69,33	69,67	69,84	70,11	70,51
Muara Jambi	66,12	66,66	67,58	67,55	68,34	69,01	69,18	69,55	70,18
Tanjab Timur	60,86	61,12	61,86	61,88	63,32	63,92	64,43	64,91	65,77
Tanjab Barat	64,22	65,03	66	65,91	67,13	67,54	67,54	68,16	68,79
Tebo	67,33	67,29	68,04	68,05	68,67	69,02	69,14	69,35	69,78
Bungo	68,08	68,34	68,73	68,77	69,42	69,86	69,92	70,15	70,55
<b>Kota Jambi</b>	<b>74,86</b>	<b>75,58</b>	<b>76,12</b>	<b>76,14</b>	<b>77,41</b>	<b>78,26</b>	<b>78,37</b>	<b>79,12</b>	<b>79,58</b>
Kota Sungai Penuh	73,67	73,03	73,38	73,35	74,67	75,36	75,42	75,7	76,17
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>68,49</b>	<b>68,89</b>	<b>69,63</b>	<b>69,62</b>	<b>70,65</b>	<b>71,26</b>	<b>71,26</b>	<b>71,63</b>	<b>70,14</b>

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023.



Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023.

**Gambar 2.86**  
**Grafik Perkembangan IPM Kota Jambi 2014-2022 Terhadap IPM**  
**Provinsi Jambi**

## 2.5 EVALUASI HASIL RPJPD KOTA JAMBI TAHUN 2005-2025

### 2.5.1 Hasil Capaian Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi Tahun 2005-2025. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi Tahun 2005-2025 yaitu “Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”. Visi tersebut mengarah pada kebijakan pembangunan daerah yang diharapkan dalam kurun waktu 20 tahun dapat mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa yang penduduknya religius dan berbudaya luhur. Religius mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Jambi adalah masyarakat yang beragama. Berbudaya berarti kemuliaan moral, etika dan menjamin keharmonisan hubungan antar dan intern umat beragama.

Dalam RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, diharapkan pembangunan diarahkan kepada upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi Kota Jambi dalam bidang perdagangan baik untuk industri kecil, menengah dan besar sehingga dapat menjadi pusat perdagangan barang dan jasa. Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi juga memiliki peran sebagai pusat berbagai

kegiatan baik administrasi pemerintahan maupun perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Visi RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 diwujudkan melalui misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi.
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksanaan pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah.

9. Mewujudkan Kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui Kerjasama regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan yang tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Untuk pelaksanaan evaluasi RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, BAPPEDA Kota Jambi melakukan penghimpunan dan telaah dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Jambi;
- b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Jambi; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sampai satu tahun sebelum pelaksanaan evaluasi.

Terhadap dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan/penelitian, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen,

membandingkan materi antar dokumen dengan sumber-sumber data lain yang tervalidasi.

Melalui hasil penghimpunan dan telaah terhadap RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Jambi Periode 1, 2, 3 dan 4 maka selanjutnya akan diuraikan capaian kinerja RPJPD pada akhir periode atau dalam hal ini satu tahun sebelum evaluasi yaitu tahun 2022 terkait Indikator Kinerja Makro (IKM) Kota Jambi.

#### **I. RPJMD Kota Jambi Periode 1 (2008-2013)**

Dalam RPJMD Kota Jambi 2008-2013, terdapat 4 (empat) misi, 9 (sembilan) tujuan dan 46 (empat puluh enam) sasaran. Tujuan yang termuat adalah; (1) Mendorong tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan kompetensi kerja masyarakat Kota Jambi yang religius adalah membenahi dan menertibkan regulasi (2) Menjadikan masyarakat Kota Jambi yang religious dan berbudi pekerti luhur (3) Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi di antara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa serta menjaga ketahanan pangan masyarakat dengan mengutamakan sumber daya dan potensi daerah (4) Menyediakan infrastruktur dan utilitas kota yang mampu mendukung aktivitas masyarakat (5) Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (6) Mengembangkan birokrasi yang semakin professional dan akuntabel (7) Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi (8) Mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel (9) Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut terdapat 46 (empat puluh enam) sasaran. Alat ukur yang dipergunakan untuk menilai hal tersebut antara lain penurunan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu

lingkungan hidup. Pada prinsipnya alat ukur tersebut sejalan dengan Indikator Makro yang pencapaiannya dalam Periode 1 sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi mencapai 75,47. Nilai IPM Kota Jambi pada akhir periode RPJMD ke-1 mencapai 74,21 atau mengalami penurunan 1,26. Penurunan ini lebih disebabkan adanya metode perubahan penghitungan IPM. Pada penghitungan model lama, indikator yang dipergunakan adalah angka melek huruf dan PDRB Per kapita. Selain itu penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan pencapaian yang rendah di suatu dimensi pengukuran dapat ditutupi capaian tinggi di dimensi yang lain. Sejak tahun 2010, metode penghitungan IPM berubah dengan mempergunakan Angka harapan Sekolah dan Produk Nasional Bruto Per kapita. Metode penghitungan aritmatik diganti dengan metode penghitungan geometrik. Pada saat itu, IPM Kota Jambi sebesar 72,23. Artinya sejak perubahan metode penghitungan pada tahun 2010 hingga akhir periode yaitu tahun 2013 terjadi peningkatan IPM sebanyak 1,98 poin.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2008, angka kemiskinan di Kota Jambi sebesar 11.63 %. Pada tahun 2013, Angka kemiskinan di Kota Jambi mencapai 9.96 %. Artinya terdapat penurunan tingkat kemiskinan 1.67 poin dalam rentang waktu 2008 – 2013. Penurunan angka kemiskinan di Kota Jambi dalam periode 1 RPJMD terjadi konstan setiap tahunnya dengan pengecualian pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan yang jumlahnya tidak terlalu signifikan. Angka kemiskinan terendah pada RPJMD periode 1 terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 9.27 %.

c. Angka Pengangguran

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan salah satunya diukur dari tingkat pengangguran atau angka pengangguran. Dalam RPJMD periode 1, tingkat pengangguran di Kota Jambi pada tahun 2018 sebesar 7.13 %. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran mencapai 7,44 %. Terdapat kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0,31 poin dari kondisi awal. Tingkat pengangguran terendah dalam RPJMD Periode ke-1 adalah pada tahun 2011 sebesar 3,60 % dan pada tahun 2012 sebesar 4,89 %. Terkait tingkat pengangguran yang rendah pada tahun 2011 dan 2012 berhubungan dengan booming komoditi tambang Batubara dan komoditi perkebunan karet yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan selama dua tahun tersebut. Tingkat pengangguran yang cenderung naik meski kecil pada akhir RPJMD periode 1, menunjukkan bahwa kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja masih belum maksimal.

#### d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter paling umum untuk melihat perkembangan suatu wilayah. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 6,14 %. Pada akhir tahun RPJMD periode 1, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 8.50 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada periode hanya sekali mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 sebesar 7,67 % dan sebelumnya 7,79 % pada tahun 2011. Dapat disimpulkan bahwa pada RPJMD Periode 1, kondisi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan mengalami peningkatan pertumbuhan terjadi di Kota Jambi.

#### e. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok di tengah masyarakat. Ketimpangan pendapatan biasanya diukur dengan menggunakan koefisien gini atau



lebih dikenal sebagai rasio gini dengan skala antara 0-1. Semakin besar rasio gini menunjukkan semakin besarnya ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2011, rasio gini Kota Jambi sebesar 0,30. Pada akhir periode RPJMD 1, tahun 2013, rasio gini Kota Jambi sebesar 0,34.

f. PDRB Per kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. RPJMD Periode 1, pada tahun 2008 PDRB Per kapita Kota Jambi sebesar Rp. 14.772.762,22. Pada akhir RPJMD periode 1, tahun 2013, Pendapatan Per Kapita Kota Jambi mencapai Rp. 22.182.674,00.

## **II. RPJMD Kota Jambi Periode 2 (2013-2018)**

RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 atau periode 2 memuat 5 (lima) misi, mengedepankan 6 (enam) prioritas pembangunan, memuat 11 (sebelas) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran. Adapun 11 (sebelas) tujuan tersebut yaitu: (1) Meningkatkan dan Mewujudkan Pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (2) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman (3) Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelanjutan (4) Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah (5) Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata (6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan (7) Peningkatan Ketentraman Kehidupan Beragama (8) Pengembangan Lapangan Usaha dan Penciptaan Kesempatan Kerja (9) Peningkatan

Kesejahteraan Gender di Semua Aspek Pembangunan (10) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) (11) Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal. Untuk mengetahui pencapaian RPJMD Kota Jambi 2013-2018 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Makro pada kurun waktu periode kedua RPJPD Kota Jambi 2005-2025 yang akan diuraikan di bawah ini.

a. Indeks Pembangunan Manusia

RPJMD Periode 2 berlangsung dari tahun 2013-2018. Pada tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi sebesar 74,86. Tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jambi mencapai 78,26. Sejak dilakukannya perubahan metodologi penghitungan, pada periode ke-2 RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 terjadi peningkatan IPM sebesar 3,4 poin atau ekuivalen dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,68 dalam pencapaian IPM Kota Jambi.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2013, Angka Kemiskinan di Kota Jambi mencapai 9,80 %. Pada akhir RPJMD periode 2 atau tahun 2018, Angka Kemiskinan Kota Jambi berada di kisaran 8,49 %. Selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata Angka Kemiskinan di Kota Jambi adalah sebesar 9,10 %. Kinerja penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2013 dan 2015 belum berhasil untuk menurunkan Angka Kemiskinan namun pada 3 (tiga) tahun terakhir dalam periode tersebut terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan.

c. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran di Kota Jambi pada tahun 2013 sebesar 8,5 %. Angka Pengangguran pada tahun terakhir RPJPD Kota Jambi periode

2 atau RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 sebesar 5,55 %. Selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata Angka Pengangguran di Kota Jambi mencapai 6,55 %. Kinerja penurunan Angka Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,68 %.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada awal tahun RPJMD Kota Jambi 2013-2018, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi menyentuh angka 8,50 %. Tahun 2018 atau tahun terakhir RPJPD Kota Jambi periode 2, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,30 %. Selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 6,43 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,50 % dan terendah pada tahun 2017 sebesar 4,68 %.

e. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2013, ketimpangan pendapatan di Kota Jambi yang digambarkan melalui koefisien gini atau gini rasio mencapai 0,34. Tahun 2018, gini rasio Kota Jambi ada pada angka 0,33. Artinya terjadi keberhasilan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Jambi dalam periode 2, RPJPD Kota Jambi tahun 2013-2018.

f. PDRB Per kapita

Tahun 2013, PDRB Per Kapita Kota Jambi sebesar Rp. 26.546.800,00. Pada akhir RPJPD periode 2 atau RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018, Pendapatan Per kapita menyentuh angka Rp. 31.264.700,00. Selama kurun waktu 2013-2018 terdapat peningkatan PDRB Per kapita setiap tahunnya. Kinerja peningkatan PDRB Per Kapita terjadi pada tahun 2016 dan 2018.

### **III. RPJMD Kota Jambi Periode 3 (2018-2023)**

RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 memuat 5 (lima) misi dan 6 (enam) tujuan. Tujuan yang termuat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu: (1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun (2) Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (3) Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (4) Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan yang dilihat dari indikator tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (5) Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (6) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing yang akan ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Kriteria Kota Layak Anak, Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Persentase Penduduk Miskin.

Adapun capaian Indikator Makro dalam kurun waktu penyelenggaraan RPJMD 2018-2023, hanya diuraikan sampai tahun 2022 sebagaimana ketentuan evaluasi terkait RPJPD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 600.2.1/1570/SJ tanggal 15 Maret 2023. Pencapaian indikator makro Kota Jambi diuraikan seperti di bawah ini.

#### **a. Indeks Pembangunan Manusia**

Tahun 2018 merupakan awal pelaksanaan RPJMD Periode 3 dalam RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi adalah 77,41. Pada tahun 2022, IPM Kota Jambi telah mencapai 79,58. Dalam kurun waktu 2018-2022, IPM Kota Jambi mengalami pertumbuhan yang positif. Secara akumulasi

terdapat pertumbuhan IPM sebesar 2,17 poin dibandingkan posisi IPM awal pada tahun 2018.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2018, Angka Kemiskinan di Kota Jambi mencapai 8,49 %. Tahun 2022, Angka Kemiskinan di Kota Jambi menyentuh 8,33 %. Selama Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Februari 2020, trend Angka Kemiskinan Kota Jambi cukup terpengaruh. Pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 9,02 % dan merupakan persentase tertinggi selama pandemi terjadi. Kinerja penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2022 berhasil menekan penurunan sebesar 0.69 poin atau menjadi 8,33 %.

c. Angka Pengangguran

Tahun 2018, angka pengangguran Kota Jambi mencapai 6,41 %. Tahun 2022, angka pengangguran Kota Jambi menyentuh angka 8,33. Masih terkait dengan Pandemi Covid-19 yang memukul hampir seluruh sektor perekonomian, angka pengangguran di Kota Jambi sempat menyentuh 10,49 % dan 10,66 % pada tahun 2020 dan 2021. Tingginya angka pengangguran pada tahun dimaksud dikarenakan banyak sektor usaha yang tutup dan tak mampu bertahan di tengah pandemic.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,30 %. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,36 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi juga mengalami tekanan sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan luar ruangan, banyaknya pelaku dunia usaha yang tak bisa bertahan dan mensiasati pandemi dan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sempat terdeapresiasi atau mengalami penurunan hingga -3,96 % pada tahun 2020. Seiring

waktu pada tahun 2021, sejalan dengan program pemulihan ekonomi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi kembali mengalami apresiasi positif sebesar 3,94 %.

e. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Jambi tergambar melalui gini rasio sebesar 0,33. Tahun 2022, gini rasio di Kota Jambi mencapai 0,36. Peningkatan gini rasio tersebut menunjukkan bertambahnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dalam Kota Jambi. Salah satu utamanya adalah efek dari pelambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang memukul sektor perekonomian di Kota Jambi.

f. PDRB Per kapita

Pada tahun 2018, PDRB Per kapita Kota Jambi berada di kisaran Rp. 31.264.700,00. Pada tahun 2022, PDRB Kota Jambi mencapai Rp. 31,921.081,00. Terdapat peningkatan PDRB Per kapita pada akhir tahun Periode RPJMD 2018-2023 dibandingkan dengan tahun awal tahun periode. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan salah satunya dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020-2021 dan mulai melandai pada tahun 2022 yang mengakibatkan terjadinya pelambatan perekonomian.

### **2.5.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025**

Uraian hasil capaian RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 secara umum menunjukkan adanya keberhasilan dalam pencapaian sasaran pokok dan implementasi kebijakan. Capaian-capaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian-capaian tersebut maka disusun rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dokumen RPJPD ke depan, perlu memperhatikan aspek ketercapaian perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil

evaluasi dan keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan pembangunan. Dan mengacu pada Permendagri Nomo 86 Tahun 2017.

2. Perlu dipertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah antara lain berkaitan dengan penyempurnaan formulasi kata/kalimat, tujuan dan sasaran kebijakan dan strategi, indikator, dan target kinerja pada setiap pentahapan RPJPD.
3. Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPD periode selanjutnya, perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana atau *on-track*.
4. Sebagai tindak lanjut setelah tersusunnya dokumen RPJPD, perlu disusun pentahapan pembangunan lima tahunan yang adaptif, dan berkesinambungan antar setiap tahap pembangunan.
5. Perlu ada mekanisme penyesuaian pada setiap periode pelaksanaan atas dokumen perencanaan (jangka panjang/menengah/tahunan) mengingat perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga seperti pandemi dan isu yang berkembang.
6. Hasil evaluasi RPJPD diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, program serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2030 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2045.

### **2.5.3 Kinerja RTRW dan Rencana Sektorial dalam Dokrenda**

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 berkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Secara periode masa berlaku maka RPJPD Kota Jambi linear dengan dokumen Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Jambi.

## **2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK**

**2.6.1 Analisis Proyeksi kependudukan per lima tahun sampai 2045**

**2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per lima tahun sampai 2045**



# B A B III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH



### 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi timbulnya indikasi ketidakseimbangan pembangunan terhadap aspek-

aspek perkotaan. Semakin pesat perkembangan akan berpotensi semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan masalah yang komprehensif, akurat, dan akuntabel.

Tujuan pemetaan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan saat ini dan yang akan datang di Kota Jambi dan berpotensi menghambat proses pembangunan dalam periode 2025-2045. Permasalahan Kota Jambi diidentifikasi dalam beberapa aspek, meliputi: aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola dengan melihat *gap* capaian indikator pembangunan ataupun bersumber dari penjarangan isu dan permasalahan di Kota Jambi.

#### **A. ASPEK SOSIAL EKONOMI**

Pada aspek sosial ekonomi, persoalan utama pembangunan utama Kota Jambi saat ini yaitu belum tercapainya indikator kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Kota Jambi berada pada angka 8,24%. Dilihat dari Tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada 8,49%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,05% per tahun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena trend angka kemiskinan tersebut dapat dikategorikan stagnan dan cenderung meningkat terutama pasca Pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Kota Jambi belum secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Demikian halnya dengan Rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Rasio Gini Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 0,339 dan meningkat menjadi 0,371 pada tahun 2023. Data menunjukkan bahwa setiap tahun Rasio Gini Kota Jambi cenderung meningkat dan ini berarti tingkat ketimpangan bertambah. Semakin mendekati angka 1, berarti menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.

Dari aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 masih tinggi sebesar 8,27%. Angka ini belum mampu kembali pada level sebelum terjadinya pandemi di tahun 2019 pada angka 6,72%. Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 yang dikendalikan dengan beberapa kebijakan seperti pembatasan aktivitas di ruang publik turut andil membuat tingkat pengangguran di Kota Jambi meningkat. Selain itu kurangnya ketersediaan tenaga kerja berkualitas atau terampil di Kota Jambi yang dapat memenuhi kebutuhan industry juga berpengaruh. Kekurangan ini dapat mempengaruhi kapasitas produksi dan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, selain meningkatkan ketersediaan lapangan-lapangan kerja baru, maka dibutuhkan penciptaan aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja di Kota Jambi sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja saat ini. Namun demikian, rendahnya daya saing kemampuan dari tenaga kerja saat ini juga menjadi tantangan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Tujuannya untuk membuat tenaga kerja di Kota Jambi mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan *skill* yang mumpuni.

Peran Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini belum secara optimal mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja. Kurangnya pendidikan dengan sistem vokasi juga untuk berperan dalam ketidaksiapan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di Kota Jambi. Akibatnya, terdapat ketidakcocokan antara spesifikasi yang dibutuhkan pasar dengan kualitas tenaga kerja yang ada yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan tenaga kerja tersedia. Kedepan, dibutuhkan *link and match* antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah pemberdayaan UMKM/IKM lokal. Namun demikian, daya saing dari produk UMKM/IKM lokal di pasar masih rendah. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang masih rendah, kurang optimalnya penggunaan teknologi produksi, hingga kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah dalam meningkatkan produktivitas UMKM/IKM lokal. Upaya peningkatan produktivitas perlu didorong dengan penciptaan lingkungan atau ekosistem yang mendukung aktivitas kegiatan

UMKM/IKM lokal seperti peningkatan kemampuan *entrepreneurship*, akses modal, penyediaan pasar yang inklusif, dan sebagainya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat saat ini masih minimnya dukungan terhadap inovasi produk dan pemasaran UMKM/IKM lokal dan keterjangkauan program-program pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola dan tenaga kerja UMKM/IKM lokal masih belum optimal.

Di sisi lain, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih harus menjadi perhatian di Kota Jambi. Pada periode 2018-2022, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besar kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga. Pemicu terbesar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi ekonomi perekonomian keluarga dan pernikahan dini yang menyebabkan anggota rumah tangga belum memiliki kesiapan dalam berkeluarga serta memiliki kondisi mental psikologis yang belum stabil.

Sebagai daerah yang mempunyai sejarah kebudayaan, Kota Jambi memiliki berbagai situ/cagar budaya yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata budaya atau religi. Pengembangan objek ini tentunya akan berpotensi untuk mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru, memberikan pasar bagi industri UMKM serta berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk saat ini destinasi tersebut belum dikelola dengan baik.

Dari sisi dukungan eksternal dalam sektor ekonomi, peran investasi khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari luar negeri terhadap pengembangan ekonomi di Kota Jambi masih tergolong lemah. Dalam proses pembangunan ekonomi, investasi tentu memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan mempengaruhi dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan *output* yang positif. Iklim investasi di Kota Jambi sebenarnya cukup kondusif dan memiliki nilai yang cukup tinggi dari sektor PMDN. Pada tahun 2023, investasi PMDN meningkat sangat signifikan hingga mencapai Rp. 1.103.057.400,00 dari sebelumnya sebesar Rp. 653.052.700.000,00 pada tahun 2022. Sayangnya, PMA di Kota

Jambi belum menunjukkan nilai yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah jika dibandingkan dengan PMDN bahkan cenderung menurun. Investasi PMA tertinggi pernah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 425.925.000.000,00 sementara pada tahun 2023 hanya sebesar Rp. 254.910.760.000,00. Padahal, Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB atas dasar harga berlaku yang dimiliki Kota Jambi sebesar Rp. 6.292,62 Milyar rupiah pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar Rp. 7.867,74 Milyar rupiah.

Selain dalam hal investasi, kurangnya peran pihak swasta dalam pengembangan ekonomi di kota Jambi juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Pada dasarnya, pemerintah dan swasta memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu kondisi perekonomian suatu daerah. Dengan adanya hubungan yang saling mendukung dan berkesinambungan antara pemerintah dan swasta, maka akan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan aktivitas dan taraf ekonomi ekonomi suatu daerah. Selain dalam hal perputaran ekonomi, pihak swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan terlibat dalam pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah, utamanya

**Tabel 3.1**  
**Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sosial dan Ekonomi**

Pusat Isu	Permasalahan
Sosial Ekonomi	1. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan
	2. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
	3. Rendahnya daya saing tenaga kerja/Kurangnya Ketersediaan tenaga kerja berkualitas (Terampil)
	4. Belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil
	5. Kurangnya Pendidikan Vokasi untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang terampil
	6. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata
	7. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis cagar budaya dan religi

Pusat Isu	Permasalahan
	8. Relatif masih tingginya kasus kejahatan terhadap anak
Sumber Daya Ekonomi	1. Rendahnya daya saing UMKM/IKM lokal
	2. Kurang optimalnya Tingkat penggunaan teknologi produksi oleh IKM
	3. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi produk-produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif
	4. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi pemasaran produk-produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif
	5. Kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah untuk meningkatkan produktivitas IKM
	6. Belum optimalnya penataan pasar dan pedagang K5
	7. Perlunya peningkatan Pembinaan dan pelatihan pengelola dan tenaga kerja IKM
Dukungan Ekonomi	1. Masih minimnya peran investasi luar negeri terhadap pengembangan Ekonomi
	2. Masih minimnya peran pihak swasta dalam pengembangan Ekonomi

## B. Aspek Sumberdaya Manusia

Stunting masih menjadi fokus utama dalam upaya penanganan masalah kesehatan masyarakat. Meskipun berada di bawah level nasional, prevalensi Stunting Kota Jambi tergolong tinggi, pada tahun 2022 berada di angka 14 %. Dari sisi penyediaan layanan kesehatan, Kota Jambi memiliki permasalahan terkait masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter umum dan dokter spesialis serta tingkat profesionalisme tenaga kesehatan yang masih rendah. Hal ini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2023, rasio dokter per penduduk di Kota Jambi sebesar 22,186 per 100.000 penduduk. Angka ini jauh dibawah nasional yang

berada pada angka 32 dokter per 100.000 penduduk. Salah satu implikasinya adalah penanganan kasus *Tuberculosis* (TBC) dan HIV/AIDS masih belum optimal karena keterbatasan dari kuantitas dan kualitas tenaga kerja kesehatan yang memadai. Meskipun demikian persentase capaian *Treatment Coverage* (TC) untuk penderita TBC di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2023 persentase TC mencapai 35,15%, meningkat dari TC tahun 2022 sebesar 26,06%.

Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia juga terjadi di sektor pendidikan yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan. Salah satu isu utama adalah kualitas tenaga pendidik yang tidak merata yang ditandai dengan minimnya sertifikasi dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Rasio guru dan murid Kota Jambi masih berada di bawah level nasional yakni 0,057 untuk tingkat SD sederajat dan 0,066 untuk tingkat SMP dan sederajat pada tahun 2023.

Selain itu, kualitas infrastruktur pendidikan dari tingkat SD hingga SMP yang menjadi kewenangan kota perlu untuk ditinjau kembali agar dapat benar-benar memadai dan mendukung proses pembelajaran yang modern, berbasis teknologi dan bersifat inklusif. Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pihak swasta dalam sektor pendidikan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan yang ada di wilayahnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan jaminan kesehatan. Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023 Persentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan pada Tahun 2022 sebanyak 74,92%. Jaminan Kesehatan terdiri dari BPJS kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Swasta dan Asuransi Perusahaan/Kantor. Persentase dari berbagai jenis jaminan kesehatan di Kota Jambi yaitu BPJS kesehatan sebesar 69,44%, Jamkesda sebesar 1,37%, Asuransi Swasta sebesar 0,97% dan perusahaan/kantor sebesar 3,14%. Untuk tahun 2023, penduduk Kota Jambi yang dilayani oleh Jamkesda meningkat menjadi 4,21% atau 26.469 jiwa.

Tabel 3.2

**Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sumberdaya Manusia**

Pusat Isu		Permasalahan
Kualitas Masyarakat	Kesehatan	Masih terdapatnya kasus stunting
		Belum optimalnya penanganan kasus TBC dan HIV/AIDS
		Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis.
		Masih rendahnya profesionalisme tenaga paramedis (bidan dan perawat) dalam memberi layanan medis kepada masyarakat
		Belum maksimalnya kepesertaan jaminan kesehatan
Kualitas Masyarakat	Pendidikan	Persebaran kualitas tenaga pendidik yang belum merata
		Rasio tenaga pendidik dengan peserta didik yang masih rendah
		Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan maju dan modern.

**C. Infrastruktur Daerah**

Ketersediaan infrastruktur daerah terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah. Salah satu komponen infrastruktur daerah yang perannya strategis dalam mendorong kegiatan logistik adalah jalan. Seiring peningkatan aktivitas ekonomi, kebutuhan atas peningkatan kapasitas dan kualitas jalan juga meningkat. Persoalan utama yang dihadapi terkait jalan adalah meningkatnya trafik dari transportasi batubara di jalan kota yang menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan. Selama periode 2018-2022, rasio jalan berkondisi baik di Kota Jambi mengalami penurunan. Selain itu, terkait transportasi publik, isu yang dihadapi adalah belum tersedianya penyediaan transportasi publik perkotaan yang terkoneksi dan terintegrasi, serta mudah diakses oleh masyarakat.



Peningkatan tutupan lahan juga berdampak terhadap peningkatan *run off* yang berbanding terbalik dengan kemampuan saluran drainase yang ada pada saat ini. Masih minimnya infrastruktur sumberdaya air, menyebabkan sekitar 1.301 ha lahan permukiman perkotaan sangat rentan terhadap bencana banjir.

**Tabel 3.3**  
**Isu dan Permasalahan Infrastruktur Daerah**

Pusat Isu	Permasalahan
Sistem jaringan transportasi	Sistem jaringan jalan kota yang belum terstruktur dengan baik
	Penurunan kemampuan pelayanan jalan utama kota akibat semakin tidak sebandingnya daya dukung jalan terhadap beban pergerakan
	masih terbatasnya lebar jalan interseksi untuk mengurangi beban jalan utama
	belum berhasilnya penyediaan transportasi publik perkotaan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengurangan kemacetan
	Kebutuhan peningkatan dermaga penyeberangan sungai
Jaringan Utilitas Kota	Kebutuhan pengembangan jaringan distribusi pada kawasan pengembangan permukiman kota
	Jaringan pipa gas rumah tangga belum merata
	Belum seluruh bagian wilayah kota terlayani sistem penyediaan air minum perpipaan
	Kebutuhan peremajaan jaringan pipa air minum eksisting
	Belum seluruh bagian wilayah kota terlayani sistem telekomunikasi jaringan tetap
	Sistem jaringan sumberdaya air yang belum memadai

#### **D. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan

pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan yang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kerentanan terhadap bencana. Berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2021, diperkirakan jumlah bangunan yang berada pada zona peruntukan lindung seperti sempadan sungai dan danau sebanyak 11.797 unit dan luas pelanggaran bangunan seluas 127,37 ha.

Selain itu, pola penggunaan lahan merupakan pembangkit utama pola pergerakan penduduk dalam suatu wilayah. Perbedaan lokasi antar fungsi lahan atau komponen-komponen guna lahan menimbulkan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah tersebut. Dalam arti lain, Interaksi antar komponen pemanfaatan ruang yang paling umum tercermin dari aliran penduduk antar pusat-pusat kegiatan dalam suatu wilayah tersebut. Aliran jumlah kendaraan baik dalam bentuk tabel ataupun gambar ilustrasi, merupakan pendekatan yang paling umum dalam melihat keterkaitan antar komponen ruang. Dalam mendeskripsikan keterkaitan antar komponen ruang suatu wilayah melalui aliran pergerakan, tingkat keterkaitan dapat diamati dari besaran objek yang dialiri melalui jaringan prasarana utama dari fungsi lahan yang satu terhadap fungsi lahan yang lain. Semakin meningkat perkembangan kota, semakin meningkat pula bangkitan pergerakan, sementara prasarana jalan terlambat berkembang dan menimbulkan penurunan signifikan terhadap kemampuan pelayanan jalan-jalan utama kota, kemacetan, dan selanjutnya berdampak terhadap penurunan kualitas udara.

Beberapa permasalahan lain terkait lingkungan di Kota Jambi misalnya adalah pencemaran lingkungan akibat limbah domestik. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 32-43 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukkan dengan indikator pencemaran hingga kategori sedang. Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung *greywater* rumah tangga dan termasuk kegiatan sosial ekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan Sub DAS Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah *E.Choli* yang signifikan berasal dari limbah domestik.

Sementara itu, Belum semua bagian wilayah terlayani oleh sistem persampahan kota. Pelayanan persampahan saat ini 74,97%. 20 (dua puluh) tahun yang akan datang produksi timbulan sampah diperkirakan akan meningkat sekitar 496,08 ton/hari.

Tidak saja pada pengelolaan terhadap limbah domestik atau sampah yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Kota Jambi juga mempunyai potensi permasalahan yang timbul dari timbulan limbah B3 di Kota Jambi yang terus meningkat, seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan industri, serta Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien.

Untuk menjaga kondisi lingkungan yang layak hingga 20 tahun ke depan, pemerintah Kota Jambi perlu menindaklanjuti hal ini dengan pendekatan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus menjadi perhatian Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan juga berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon serta mengoptimalkan sampah sebagai salah satu sumber energi melalui kebijakan *waste to energy*.

**Tabel 3.4**  
**Isu dan Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup**

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Ruang	Belum tersedia rencana rinci tata ruang
	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesesuaian dengan rencana tata ruang
	Pemanfaatan ruang untuk kegiatan fisik terbangun pada lahan tidak sesuai daya dukung
	Arah pengembangan perumahan yang belum terarah dengan baik
	Konflik ruang industri dengan perumahan
	Alih fungsi lahan pertanian perkotaan dan kebutuhan Kebutuhan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
	Belum optimalnya sinkronisasi pemanfaatan ruang di

Pusat Isu	Permasalahan
	kawasan perbatasan
	Kebutuhan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk mereduksi beban pusat eksisting
	Ketersediaan RTH Publik yang belum mencapai 20%
Lingkungan Hidup	Penurunan kualitas air permukaan
	Penurunan kualitas udara
	Belum seluruh bagian kota terlayani sistem pengelolaan persampahan kota
	Permukiman dengan kualitas lingkungan kurang baik
	Peningkatan kerentanan bencana banjir
	Kerentanan bencana kebakaran di kawasan permukiman

## E. Keuangan Daerah

Salah satu ukuran untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah dengan menghitung rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri jika proporsi PAD terhadap total pendapatan minimal sebesar 50%. Kota Jambi pada periode 2018-2022 memiliki rata-rata proporsi PAD sebesar 23,06 yang menunjukkan bahwa Kota Jambi belum mencapai kemandirian fiskal. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi PAD adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, terdapat kendala dalam pemanfaatan aset daerah yang belum optimal dan berkontribusi untuk meningkatkan PAD.

Kondisi sektor unggulan yang menjadi kontributor utama PAD bagi perekonomian daerah merupakan hal yang harus dijaga oleh Pemerintah, Secara langsung, Kota Jambi menjadi pusat transaksi atau penjualan komoditas perkebunan seperti Sawit dan Karet. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan dimaksud. Pemerintah perlu menyadari bahwa harga komoditas unggulan tersebut tidak

hanya berpengaruh kepada PAD atau perekonomian daerah, namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani secara langsung.

**Tabel 3.5**  
**Isu dan Permasalahan Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pusat Isu	Permasalahan
Keuangan Daerah	Masih rendahnya kemandirian daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD
	Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah

#### **F. Tata Kelola Pemerintahan**

Pemerintah Kota Jambi juga masih menghadapi permasalahan dalam hal Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan akar permasalahan yaitu: masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik serta kualitas layanan yang akuntabel yang belum optimal.

**Tabel 3.6**  
**Isu dan Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan**

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Kelola Pemerintahan	belum optimalnya implementasi <i>e-government</i> pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik
	belum optimalnya kualitas layanan yang akuntabel
	Belum optimalnya proses layanan percepatan perizinan

## **3.2 Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya.

Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi adalah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 20 tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

### **3.2.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi isu strategis utama dalam pembangunan jangka panjang Kota Jambi. Adanya kecenderungan stagnasi dalam penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada beberapa periode terakhir di Kota Jambi perlu menjadi perhatian utama dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang mampu berdampak signifikan. Program penanggulangan kemiskinan harus dirancang untuk mengatasi kemiskinan secara

berkelanjutan, yakni dengan memfokuskan pada program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang perlu difokuskan adalah memberikan akses kepada aset dan modal yang produktif.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus didukung dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Jambi. Penciptaan lapangan pekerjaan harus bersifat inklusif dan diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, mendorong pertumbuhan UMKM juga dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dukungan terhadap UMKM perlu menjadi perhatian terutama dukungan terkait permodalan, akses pasar, pemasaran secara digital, serta literasi keuangan.

### **3.2.2. Infrastruktur dan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi**

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pendukung konektivitas mutlak diperlukan. Daerah yang memiliki konektivitas yang baik dapat menurunkan biaya logistik khususnya yang tersambung pada kawasan-kawasan pusat industri. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas pendukung aktivitas ekonomi seperti peningkatan kualitas jalan yang mampu meningkatkan efisiensi biaya logistik. Terlebih lagi karena sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kota Jambi.

Melihat kondisi saat ini, perkembangan kota semakin berdampak terhadap penurunan kemampuan pelayanan jalan utama. Sistem jaringan jalan yang belum terstruktur dengan baik untuk menghubungkan secara efektif pusat-pusat kegiatan, serta peluang peningkatan dimensi yang terbatas untuk menampung pergerakan yang semakin meningkat perlu menjadi perhatian untuk pengembangan jalan-jalan interseksi, pembangunan konektivitas baru, ataupun penataan persimpangan sebidang. Secara umum, dalam lingkup regional sudah ada rencana pembangunan jalan tol yang beberapa simpulnya berada di *hinterland* Kota Jambi, dan masih dalam lingkup kebijakan regional sudah ada

rencana pembangunan *outer ring road* baru di wilayah kabupaten berbatasan, sehingga pergerakan, terutama untuk moda angkut barang akan berpindah dari jalan lingkar kota saat ini. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya pemanfaatan potensi ekonomi akibat adanya rencana Pembangunan *outer ring road* yang baru serta jalan Tol Trans Sumatera. Kondisi terkini Jalan Tol yang sedang dalam proses pembangunan tidak langsung melewati wilayah administrasi pemerintahan Kota Jambi. Tantangannya, Pemerintah Kota Jambi harus mampu menyediakan dan meningkatkan kapasitas dan kuantitas jalan penghubung yang menghubungkan jalan Tol kepada pusat-pusat industri di Kota Jambi. Selain itu, penurunan kualitas jalan di dalam kota harus menjadi perhatian serius demi mampu mengoptimalkan peluang peningkatan aktivitas ekonomi dari keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah dikemukakan sebelumnya.

Selain prasarana utama tersebut, aspek infrastruktur lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam mempersiapkan perkembangan Kota Jambi ke depan adalah kebutuhan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan yang sejauh ini belum terpenuhi seluruhnya dan juga upaya menyiapkan pemenuhan pelayanan terhadap kawasan-kawasan perkembangan baru di Kota Jambi.

### **3.2.3. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia**

Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dapat menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas SDM masih menjadi isu strategis dalam pembangunan jangka panjang daerah. Peningkatan SDM dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak dan kesetaraan gender. Salah satu parameter yang bisa digunakan dalam mengukur kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Isu utama yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM adalah peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penghapusan kasus gizi buruk, optimalisasi pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta optimalisasi penanganan PMKS di luar panti.



#### **3.2.4. Lingkungan hidup yang berkelanjutan**

Lingkungan hidup merupakan hal yang krusial bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global. Kebijakan pembangunan sedapatnya menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlangsungan kualitas lingkungan kota. Kawasan berkarakteristik perkotaan memiliki kecenderungan perkembangan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Semakin pesat perkembangan kota, akan semakin tinggi dampak negatifnya terhadap kualitas lingkungan hidup di kota tersebut.

Oleh karena itu, selain memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan nasional, Isu terkait tata ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu strategis yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap daerah dan masyarakat. Rumusan kebijakan pengembangan dan pengendalian ruang kota menjadi tantangan bagi kedepan, agar pemerintah kota dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi serta memenuhi hak masyarakat akan ruang kota yang nyaman dan layak huni.

#### **3.2.5. Kualitas pelayanan publik dan praktik *Good Corporate Governance* dalam Pemerintahan Daerah.**

Mengikuti arahan KemenpanRB dalam agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance* atau tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan dan perbaikan infrastruktur pelayanan publik yang sesuai dengan *e-governance*.

Kompetensi sumber daya manusia aparatur belum secara keseluruhan memiliki kompetensi yang sesuai dalam mendukung kebutuhan organisasi. Di samping itu, persebaran kualitas sumber daya manusia aparatur juga belum merata. Penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberadaan sumber daya manusia aparatur yang terus dikembangkan untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Sebagai pendukung,

fasilitas sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan.

# B A B IV

## VISI MISI DAERAH



Visi dan Misi pembangunan Kota Jambi adalah komponen penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi. Visi pembangunan jangka panjang Kota Jambi tahun 2025-2045 merupakan gambaran masa depan Kota Jambi yang diinginkan, mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Jambi. Visi dan Misi Kota Jambi akan menjadi acuan perencanaan pembangunan untuk menjawab permasalahan, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Jambi.

#### 4.1 VISI

Dengan mempertimbangkan kondisi, aspirasi dan amanat pembangunan Provinsi Jambi dan Nasional yang diturunkan pada konteks pembangunan daerah Kota Jambi, maka visi pembangunan jangka panjang Kota Jambi 2025-2045 adalah

### **“KOTA JAMBI YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKELANJUTAN”**

Visi tersebut mengandung makna dan **sasaran** sebagai berikut:

**Kota Jambi Yang Maju** mengandung arti bahwa seluruh Masyarakat Kota Jambi dapat terpenuhi hak-hak dan kebutuhan hidupnya, sehingga dapat menikmati kehidupan yang sehat dan berkualitas, serta memiliki pilihan yang luas dalam kehidupannya.

**Kota Jambi yang Sejahtera**, mengandung makna kesejahteraan lahir batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan. Kesejahteraan yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Kota Jambi yang Sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi melainkan juga batiniah. Sejahtera lahiriah yaitu terpenuhinya segala aspek kebutuhan dasar masyarakat dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Jambi. Sejahtera batiniah, yaitu kondisi ketika masyarakat Kota Jambi dapat menjalankan ibadah dan nilai-nilai agama menurut kepercayaannya masing-masing, termasuk melestarikan nilai-nilai budaya sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang dianut serta dijunjung tinggi akan membuat masyarakat Kota Jambi memiliki hidup yang lebih aman dan tentram.

**Kota Jambi yang Adil**, adalah kondisi yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Jambi dalam melakukan segala aktivitas dan keberlangsungan hidupnya.

**Kota Jambi yang Berkelanjutan**, ditandai oleh berbagai praktik dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan, dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang sebagai wilayah yang layak huni dan nyaman untuk semua lapisan masyarakat.

## 4.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai melalui agenda pembangunan yang akan dilaksanakan.

Adapun misi **agenda pembangunan** dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi, profesional, dan religius;
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
5. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya melalui pelembagaan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan keadilan ekologi bagi semua pihak.
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas yang ramah lingkungan dan meningkatkan koneksitas antar wilayah.

### **Misi ke-1: meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang inklusif**

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi adalah meningkatkan pertumbuhan yang dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat secara lebih merata dan berkeadilan dalam distribusi dan partisipasi dalam proses pembangunan serta hasil-hasil pembangunan. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan Kota Jambi yang berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi serta ketidaksetaraan sosial.

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang inklusif dicirikan oleh:

**1. Penciptaan Lapangan Kerja**

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mencakup penciptaan lapangan kerja yang memadai, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengangguran atau kurangnya akses ke peluang pekerjaan di Kota Jambi.

**2. Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Mendorong pertumbuhan UMKM dengan menyediakan dukungan finansial, pelatihan, dan akses pasar. Ini dapat menciptakan peluang bagi wirausaha Kota Jambi dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

**3. Peningkatan Akses ke Layanan Keuangan**

Memberikan akses yang lebih baik ke layanan keuangan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses. Ini dapat mencakup pembiayaan mikro dan akses ke perbankan.

**4. Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Kesehatan yang baik dan keamanan ekonomi memberikan dasar yang kuat untuk inklusivitas.

**5. Infrastruktur dan Akses Masyarakat**

Membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti transportasi publik yang terjangkau dan aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi.

**6. Perlindungan Hak dan Kesetaraan Gender**

Menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama.

#### **7. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**

Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam proses ini.

#### **8. Pengembangan Pusat-pusat Ekonomi**

Pengembangan pusat-pusat ekonomi yang hierarkis berdasarkan skala pelayanan untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan pemerataan perkembangan kota.

**Misi ke-2: Mewujudkan sumberdaya manusia Kota Jambi yang Sejahtera, berdaya saing tinggi, profesional dan religius.**

Kemajuan Pembangunan yang merata salah satunya didukung dengan sumberdaya manusia yang unggul berkualitas dan berdaya saing. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 transformasi sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender dan sosial. Selain itu, aspek religius menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan moral dan akhlak yang mulia agar tercipta karakter masyarakat yang unggul dan berdaya saing tinggi. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, profesional, dan religius dilakukan dengan melibatkan kombinasi pengembangan keterampilan teknis, sikap profesional, serta nilai-nilai keagamaan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, profesional dan religius dilakukan dengan meningkatkan:

#### **1. Pendidikan Berkualitas Tinggi**

Investasi dalam sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan formal dan pelatihan berkelanjutan. Memastikan ketersediaan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta pengembangan keterampilan yang diperlukan.

## **2. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan**

Menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan profesional. Ini dapat melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan atau pelatihan.

## **3. Mendorong Inovasi dan Kreativitas**

Memberikan dukungan untuk budaya inovasi dan kreativitas. Membangun lingkungan yang memotivasi sumber daya manusia untuk menciptakan solusi baru dan berpikir kritis.

## **4. Etika Profesional**

Mengintegrasikan etika profesional dalam kurikulum dan praktik bisnis. Memastikan bahwa sumber daya manusia tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan etika kerja yang tinggi.

## **5. Pengembangan Kepemimpinan**

Menyediakan peluang untuk pengembangan kepemimpinan. Hal ini termasuk pelatihan kepemimpinan dan dukungan untuk pertumbuhan karir, sehingga sumber daya manusia dapat mengambil peran kepemimpinan yang efektif.

## **6. Peningkatan Literasi Digital**

Dengan berkembangnya teknologi, literasi digital menjadi keterampilan yang sangat penting. Memastikan bahwa sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dengan efektif.



## **7. Pengembangan *Soft Skills***

Selain keterampilan teknis, pengembangan keterampilan lunak juga krusial. Ini mencakup keterampilan komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, dan adaptabilitas.

## **8. Dukungan untuk Nilai-nilai Religius**

Mendorong nilai-nilai keagamaan dan etika dalam pendidikan dan tempat kerja. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan moral sumber daya manusia.

## **9. Kemitraan dengan Industri**

Membangun kemitraan antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor industri. Dengan melibatkan industri, pendidikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

## **10. *Mentoring* dan Pembimbingan**

Menyediakan program mentoring dan pembimbingan untuk membantu pengembangan karir dan pertumbuhan pribadi. Mentor dapat memberikan panduan berharga dalam pengembangan profesional.

## **Misi ke-3: Mewujudkan lingkungan hidup Kota Jambi yang sehat dan berkelanjutan.**

Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan merupakan serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan alam, menjaga kesehatan manusia, dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagi Kota Jambi dapat diwujudkan dengan:

### **1. Konservasi Sumber Daya Alam**

Melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk air, tanah, dan biodiversitas. Ini melibatkan

penggunaan sumber daya dengan bijak untuk menghindari degradasi dan penurunan kualitas sumberdaya alamiah serta rehabilitasi/revitalisasi kawasan sempadan sungai dan danau.

## **2. Kebijakan Lingkungan**

Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan lingkungan yang kuat dari aspek regulasi, pengawasan dan penegakan hukum. Termasuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah terkait perlindungan lingkungan dan memberikan insentif untuk praktik-praktik berkelanjutan yang mengedepankan kelestarian lingkungan.

## **3. Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan**

Memastikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dengan mengurangi pemanfaatan lahan pada lokasi yang tidak sesuai atau tidak memiliki daya dukung. Penetapan dan pengembangan pertanian berkelanjutan dengan sistem vertikal atau hemat lahan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang melibatkan kontribusi multi pihak. Upaya ini diupayakan juga dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, serta kapasitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang memperhatikan kualitas ekologis.

## **4. Pengelolaan Limbah yang Efektif**

Menerapkan praktik pengelolaan limbah yang efektif, termasuk daur ulang dan pengurangan sampah. Mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang.

## **5. Penggunaan Energi Terbarukan**

Beralih ke sumber energi baru dan terbarukan seperti matahari, angin, dan air untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

## **6. Mendorong Transportasi Ramah Lingkungan**

Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti transportasi umum, sepeda, dan mobil listrik. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung transportasi umum dan berkelanjutan yang dapat diakses publik dan memiliki tingkat keterhubungan yang memadai.

#### **7. Pemukiman Berkelanjutan**

Membangun dan merencanakan pemukiman yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi lingkungan. Termasuk mengedepankan desain bangunan yang ramah lingkungan, hemat energi, mengelola fungsi taman kota atau area terbuka hijau dalam skala pemukiman.

#### **8. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi**

Menjaga kualitas air dan memastikan akses masyarakat terhadap air bersih yang aman terjamin dan berkelanjutan. Meningkatkan sistem sanitasi untuk mengurangi tingkat pencemaran air yang dalam jangka panjang akan menurunkan mutu air konsumsi.

#### **9. Pendidikan Lingkungan**

Melibatkan masyarakat, Lembaga pendidikan dan kelompok-kelompok non formal termasuk organisasi non pemerintah melalui program pendidikan lingkungan dan kegiatan partisipatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan mendorong tindakan berkelanjutan.

#### **10. Kemitraan dan Kolaborasi**

Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Kerjasama dalam bentuk *Triple Helix* dan *Penta Helix* ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan kolaboratif yang berkelanjutan.

#### **11. Respon Terhadap Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Alam**

Mengambil tindakan responsif terhadap perubahan iklim, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi dampak kerentanan bencana alam

dan perubahan iklim ekstrim. Kebijakan yang ditempuh sedapat mungkin mempertimbangkan manajemen resiko, mitigasi dan adaptasi sejak skala terkecil guna minimalisasi akumulasi dampak yang berpotensi menyebabkan gagalnya antisipasi terhadap berbagai potensi bencana akibat perubahan iklim.

## **12. Penegakan Hukum Lingkungan**

Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Penegakan hukum dimaksud mencakup sanksi bagi mereka yang merusak lingkungan dan merusak keberlanjutan kelestarian lingkungan.

### **Misi ke-4: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kota Jambi yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.**

Tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien merupakan hal yang menjadi kunci untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Jambi dilakukan dengan:

#### **1. Peningkatan pelayanan pemerintahan**

meningkatkan kualitas pelayanan berkualitas yang diberikan oleh pemerintah dengan menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi.

#### **2. Peningkatan akses pelayanan masyarakat**

Meningkatkan kemudahan akses pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman kepada masyarakat luas.

#### **3. Transparan**

Menjaga transparansi ketersediaan dan keterbukaan informasi untuk dapat diakses publik.

**4. Meningkatkan peran masyarakat**

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan penyelenggaraan pertemuan publik, forum diskusi, dan *platform* daring untuk memberikan ruang untuk memberikan masukan dan pendapat yang berasal dari masyarakat.

**5. Meningkatkan mekanisme pengaduan**

Menyediakan mekanisme pengaduan publik yang efektif untuk memungkinkan masyarakat melaporkan ketidakpatuhan atau perilaku korupsi. Memberikan perlindungan kepada pelapor yang berani (*whistle blower*).

**6. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur**

Memberikan pelatihan dan pendidikan terus-menerus kepada pegawai pemerintahan tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, etika, dan hukum yang berlaku.

**7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi**

Menerapkan sistem pemantauan kinerja berbasis hasil yang jelas dan terukur. Fokus pada pencapaian tujuan dan hasil konkret yang dapat diukur dan dievaluasi.

**8. Mereformasi kebijakan hukum tata kelola**

Melakukan reformasi kebijakan dan hukum yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ini dapat mencakup pembaharuan hukum anti-korupsi dan perbaikan proses penganggaran.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

	<b>RPJPN 2025-2045</b>	<b>RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045</b>
	Misi 2 Transformasi Ekonomi, IE 4, IE7, IE8,	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
	Misi 1 Transformasi Sosial, IE1, IE2, IE3	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi, profesional, dan religius
	Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya, IE15 dan IE17	Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan
	Misi 3 Transformasi Tata Kelola, IE9	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Visi dan Misi RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 telah diselaraskan dengan Visi dan Misi yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan mempertimbangkan aspek-aspek terkait kesesuaian kewenangan daerah dan potensi permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi isu-isu strategis untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Penyelarasan tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk membangun dokumen perencanaan pembangunan berjenjang yang terkoneksi secara rinci dan terukur. Dokumen perencanaan yang terintegrasi dan selaras menjadi awal dari konsistensi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi dokumen perencanaan bertujuan untuk menghasilkan kebijakan dan arah sasaran yang harmonis dan saling mendukung.

# B A B V

## ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



### 5.1 ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi periode 2025-2045 diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir dari berbagai isu strategis dan masalah yang telah di himpun berlandaskan pada visi dan misi daerah. Tabel di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro, sasaran, indikator, dan arah kebijakan lima tahunan rencana pembangunan di Kota Jambi.

**Tabel 5.1**  
**Target Capaian Indikator Makro**

Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Capaian			
			Periode 1 (2029)	Periode 2 (2034)	Periode 3 (2039)	Periode 4 (2045)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,58	83.67	86.52	89.40	92.85
PDRB Perkapita (Berlaku)	Juta rupiah	58,33	93.53 – 95.26	132.8 – 135.2	188.1 – 191.5	283.3 – 288.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,36	5.02 – 6.97	5.46 – 7.41	5.61 – 7.56	5.73 – 7.68
Tingkat pengangguran	%	8,95	5.96	5.19	4.86	4.70
Persentase Penduduk Miskin	%	8,33	7.55	7.05	6.53	5.91
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	11,21	11.92	12.45	12.95	13.57
Indeks Gini	Indeks	0,36	0.29	0.27	0.25	0.24

Sumber: Hasil Olahan, 2023.

## 5.2 Sasaran Pokok

Berdasarkan analisis capaian indikator makro, pada akhir RPJP periode 2025-2045, Kota Jambi diharapkan dapat mencapai target IPM pada angka 92.85; PDRB per Kapita sebesar 128.99 juta rupiah; LPE sebesar 6.7%; TPT sebesar 4.70%; Prosentase Penduduk Miskin sebesar 5.91%; Rata-rata Lama sekolah 13.57 dan Indeks Gini sebesar 0.24. Untuk mewujudkan target ini maka diperlukan sasaran pokok yang harus dilakukan. Berdasarkan rumusan visi dan misi yang telah disusun sebelumnya, pembangunan Kota Jambi secara lebih rinci diarahkan melalui perwujudan sasaran pokok sebagai berikut.

**Tabel 5.2**  
**Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan**

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
<b>Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Yang Inklusif</b>				
Mewujudkan perekonomian yang maju dan berketahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta efisiensi rantai distribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengoptimalan digitalisasi dan inovasi teknologi dalam mendorong produktivitas, dan efisiensi produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan inovasi berteknologi tinggi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk komoditas yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi</li> </ul>



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
Mengembangkan sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya secara modern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan daya tarik destinasi wisata</li> <li>• Penggalian potensi wisata religi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan destinasi baru pariwisata</li> <li>• Pengembangan wisata religi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan potensi-potensi dan inovasi destinasi yang ada</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung wisata religi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan potensi budaya lokal, sejarah dan cagar budaya daerah</li> <li>• Pemantapan kualitas wisata religi.</li> </ul>
Menyediakan Infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur strategis dalam mendukung perekonomian</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang sesuai peruntukannya</li> <li>• Peningkatan penyediaan transportasi publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendorong aktivitas perekonomian</li> <li>• Peningkatan konektivitas transportasi publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan keterkaitan antar infrastruktur yang ada dalam meningkatkan aktivitas ekonomi</li> <li>• Peningkatan kualitas transportasi publik yang nyaman dan terjangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan infrastruktur yang handal dan berkualitas untuk menjadikan keunggulan utama daerah</li> <li>• Pemantapan kualitas transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau</li> </ul>
Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas perempuan dalam aktifitas perekonomian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembangunan manusia berbasis gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan kesetaraan gender dalam pembangunan</li> </ul>
Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dukungan untuk mendorong UMKM</li> <li>• Peningkatan akses digitalisasi UMKM</li> <li>• Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan komoditas unggulan UMKM yang memiliki daya saing di pasar domestik dan luar negeri</li> <li>• Peningkatan jangkauan pasar UMKM melalui digitalisasi</li> <li>• Peningkatan cakupan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan ekosistem pendukung UMKM melalui dukungan pemasaran dan permodalan</li> <li>• Pemantapan kualitas melalui sertifikasi keahlian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan dan akselerasi ekosistem UMKM untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi</li> <li>• Peningkatan produktivitas tenaga kerja</li> </ul>
<b>Misi 2: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kota Jambi Yang Sejahtera, Berdaya Saing Tinggi, Profesional dan Religius</b>				
Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas tenaga pendidik;</li> <li>• Peningkatan kualitas dan ketersediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah dan pemerataan kualitas tenaga pendidik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan daya saing lulusan pendidikan menengah dan tinggi terhadap</li> </ul>

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
	sarana & prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan kondisi sarana &amp; prasarana pendidikan yang maju dan modern</li> </ul>	lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian menengah tinggi	lapangan kerja yang sesuai bidang keahlian
Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai &amp; memenuhi standar</li> <li>• Peningkatan kuantitas &amp; kualitas SDM bidang kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan akses fasilitas kesehatan yang memadai &amp; memenuhi standar</li> <li>• Pemerataan kuantitas &amp; kualitas SDM bidang kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi bidang kesehatan</li> <li>• Peningkatan kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi bidang kesehatan</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas kesehatan</li> </ul>
Mewujudkan perlindungan sosial yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas manfaat program perlindungan sosial</li> <li>• Peningkatan kualitas data PMKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan perlindungan sosial yang inklusif untuk semua masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan jaminan perlindungan sosial yang berkelanjutan dalam mengentaskan masalah sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas PMKS untuk</li> </ul>
Mewujudkan individu yang memahami nilai-nilai religius	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai religius dalam masyarakat</li> <li>• Menyusun kurikulum pendidikan karakter dan religi untuk seluruh jenjang pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan cakupan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai religius dalam masyarakat</li> <li>• Menerapkan kurikulum pendidikan karakter dan religi untuk seluruh jenjang pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat nilai-nilai karakter dan penanaman nilai-nilai religius dalam masyarakat</li> <li>• Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan religi untuk seluruh jenjang pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membudayakan nilai-nilai religius dalam masyarakat</li> <li>• Membudayakan nilai-nilai karakter dan religius untuk siswa di seluruh jenjang pendidikan</li> </ul>
Peningkatan daya saing pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan fasilitas penunjang aktivitas kepemudaan dan pelatihan di bidang olahraga, kesenian, dan kewirausahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dukungan pengembangan organisasi kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional dan internasional di bidang olahraga, kesenian, dan kewirausahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran organisasi kepemudaan</li> </ul>
<b>Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Hidup Kota Jambi yang Sehat dan Berkelanjutan</b>				

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
Mengoptimalkan pemenuhan Komsumsi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian, perlindungan, serta pengembangan, Kawasan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan;</li> <li>• Peningkatan upaya diversifikasi tanam; serta</li> <li>• Peningkatan dukungan layanan irigasi untuk petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan dan pengembangan kerja sama dengan mekanisme <i>corporate farming</i>,</li> <li>• Peningkatan layanan infrastruktur pertanian,</li> <li>• Peningkatan upaya diversifikasi dan keterjangkauan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan ketahanan dan keterjangkauan pangan dengan upaya diversifikasi, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi yang memadai</li> </ul>
Meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas pembangkit listrik</li> <li>• Peningkatan kapasitas keandalan sistem kelistrikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan metode dan teknologi diversifikasi dan konservasi energi</li> <li>• Peningkatan suplai listrik untuk kawasan permukiman dan kawasan kegiatan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan penerapan teknologi hijau sebagai sumber-sumber listrik alternatif</li> <li>• Peningkatan upaya efisiensi energi dan optimalisasi EBT;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan dan Pengendalian kapasitas listrik yang merata dan menyeluruh</li> </ul>
Meningkatkan infrastruktur air bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan alternatif sumber-sumber air bersih untuk meningkatkan pasokan air baku</li> <li>• pemanfaatan air tanah sebagai pendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan air daerah dalam menjaga <i>supply</i> dan <i>demand</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan teknologi dalam peningkatan kinerja layanan infrastruktur sumber air</li> <li>• Pengembangan kapasitas manajemen air sirkular</li> <li>• Peningkatan efisiensi penggunaan air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian pemanfaatan sumber daya air khususnya kualitas serta kuantitas air baku.</li> </ul>
Meningkatkan penanganan dan pencegahan risiko bencana serta perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas daerah untuk penanganan risiko bencana melalui mitigasi dan mekanisme penanggulangan bencana</li> <li>• Peningkatan kapasitas daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan <i>Early Warning System</i> untuk peringatan kebencanaan;</li> <li>• Penerapan upaya dekarbonisasi sumber energi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan teknologi <i>Early Warning System</i> yang andal dan terintegrasi</li> <li>• Peningkatan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana dan krisis iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan ketahanan dan kapasitas daerah terhadap upaya mitigasi bencana dan pengendalian krisis iklim</li> </ul>

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
	untuk mengembangkan alternatif pembangunan rendah karbon			
Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional</li> <li>• Penurunan angka kejahatan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kerja sama antar daerah untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan dan pengembangan teknologi pengelolaan limbah dan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan manajemen dan infrastruktur pengelolaan limbah dan persampahan yang sirkuler</li> </ul>
Mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dalam aktivitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sosialisasi dan intervensi kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan rumah tangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas umum yang mendukung aktivitas ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi dan infrastruktur ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan kebijakan, teknologi, dan infrastruktur yang mendukung praktik ramah lingkungan</li> </ul>
Meningkatkan ketersediaan RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah RTH di Kota Jambi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan batas minimal RTH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana RTH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengoptimalan pemanfaatan RTH sebagai wadah kegiatan masyarakat</li> </ul>
<b>Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Jambi yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien</b>				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas manajerial, pembagian tugas, pokok, dan fungsi pada seluruh instansi pemerintahan</li> <li>• Penyusunan rencana digitalisasi/ pengadopsian teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dan berjangka panjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur TI/digitalisasi pada instansi pemerintahan secara menyeluruh yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengintegrasian dan pemanfaatan IT/digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan tata laksana pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis digital dan teknologi informasi</li> </ul>
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas kompetensi ASN pengelola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan digitalisasi/ penggunaan teknologi informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan inovasi dalam mendorong pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan pengelolaan keuangan daerah yang</li> </ul>

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
yang transparan, akuntabel dan efisien	keuangan daerah	dalam pengelolaan keuangan daerah	keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien	transparan, akuntabel, efektif dan efisien
Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemahaman SPIP kepada seluruh OPD terkait serta menyusun kebijakan dan SOP yang berhubungan dengan SPIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian instansi pemerintahan</li> <li>• Peningkatan kompetensi APIP secara optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan berkelanjutan pada SPIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan SPIP dan kapabilitas APIP</li> </ul>
Mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kompetensi dan nilai moral ASN yang sesuai dengan kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperketat sistem manajemen ASN terutama yang terkait dengan profesionalitas serta <i>reward and punishment</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan standar kualitas dan kinerja ASN</li> </ul>
Mewujudkan pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan pemahaman dan kapasitas kebijakan pelayanan publik oleh seluruh instansi pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan pelayanan publik yang prima</li> </ul>

### 5.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 5 TAHUNAN

Arah kebijakan pembangunan daerah direncanakan ke dalam 4 periode dalam rentang waktu 5 tahun pada masing-masing periode. Arah kebijakan setiap periode dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

#### 1. Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Pertama (Periode 1)

Arah kebijakan Pembangunan yang pertama bertemakan **“Perbaiki infrastruktur untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing”**. Pada periode pertama ini arah kebijakan diarahkan untuk mempersiapkan segala bentuk infrastruktur pendukung pembangunan ekonomi di berbagai aspek mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pusat perdagangan, serta infrastruktur logistik. Infrastruktur

sebagai modal dasar pembangunan diwujudkan melalui pembangunan dan pemerataan sarana prasarana bagi setiap bidang seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, transportasi, dan ekonomi serta perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas yang sudah ada saat ini. Infrastruktur ini diharapkan akan memberikan modal awal untuk dapat meningkatkan pertumbuhan yang lebih maju. Selain mendorong pemerataan pembangunan, hal ini juga akan mewujudkan Kota Jambi menjadi kota yang berdaya saing di Provinsi Jambi.

## 2. **Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua**

Arah kebijakan Pembangunan yang ke-dua bertemakan “**Peningkatan sumberdaya manusia untuk menjadikan Kota Jambi sebagai pusat ekonomi di Provinsi Jambi**”. Saat infrastruktur sudah tersedia maka pada saatnya untuk mengakselerasi Pembangunan di daerah. Untuk mengakselerasi Pembangunan di daerah maka harus dipersiapkan pula sumber daya manusia pendukungnya. Pada periode ini arah kebijakan akan diarahkan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Pembangunan perekonomian daerah. Hal ini akan diwujudkan melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas. Selain aspek kualitas, perlu juga ditanamkan nilai-nilai religius dalam berbagai aspek agar tidak hanya tercipta SDM yang berkualitas secara keahlian namun juga SDM yang berkualitas secara ahlak dan moral yang ditanamkan.

## 3. **Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Ketiga**

Arah kebijakan Pembangunan yang ke-tiga bertemakan “**Pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Jambi**”. Pada tahap ini Kota Jambi akan difokuskan untuk ekspansi pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini akan diwujudkan melalui memberikan akses pemenuhan konsumsi masyarakat,

serta mendukung praktik-praktik ramah lingkungan sehingga terjadi keselarasan antara pertumbuhan ekonomi serta lingkungan yang semakin baik. Selain peningkatan kualitas hidup perlu juga diarahkan kepada perluasan pembangunan dengan cara pemanfaatan dan pengembangan teknologi; perluasan ekosistem digital dan inovasi teknologi dalam mendorong ekonomi; pengoptimalan pemenuhan kebutuhan ruang layak huni dan RTH; pengintegrasian seluruh wilayah melalui pengembangan transportasi publik; pengembangan efisiensi energi melalui pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan; serta pengoptimalan kapasitas daerah dalam menghadapi isu iklim dan bencana.

#### 4. **Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Keempat**

Arah kebijakan Pembangunan yang Keempat bertemakan “**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Menjadikan Kota Jambi sebagai Kota yang Maju**”. Setelah semua aspek sudah dipersiapkan maka arah kebijakan di periode ke-empat dan sekaligus periode akhir dari RPJPD akan difokuskan pada pemantapan capaian pembangunan. Pemantapan disini akan berfokus pada aspek internal untuk menciptakan dan memberikan tata kelola yang prima serta pengoptimalan segala aspek dan kondisi mulai dari sarana prasarana pembangunan, pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia, perlindungan sosial yang adaptif, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, produktivitas tinggi, daya saing produk lokal yang tinggi, pemantapan ketahanan energi, air dan pangan, pengendalian RTH publik yang berkelanjutan, serta pemantapan tata laksana pemerintahan daerah untuk mencapai predikat Kota Jambi sebagai Kota yang Maju.

# B A B VI

## PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah Kota Jambi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi setiap tahunnya.



Proses penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Jambi 2025-2045 ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, namun juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha serta tokoh-tokoh lokal dan berbagai pihak terkait lainnya. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan tersebut menjadi modal awal bagi keberhasilan implementasi RPJPD Kota Jambi dalam 20 tahun mendatang.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Jambi dalam mewujudkan visi “KOTA JAMBI YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN” perlu didukung oleh (1) komitmen dari pemimpin daerah yang kuat dan demokratis serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat luas; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat ; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan di Kota Jambi, serta (5) menjaga kesungguhan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan Kota Jambi.